

Dr. Muhammad Ghafur Wibowo, dkk.

DINAMIKA PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA TIMUR

Magister Ekonomi Syariah (MES)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)
Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

DINAMIKA PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA TIMUR

Muhammad Ghafur Wibowo, dkk.

Magister Ekonomi Syariah (MES)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

STRATEGI PEMBANGUNAN EKONOMI KABUPATEN DAN KOTA DI INDONESIA

Penulis:

- **Muhammad Ghafur Wibowo, Khalida Urfiyya, Nurpasila**
- **Misnen Ardiansyah, Arif Muallim, Tegar Brian Kusuma**
- **Ibnu Muhtir, Busman, Mohammad Hilmy Muwaffaq Ma'as**
- **Ibi Satibi, Dedi Mardianto, Muhamad Aliyul Adhim**
- **Syafiq M. Hanafi, Hasbi, Ardi Megantoro**
- **Abdul Haris, Mohammat Saiful Imam, Nasrullah**
- **M. Yazid Afandi, Ahmad Kholid Ubaidillah, Muhammad Al Faridho Awwal**
- **Slamet Haryono, Arif Muallim, Tegar Brian Kusuma**
- **Taosige Wau, Andi Ajeng Tenri Lala, Badi'ah**
- **Darmawan, Erlin Socalina, Faizah Nabila Mubarak**

Cetakan I, Juli 2021

16 x 23 cm; vi + 268 hlm.

Diterbitkan oleh:

Magister Ekonomi Syariah (MES)

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta

ISBN : 978-623-97540-0-6

Hak Cipta © dilindungi Undang-undang

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. atas limpahan taufiq dan hidayat-Nya sehingga buku “**Dinamika Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Timur**” ini dapat diselesaikan dengan baik. Kemudian shalawat serta salam mudah-mudahan selalu terlimpahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW. ***Buku ini merupakan hasil karya kolaborasi dosen dan mahasiswa Prodi Magister Ekonomi Syariah (MES), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.***

Buku ini akan memberikan gambaran secara gamblang mengenai masalah faktor penentu pembangunan ekonomi di Indonesia bagian timur. Sehingga dengan itu diharapkan buku ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi mahasiswa dalam memahami determinan pertumbuhan ekonomi di Indonesia bagian timur. Bagi peneliti, buku ini diharapkan sebagai pedoman dalam melakukan penelitian-penelitian yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi di Indonesia bagian timur, dan bagi masyarakat umum, buku ini diharapkan sebagai dasar pandangan dalam melihat keadaan perekonomian di Indonesia bagian timur.

Yogyakarta, Juli 2021

Penulis

Tim Prodi MES

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v

PENGARUH PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB), ANGKATAN KERJA, DAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) TERHADAP TINGKAT PENGANGGURAN DI SULAWESI

Dr. Muhammad Ghafur Wibowo, Khalida Urfiyya, Nurpasila	1
--	---

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMISKINAN DI PAPUA

Dr. Misnen Ardiansyah, Arif Muallim, Tegar Brian Kusuma.....	31
--	----

PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH DALAM SEKTOR KESEHATAN TERHADAP KASUS COVID-19 DI SULAWESI TENGGARA

Dr. Ibnu Muhdir, Busman, Mohammad Hilmy Muwaffaq Ma'as	55
--	----

ANALISIS PENGARUH JUMLAH PENDUDUK, PERTUMBUHAN PENDUDUK, DAN ANGKATAN KERJA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI PAPUA TAHUN 2017-2019

Dr. Ibi Satibi, Dedi Mardianto, Muhamad Aliyul Adhim	75
--	----

**PENGARUH JUMLAH PENDUDUK, TINGKAT
PENGANGGURAN DAN IPM TERHADAP
KETIMPANGAN PENDAPATAN DI PROVINSI
SULAWESI BARAT**

Dr. Syafiq M. Hanafi, Hasbi, Ardi Megantoro 99

**PENGARUH PRODUKTIVITAS DAN LUAS PANEN
PADI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI
SULAWESI TENGGARA**

Dr. Abdul Haris, Mohammad Saiful Imam, Nasrullah ... 127

**DETERMINASI VARIABEL-VARIABEL
TATA KELOLA PEMERINTAH DALAM
MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI
DAERAH DI KAWASAN INDONESIA TIMUR**

Dr. M. Yazid Afandi, Ahmad Kholid Ubaidillah,
Muhammad Al Faridho Awwal 149

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI KEMISKINAN DI PAPUA**

Dr. Slamet Haryono, Arif Muallim,
Tegar Brian Kusuma..... 187

**PENGARUH PENDIDIKAN TERHADAP
PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI
SULAWESI SELATAN**

Dr. Taosige Wau, Andi Ajeng Tenri Lala, Badi'ah 211

**PENGARUH PDB, TINGKAT PENGANGGURAN,
TINGKAT KEMISKINAN DAN PERTUMBUHAN
EKONOMI TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN
MANUSIA: Studi Kasus di Provinsi Indonesia
Timur Periode 2016-2020**

Dr. Darmawan, Erlin Socalina, Faizah Nabila Mubarak 237

PENGARUH PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB), ANGKATAN KERJA, DAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) TERHADAP TINGKAT PENGANGGURAN DI SULAWESI

Dr. Muhammad Ghafur Wibowo

(muhammad.wibowo@uin-suka.ac.id)

Khalida Urfiyya

(khalidaurfiyya@gmail.com)

Nurpasila

(nurpasila12345@gmail.com)

PENDAHULUAN

Dalam beberapa dekade terakhir, faktor-faktor mengenai pertumbuhan ekonomi banyak dipelajari secara signifikan. Sementara itu, angka pengangguran serta dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi banyak diteliti karena karakteristik ekonomi tersebut secara eksplisit disoroti di negara berkembang, khususnya di Indonesia. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) Agustus 2020 sebesar 7,07 persen, meningkat 1,84 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2019 (Badan Pusat

Statistik, 2020). Lebih spesifik, pada daerah bagian Pulau Sulawesi, jumlah pengangguran secara *continue* mengalami peningkatan.

Terhitung sejak 2016 hingga 2019, angka pengangguran terbuka di Sulawesi Selatan telah meningkat sebesar 1.30 persen, dari yang semula sejumlah 192.969 penduduk menjadi 252.499 penduduk menganggur di tahun 2020. Sulawesi Tengah dan Utara memiliki *trend* yang serupa. Pada Sulawesi Tengah, selama 4 tahun terakhir tingkat pengangguran dalam 9 kabupaten mengalami peningkatan dan yang tertinggi terjadi pada Kota Palu, yaitu meningkat sebesar 2.06% dari tahun 2019 ke tahun 2020.

Salah satu cara untuk keluar dari siklus kemiskinan adalah dengan memasuki pasar tenaga kerja. Hal ini memungkinkan kesejahteraan seseorang meningkat dan membebaskan dirinya dari kemiskinan. Penurunan tingkat kemakmuran dan kesejahteraan disebabkan oleh tingginya tingkat pengangguran. Tingkat kemiskinan dan pengangguran biasanya digunakan untuk menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat, sehingga menciptakan kemakmuran bagi seluruh masyarakat adalah tujuan suatu negara. Upaya penanggulangan kemiskinan dan pengangguran merupakan komitmen bersama seluruh komponen pemerintah dan masyarakat.

Pengangguran selalu menjadi penyebab dan perhatian utama bagi negara maju dan berkembang, yang dapat menyebabkan negara kehilangan dampak keuangan dan ekonomi dalam skala besar (Ahmad et al., 2021). Banyak ekonom berpendapat bahwa pengendalian angka pengangguran dan inflasi memiliki peran penting dalam perkembangan ekonomi di berbagai skala masyarakat. Tingkat pengangguran negara yang tinggi dapat membawa

dampak negatif bagi perekonomian negara tersebut. Hal tersebut akan membawa beban yang tinggi bagi pemerintah, keluarga dan lingkungan (Amalia, 2013). Dengan demikian, pengangguran sangat erat kaitannya dengan kemiskinan. Karena masih tergolong banyak orang yang menganggur, masalah kemiskinan akan terus meningkat. Angka kemiskinan masih tetap ada karena beberapa orang yang masih menganggur menghambat mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Pertumbuhan penduduk dan hal-hal yang berhubungan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja (*labor force*) secara tradisional dianggap sebagai faktor yang positif dalam merangsang pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut berarti semakin banyak jumlah angkatan kerja, akan semakin banyak pasokan tenaga kerja, dan semakin banyak jumlah penduduk akan meningkat potensi pasar domestik (Davidson et al., 2016). Peningkatan jumlah penduduk seraca umum terjadi di negara berkembang seperti Indonesia, dimana hal ini mengikuti pencapaian pertumbuhan ekonomi di negara tersebut (Jonaidi, 2012) *poverty, investments and economic growth*. (2. Kondisi tersebut dialami oleh negara berkembang maupun negara maju dengan sumber daya alam yang melimpah dan sumber daya manusia yang memadai (Astrini, 2013). Sementara kemiskinan merupakan masalah utama yang ditimbulkan oleh negara berkembang (Vincent, 2009).

Angkatan kerja yang tumbuh dengan cepat dapat akan menambah beban tersendiri bagi perekonomian yakni penciptaan atau perluasan lapangan kerja. Jika lowongan kerja baru tidak mampu menampung semua angkatan kerja baru maka sebagian angkatan kerja baru tersebut akan memperpanjang barisan penganggur yang sudah

ada. Hasil penelitian David et al. (2019), menunjukkan bahwa angkatan kerja memiliki pengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengangguran, dimana semakin tingginya jumlah angkatan kerja akan berpengaruh pada peningkatan rasio tingkat pengangguran.

Data statistik menunjukkan bahwa dalam lima tahun terakhir, angka jumlah Angkatan Kerja di Sulawesi berpola fluktuatif. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) rata-rata mengalami penurunan pada tahun 2019 dan Kembali meningkat pada tahun 2020. Sulawesi Tengah merupakan provinsi dengan peningkatan TPAK terbesar yaitu sebesar 1.64% pada tahun 2020, dari yang sebelumnya sebesar 67.80 menjadi 69.44.

Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi dalam sistem pemerintahan daerah dapat diindikasikan dengan meningkatnya produksi barang dan jasa yang diukur melalui Produk Domestik Regional Bruto (Laksamana, 2016). Penelitian oleh Laksamana (2016), menunjukkan bahwa PDRB memiliki hubungan negative signifikan terhadap tingkat pengangguran di Kalimantan Barat, dimana semakin berkurangnya PDRB, maka pengangguran akan semakin meningkat. Hal tersebut disebabkan karena sumbangan PDRB tertinggi terletak pada aspek pertanian dan aspek pertanian tidak dapat menyerap banyak tenaga kerja, sehingga walaupun PDRB naik, tidak diikuti oleh penurunan pengangguran di Kalimantan Barat.

Disamping PDRB, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan hal yang mendasar dalam mempengaruhi ketenagakerjaan. Tingginya pertumbuhan penduduk apabila tidak disertai dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, maka tidak mampu menempati lapangan pekerjaan yang tersedia di wilayah tersebut. IPM adalah

salah satu tolok ukur pembangunan suatu wilayah yang berkorelasi negatif terhadap kondisi kemiskinan di wilayah tersebut (Alhudhori, 2017). Penelitian oleh Mahroji dan Nurkhasanah (2019), menunjukkan hasil analisis data panel bahwa variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh signifikan dan negatif pada taraf 5% terhadap tingkat pengangguran. Hal tersebut menjelaskan bahwa semakin tinggi angka IPM pada suatu wilayah, maka akan menurunkan tingkat pengangguran dan sebaliknya apabila rasio IPM rendah, maka akan berdampak pada tingginya tingkat pengangguran di wilayah tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, permasalahan seperti pengangguran dan penyerapan tenaga kerja perlu mendapatkan perhatian yang menyeluruh. Salah satu aspek penting dalam pembangunan ekonomi adalah mampu memberikan kesempatan kepada penduduk untuk berpartisipasi dalam kegiatan perekonomian atau pasar kerja. Dari adanya fenomena tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh dari Angkatan Kerja, PDRB dan IPM secara simultan dan parsial terhadap tingkat pengangguran terbuka di Sulawesi.

KERANGKA TEORITIS

Teori Pengangguran

Menurut Sukirno (2008), pengangguran adalah suatu keadaan dimana seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja ingin memperoleh pekerjaan akan tetapi belum mendapatkannya. Seseorang yang tidak bekerja namun tidak secara aktif mencari pekerjaan tidak tergolong sebagai pengangguran. Faktor utama yang menyebabkan terjadinya pengangguran adalah kurangnya pengeluaran

agregat. Pengusaha memproduksi barang dan jasa dengan maksud memperoleh keuntungan, akan tetapi keuntungan tersebut akan diperoleh apabila pengusaha tersebut dapat menjual barang dan jasa yang mereka produksi. Terdapat beberapa teori yang menjelaskan tentang teori-teori pengangguran di Indonesia yaitu:

Teori Klasik

Menurut Gilarso (2004), Teori Klasik yang menjelaskan pandangan bahwa pengangguran dapat dicegah melalui sisi penawaran dan mekanisme harga di pasar bebas supaya menjamin terciptanya permintaan yang akan menyerap semua penawaran. Menurut pandangan klasik, pengangguran terjadi karena mis-alokasi sumber daya yang bersifat sementara karena kemudian dapat diatasi dengan mekanisme harga. Jadi dalam Teori Klasik jika terjadi kelebihan penawaran tenaga kerja maka upah akan turun dan hal tersebut mengakibatkan produksi perusahaan menjadi turun. Sehingga permintaan tenaga akan terus meningkat karena perusahaan mampu melakukan perluasan produksi akibat keuntungan yang diperoleh dari rendahnya biaya tadi. Menurut Tohar (2000), Peningkatan tenaga kerja selanjutnya mampu menyerap kelebihan tenaga kerja yang ada di pasar, apabila harga relatif stabil.

Teori Keynes

Dalam menanggapi masalah pengangguran Teori Keynes mengatakan hal yang berlawanan dengan Teori Klasik, menurut Teori Keynes sesungguhnya masalah pengangguran terjadi akibat permintaan agregat yang rendah. Sehingga terhambatnya pertumbuhan ekonomi bukan disebabkan oleh rendahnya produksi akan tetapi

rendahnya konsumsi. Menurut Keynes, hal ini tidak dapat dilimpahkan ke mekanisme pasar bebas. Ketika tenaga kerja meningkat, upah akan turun hal ini akan merugikan bukan menguntungkan, karena penurunan upah berarti menurunkan daya beli masyarakat terhadap barang-barang. Akhirnya produsen akan mengalami kerugian dan tidak dapat menyerap tenaga kerja.

Keynes menganjurkan adanya campur tangan pemerintah dalam mempertahankan tingkat permintaan agregat agar sektor pariwisata dapat menciptakan lapangan pekerjaan (Hadi, 2005). Perlu dicermati bahwa pemerintah hanya bertugas untuk menjaga tingkat permintaan agregat, sementara penyedia lapangan kerja adalah sektor wisata. Hal ini memiliki tujuan mempertahankan pendapatan masyarakat agar daya beli masyarakat terjaga. Sehingga tidak memperparah resesi serta diharapkan mampu mengatasi pengangguran akibat resesi. Ketika penawaran tenaga kerja mengalami peningkatan maka upah akan turun dan penurunan upah tersebut akan mengakibatkan kerugian bukan menguntungkan karena penurunan upah tersebut menggambarkan daya beli masyarakat terhadap suatu barang. Daya beli masyarakat yang merupakan salah satu indikator dalam IPM yang rendah akan mengakibatkan perusahaan menurunkan jumlah produksinya dan tidak dapat menyerap kelebihan tenaga kerja sehingga permintaan dan penawaran tenaga kerja hampir tidak pernah seimbang dan pengangguran sering terjadi.

Keynes dalam menganalisis masalah-masalah negara terbelakang, mendasarkan teori pada adanya pengangguran siklis yang terjadi selama depresi. Pengangguran ini disebabkan oleh menurunnya permintaan efektif. Pengangguran dapat diatasi dengan menaikkan tingkat per-

mintaan efektif (Sarimuda R & Soekarnoto, 2014). Sedangkan Jhingan (2003:135) menyatakan bahwa sifat pengangguran yang disebabkan oleh depresi ekonomi pada negara terbelakang dan negara maju adalah berbeda. Dalam perekonomian di negara terbelakang yang sedang depresi, pengangguran yang muncul disebut pengangguran kronis. Pengangguran ini bukan disebabkan oleh kurangnya permintaan efektif tetapi sebagai akibat kurangnya sumber modal. Selain itu, di negara terbelakang juga dapat muncul pengangguran tersembunyi. Masalah pengangguran kronis dan tersembunyi dapat diatasi melalui pembangunan ekonomi.

Hubungan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pengangguran

Salah satu indikator ekonomi yang berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan penduduk termasuk pengangguran adalah pertumbuhan ekonomi yang dapat tercerminkan melalui peningkatan GDP. GDP itu sendiri adalah produk nasional yang diwujudkan oleh faktor-faktor produksi di dalam negeri (milik warga negara dan orang asing) dalam sesuatu negara (Sukirno, 2008). Pertumbuhan ekonomi melalui GDP yang meningkat, diharapkan dapat menyerap tenaga kerja di negara tersebut, karena dengan kenaikan pendapatan nasional melalui GDP kemungkinan dapat meningkatkan kapasitas produksi. Hal ini mengindikasikan bahwa penurunan GDP suatu negara dapat dikaitkan dengan tingginya jumlah pengangguran di suatu negara (Mankiw, 2006).

Sementara dalam konteks suatu wilayah, GDP tersebut dicerminkan dalam tingkat PDRB yang merupakan nilai bersih barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh

berbagai kegiatan ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode. Dalam realitanya, PDRB mempunyai pengaruh terhadap jumlah angkatan kerja yang bekerja dengan asumsi apabila nilai PDRB meningkat, maka jumlah nilai tambah output dalam seluruh unit ekonomi disuatu wilayah akan meningkat. Peningkatan output tersebut akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja (Sarimuda R & Soekarnoto, 2014).

Arthur Okun (1929-1979) membuat konsep output potensial dan menunjukkan hubungan antara output dan pengangguran. Pengangguran biasanya bergerak bersamaan dengan output pada siklus bisnis. Pergerakan bersama dari output dan pengangguran dikenal dengan nama Hukum Okun yang menjelaskan bahwa setiap penurunan 2 persen GDP yang berhubungan dengan GDP potensial, angka pengangguran meningkat sekitar 1 persen. Hukum Okun menjelaskan hubungan yang sangat penting antara pasar output dan pasar tenaga kerja, dimana menggambarkan pergerakan jangka pendek pada GDP riil dan perubahan angka pengangguran. (Samuelson and Nordhaus, 2004). Blanchard (2006:186-187) menjelaskan bahwa jika diasumsikan output dan tingkat pengangguran berubah secara bersama-sama, maka perubahan jumlah pekerja merefleksikan perubahan pada tingkat pengangguran.

Menurut Badan Pusat Statistik (2008), angka PDRB dapat diperoleh melalui tiga pendekatan yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan dan pendekatan pengeluaran yang selanjutnya dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendekatan Produksi

PDRB adalah jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi yang berada di suatu wilayah/provinsi dalam jangka waktu tertentu

(satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi 9 sektor atau lapangan usaha yaitu; Pertanian, Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan, Listrik, Gas dan Air Bersih, Bangunan, Perdagangan, Hotel dan Restoran, Pengangkutan dan Komunikasi, Jasa Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan.

2. Pendekatan Pendapatan

PDRB merupakan balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu wilayah dalam waktu tertentu. Balas jasa faktor produksi adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini PDRB mencakup juga penyusutan neto. Jumlah semua komponen pendapatan per sektor disebut sebagai nilai tambah bruto sektoral. Oleh karena itu PDRB merupakan jumlah dari nilai tambah bruto seluruh sektor.

3. Pendekatan Pengeluaran

PDRB adalah penjumlahan semua komponen permintaan akhir yaitu, 1) Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari untung, 2) Konsumsi pemerintah, 3) Pembentukan modal tetap domestik bruto, 4) Perubahan stok, 5) Ekspor netto.

Hubungan Angkatan Kerja dan Pengangguran

Menurut Subri (2003) menyatakan bahwa Angkatan kerja adalah penduduk berumur 10 tahun keatas yang mampu terlibat dalam proses produksi. Yang digolongkan bekerja yaitu mereka yang sudah aktif dalam kegiatannya menghasilkan barang atau jasa atau mereka yang selama

seminggu sebelum pencacahan melakukan pekerjaan atau bekerja dengan maksud memperoleh penghasilan selama paling tidak 1 jam dalam seminggu yang lalu dan tidak boleh terputus. Sedangkan pencari kerja adalah bagian dari angkatan kerja yang sekarang ini tidak bekerja dan sedang aktif mencari pekerjaan.

Menurut Nanang (2004) Produktivitas tenaga kerja menentukan kondisi permintaan tenaga kerja, apabila produktivitas tenaga kerja itu rendah otomatis akan menurunkan pencapaian target perusahaan. Produktivitas yang rendah akan membuat perusahaan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan para tenaga kerja sehingga akan meningkatkan tingkat pengangguran di suatu wilayah. Menurut Abbas (2010) kompetensi yang dibutuhkan di dunia kerja yang diberikan oleh pendidikan pada dasarnya terkait dengan lima hal yaitu: motif atau penggerak, kecepatan bereaksi, gambaran diri pribadi, informasi seseorang yang diperoleh pada bidang tertentu dan kemampuan melaksanakan tugas secara fisik maupun mental (skill). Tenaga kerja yang berkualitas dan lebih mempunyai kemampuan akan lebih dihargai jika dibandingkan dengan tenaga kerja yang kurang mampu. Tingkat pendidikan yang merupakan salah satu indikator dari IPM berpengaruh terhadap tingkat pengangguran karena jika tenaga kerja berpendidikan rendah akan sulit mendapat pekerjaan sehingga akan berdampak pada bertambahnya tingkat pengangguran.

Hubungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Pengangguran

Dalam rangka pembangunan bangsa dibutuhkan modal manusia yang memenuhi kualifikasi keterampilan,

pengetahuan dan kompetensi pada berbagai bidang keahlian. Maka diperlukan tolak ukur yang digunakan untuk menilai kualitas pembangunan Manusia, hal ini mendasari adanya ukuran yang ditetapkan oleh United Nation Development Programme (1990) dalam teori Indeks Pembangunan Manusia yaitu suatu pendekatan yang digunakan sebagai tolak ukur tinggi rendahnya pembangunan manusia.

Nur Baeti (2013), menyebutkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia digunakan untuk mengukur seberapa besar dampak yang ditimbulkan dari upaya peningkatan kemampuan modal dasar manusia. Pembangunan Manusia merupakan komponen pembangunan melalui pemberdayaan penduduk yang menitikberatkan pada peningkatan dasar manusia. Pembangunan yang dihitung menggunakan ukuran besar kecilnya angka pendidikan, kesehatan dan daya beli. Semakin tinggi angka yang diperoleh maka semakin tercapai tujuan dari pembangunan. Pembangunan merupakan sebuah proses untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik.

Hubungan indeks pembangunan manusia dengan tingkat pengangguran juga dijelaskan oleh Todaro (2000), bahwa pembangunan manusia merupakan tujuan pembangunan itu sendiri. Pembangunan manusia memainkan peranan kunci dalam membentuk kemampuan sebuah negara dalam menyerap teknologi modern untuk mengembangkan kapasitasnya agar tercipta kesempatan kerja untuk mengurangi jumlah pengangguran dan pada akhirnya akan tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa dengan pembangunan manusia yang diukur melalui besarnya nilai IPM akan berdampak pada rendahnya tingkat pengangguran di suatu wilayah.

Pengangguran dalam Prespektif Islam

Khairul Umam (2019), menyebutkan bahwa pengangguran dalam pandangan islam terdapat dalam Q.S At-Taubah: 105 yang mengandung makna bahwa islam mengajarkan kepada kita agar tidak berpangku tangan tanpa ada suatu pekerjaan yang dilakukan. Menurut Alif Nafilah (2016), pengangguran juga terdapat dalam Q.S An-Naba': 11 bahwa islam memperingatkan ummatnya agar tidak menganggur.

Ajaran Islam memerintahkan umatnya untuk bekerja. Dalam Islam bekerja termasuk dalam katagori ibadah, hal ini karena bekerja adalah termasuk salah satu kewajiban agama. Islam tidak menginginkan umatnya hanya melaksanakan ibadah ritual yang merupakan ibadah yang sifatnya hubungan manusia langsung dengan Allah (hablum minallah), tetapi juga menginginkan umatnya memperhatikan urusan kebutuhan duniawinya, termasuk didalamnya pangan, sandang, dan papan.

Tidak bekerja, menjadi pengangguran dan tidak berusaha merupakan hal-hal yang tidak dianjurkan dan wajib untuk dihindari. Islam mengajarkan manusia untuk berusaha dalam segala hal, termasuk mencari ridha Allah melalui rizki duniawi. Dalam bekerja, Islam juga memberikan arahan atau tuntunan, inilah etika bekerja dalam Islam atau etos kerja Islami. Bekerja bagi seorang muslim adalah ibadah, maka seorang muslim yang memiliki etos kerja islami akan melahirkan perbuatan sebagai berikut (Sunardi, 2014):

- 1) Seorang muslim akan bekerja dengan sebaik-baiknya, sebaik ketika menjalankan ibadah yang sifatnya hubungan langsung dengan Allah, seperti shalat, puasa, dll.

- 2) Seorang muslim akan bekerja keras atau rajin, karena dalam keyakinannya bekerja bukan hanya mencari harta semata mata, tapi bekerja adalah perintah Allah yang harus ditunaikan dengan baik.
- 3) Seorang muslim yang memiliki etos kerja islami akan selalu menekankan pentingnya kualitas kerja atau mutu produk.
- 4) Menjaga harga diri serta bekerja sesuai aturan yang ada. Menjaga harga diri bisa berarti tidak melakukan perbuatan yang membawa aib pada diri sendiri, namun sebaliknya, berusaha maksimal mencapai prestasi dan prestise. Pencuri, perampok, koruptor, pemeras, dan semacamnya, tentu termasuk “tidak menjaga harga diri dalam mencari kebutuhan hidup” dan itu dilarang keras oleh Islam

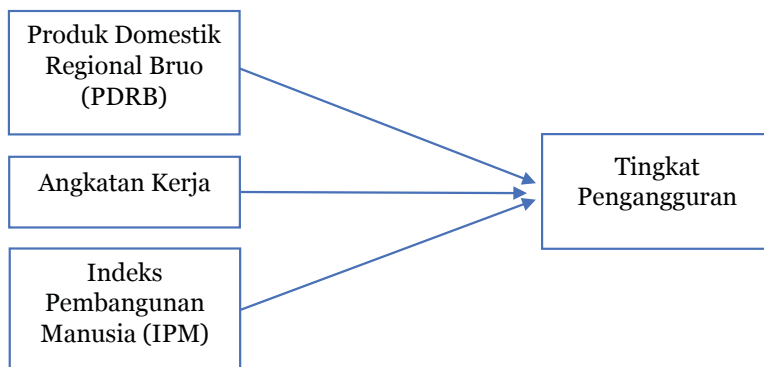
Nurul Huda (2020) menjelaskan bahwa dalam pandangan islam pengangguran yang juga termasuk kemiskinan dapat mempengaruhi sumber daya manusia karena masyarakat yang miskin tidak akan memikirkan pendidikan dan kesehatan tetapi hanya memikirkan kebutuhan sehari-hari. Ketika manusia tidak memikirkan pendidikan, maka dimasa depan taraf hidupnya akan sama seperti sekarang dan akan terus menyebabkan pengangguran meningkat. Hal ini juga akan dapat berpengaruh terhadap tingkat ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas untuk memajukan bangsa dan Negara. Islam mendorong ummatnya untuk bekerja dan memproduksi, seperti yang terdapat dalam Q.S An-Nahl: 97 yang memiliki makna bahwa Allah SWT akan memberi balasan setimpal sesuai dengan amal/kerja maupun usaha yang dilakukannya.

PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Berdasarkan penjelasan teori dan penelitian terdahulu, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

- H_1 : PDRB berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran di Sulawesi.
- H_2 : Angkatan kerja berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran di Sulawesi.
- H_3 : IPM berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran di Sulawesi.

Dapat digambarkan kerangka pemikiran mengenai “PDRB, Angkatan Kerja dan IPM terhadap Tingkat Pengangguran di Sulawesi” sebagai berikut:



METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan explanatory reasearch yang bertujuan untuk menguji suatu teori atau hipotesis guna memperkuat atau bahkan menolak suatu teori atau hipotesis dari hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Jenis data penelitian merupakan

data sekunder yang diperoleh melalui laporan keuangan publikasi, cacatan, buku, jurnal dan lain sebagainya. Adapun variabel-variabel yang diuji dalam penelitian ini meliputi variabel dependen yaitu Pengangguran. Sedangkan variabel independen dari penelitian ini adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Angkatan Kerja, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Penelitian ini berfokus pada kabupaten di Pulau Sulawesi yang terdiri dari 6 provinsi, yaitu Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara dengan total 84 kabupaten. Populasi dalam penelitian ini merupakan seluruh kabupaten di Sulawesi yang terdaftar dan mempublikasikan laporan keuangan dan ketenagakerjaan selama periode penelitian.

Dalam penelitian ini sampel penelitian dipilih dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan sampel berdasarkan kriteria-kriteria tertentu selama periode penelitian yang telah ditentukan. Dengan metode ini sampel yang digunakan dalam penelitian dipilih berdasarkan kriteria sebagai berikut:

1. Provinsi di Sulawesi yang menerbitkan laporan keuangan dan laporan ketenagakerjaan tahunan selama periode pengamatan yaitu tahun 2019.
2. Provinsi di Sulawesi yang menyediakan informasi dan memiliki kelengkapan data berdasarkan variabel yang diteliti selama periode penelitian.

Berdasarkan kriteria pengambilan sampel diatas maka terpilih 52 sampel penelitian, yaitu 24 kabupaten (Sulawesi Selatan), 13 kabupaten (Sulawesi Tengah), dan 15 kabupaten dan kota (Sulawesi Utara).

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Sebelum melakukan analisis regresi linier berganda, dilakukan analisis statistik deskriptif untuk mengetahui nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata, dan standar deviasi pada data, kemudian data diuji terlebih dahulu dengan melakukan uji asumsi klasik untuk memastikan bahwa model regresi yang digunakan tidak terdapat masalah normalitas, multikolinearitas, maupun heteroskedastisitas.

Model analisis regresi linear berganda yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 \text{PDRB} + \beta_2 \text{AK} + \beta_3 \text{IPM} + e$$

di mana:

α = konstanta

$\beta_1 \beta_2 \beta_3$ = koefisien regresi dari $X_1 X_2 X_3$

Y = Tingkat Pengangguran

X_1 = Produk Domestik Regional Bruo (PDRB)

X_2 = Angkatan Kerja (AK)

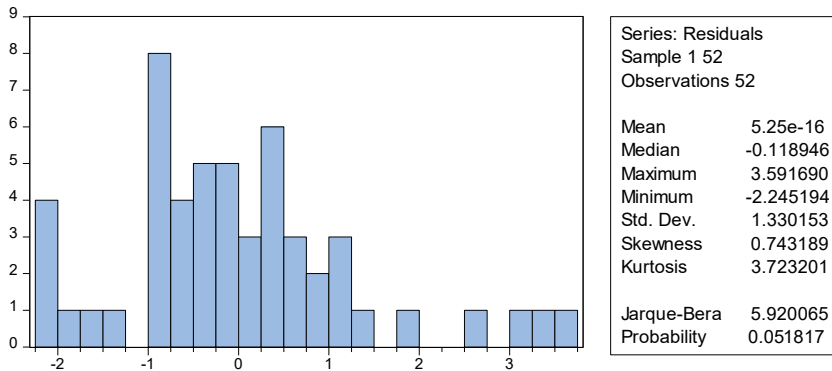
X_3 = Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

e = *error term*

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

1. Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas



Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah variabel independen dan variabel dependen dalam model regresi berdistribusi normal atau tidak. Berdasarkan gambar diatas, dapat diketahui bahwa nilai probability sebesar 0.052 dimana lebih besar dari 0.05, sehingga dapat dinyatakan bahwa data terdistribusi normal.

Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: White

F-statistic	1.739298	Prob. F(3,48)	0.1715
Obs*R-squared	5.098481	Prob. Chi-Square(3)	0.1647
Scaled explained SS	5.915157	Prob. Chi-Square(3)	0.1158

Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2

Method: Least Squares

Date: 05/04/21 Time: 15:33

Sample: 1 52

Included observations: 52

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
----------	-------------	------------	-------------	-------

C	-4.816894	4.965898	-0.969995	0.3369
PDRB^2	-1.47E-16	1.00E-16	-1.466282	0.1491
IPM^2	0.001509	0.000725	2.079761	0.0429
ANGKATANKERJA^2	-0.000179	0.000641	-0.279917	0.7807
R-squared	0.098048	Mean dependent var	1.735281	
Adjusted R-squared	0.041676	S.D. dependent var	2.891520	
S.E. of regression	2.830625	Akaike info criterion	4.992676	
Sum squared resid	384.5971	Schwarz criterion	5.142772	
Log likelihood	-125.8096	Hannan-Quinn criter.	5.050219	
F-statistic	1.739298	Durbin-Watson stat	1.680686	
Prob(F-statistic)	0.171504			

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain dalam model regresi. Berdasarkan hasil uji diatas menunjukkan tingkat probabilitas PDRB dan Angkatan kerja tidak terdapat masalah heteroskedastisitas dengan nilai prob > 0.05. sedangkan variabel IPM terkena heteroskedastisitas dengan nilai prob 0.04.

Uji Multikolonilearitas

Correlation			
	PDRB	IPM	ANGKATAN...
PDRB	1.000000	0.466129	-0.303217
IPM	0.466129	1.000000	-0.292976
ANGKATAN...	-0.303217	-0.292976	1.000000

Berdasarkan hasil uji diatas menunjukkan bahwa tidak terdapat multikolonearitas pada ketiga variable independent.

2. Uji Hipotesis

Dependent Variable: TINGKATPENGANGGURAN

Method: Least Squares

Date: 05/04/21 Time: 14:35

Sample: 1 52

Included observations: 52

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-10.89842	4.882038	-2.232351	0.0303
PDRB	8.61E-09	9.02E-09	0.954480	0.3446
ANGKATANKERJA	-0.107694	0.042049	-2.561179	0.0136
IPM	0.314292	0.051384	6.116486	0.0000
R-squared	0.620120	Mean dependent var		4.230962
Adjusted R-squared	0.596378	S.D. dependent var		2.158134
S.E. of regression	1.371090	Akaike info criterion		3.542892
Sum squared resid	90.23459	Schwarz criterion		3.692988
Log likelihood	-88.11520	Hannan-Quinn criter.		3.600436
F-statistic	26.11860	Durbin-Watson stat		1.095766
Prob(F-statistic)	0.000000			

Berdasarkan uji hipotesis yang telah dilakukan, maka diperoleh hasil:

H_1 : PDRB berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran di Sulawesi.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai signifikansi variabel PDRB sebesar 0,344 dimana memiliki nilai yang lebih besar dari nilai signifikansi yang telah ditetapkan sebesar 0,05. Berdasarkan hasil pengujian ini dapat disimpulkan bahwa PDRB tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengangguran, sehingga hipotesis pertama (H_1) ditolak.

H_2 : Angkatan kerja berpengaruh signifikan dengan hubungan negatif terhadap tingkat pengangguran di Sulawesi.

Hasil pengujian pada tabel diatas menunjukkan bahwa nilai prob angkatan kerja sebesar 0,0136 yang

nilainya lebih kecil dari nilai signifikansi yang telah ditetapkan yaitu 0,05. Berdasarkan hasil uji ini dapat disimpulkan bahwa angkatan kerja berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran di Sulawesi. Hubungan antara angkatan kerja dan tingkat pengangguran adalah negatif, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua yang menyatakan bahwa angkatan kerja memiliki hubungan negatif terhadap tingkat pengangguran (H_2) diterima.

H_3 : IPM berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat pengangguran di Sulawesi.

Hasil pengujian pada tabel diatas menunjukkan bahwa besarnya nilai signifikansi IPM yaitu 0,000 yang lebih kecil dari nilai signifikansi yang telah ditetapkan sebesar 0,05 yang menunjukkan adanya pengaruh antara 2 variabel. IPM dan pengangguran menunjukkan hubungan yang positif, sehingga hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa IPM berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat pengangguran (H_3), ditolak.

PEMBAHASAN

Pengaruh PDRB terhadap tingkat pengangguran di Sulawesi

Hasil uji regresi yang telah dilakukan menunjukkan nilai signifikansi variable PDRB adalah sebesar 0,344 dimana lebih tinggi dari 0.05 yang menjadi nilai standar signifikansi yang digunakan, sehingga dapat disimpulkan bahwa PDRB tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran di Sulawesi pada tahun 2019.

Variable PDRB, sebagai cerminan atas pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah pada realisasinya tidak dapat menunjukkan pengaruh signifikan terhadap tingkat

pengangguran. Tinggi rendahnya angka penerimaan PDRB di Sulawesi pada tahun 2019, tidak menunjukkan hubungan terhadap kesejahteraan penduduk dalam hal pengangguran. Hasil dari penelitian ini berbeda dengan teori dan hasil pada penelitian sebelumnya yang mengatakan bahwa PDRB memiliki hubungan negative terhadap tingkat pengangguran, dimana semakin tingginya nilai capaian PDRB pada suatu daerah dapat mengurangi tingkat pengangguran pada daerah tersebut.

Secara teoritik, setiap peningkatan dalam pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat berkontribusi pada penyerapan tenaga kerja, sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran dan berpotensi mengurangi angka kemiskinan (Laksamana, 2016). Pertumbuhan ekonomi suatu daerah di Indonesia dapat diukur melalui meningkat atau menurunnya PDRB yang dihasilkan di daerah tersebut.

Pergerakan pertumbuhan ekonomi melalui PDRB yang tidak diikuti oleh peningkatan kapasitas produksi dapat menjadi jawaban ketika angka pengangguran tetap meningkat seiring dengan adanya pertumbuhan ekonomi. Laksamana (2016), menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang meningkat cenderung berorientasi pada padat modal, di mana kegiatan produksi untuk memacu output dan menghasilkan pendapatan yang meningkat lebih diutamakan ketimbang pertumbuhan ekonomi yang berorientasi pada padat karya.

Pengaruh Angkatan Kerja Terhadap Tingkat Pengangguran di Sulawesi

Hasil uji regresi pada variable angkatan kerja, menunjukkan terdapat hubungan negatif antara angkatan kerja dengan tingkat pengangguran. Hal ini sesuai dengan

hipotesis yang telah dibangun yaitu, setiap kenaikan jumlah angkatan kerja, akan berpengaruh pada penurunan tingkat pengangguran di Sulawesi pada periode tahun 2019.

Penelitian ini menggunakan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) untuk mengetahui perkembangan angkatan kerja pada suatu daerah. Angkatan kerja berkaitan erat dengan populasi penduduk, Salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah jumlah dan kualitas penduduk dan angkatan kerja. Dari tahun ke tahun pertumbuhan penduduk relatif mengalami peningkatan dan hal tersebut dapat mempengaruhi pertumbuhan angkatan kerja (Anggoro, 2015).

Hal ini sesuai dengan konsep *additional worker hypothesis*, yaitu ketika usia seseorang semakin tua, maka tanggung jawab orang tersebut kepada keluarga semakin besar atau yang disebut sebagai usia produktif. Kelompok usia 25-60 tahun merupakan jengan umur seseorang yang dituntut untuk produktif dengan cara memperoleh pekerjaan (Adriani, 2013), sehingga semakin banyak penduduk berusia produktif dapat meningkatkan angkatan kerja yang akan menurunkan angka pengangguran.

Selain itu, perlambatan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019 sebesar 5,02 persen, menurun dari tahun-tahun sebelumnya, 5,17 persen pada 2018 dan 5,07 persen pada tahun 2017 (Pebrianto, 2020). Trend penurunan pertumbuhan ekonomi tersebut dapat mendorong masyarakat yang awalnya bukan termasuk angkatan kerja untuk berpartisipasi kedalam angkatan kerja, yang kemudian berpengaruh pada menurunnya jumlah pengangguran.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Indikator angkatan kerja dengan TPAK berpengaruh signifikan

negative terhadap pengangguran di DIY periode 2009 hingga 2015 (Khotimah, 2018). Penelitian David et al. (2019) menyimpulkan bahwa Angkatan kerja memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran di Sulawesi Utara. Rayhan dan Yanto (2020), menemukan bahwa terdapat hubungan yang signifikan pada inflasi, pertumbuhan, gaji dan pendidikan terhadap angka pengangguran di 5 negara ASEAN.

Pengaruh IPM terhadap tingkat pengangguran di Sulawesi

Berdasarkan hasil pengujian, menunjukkan bahwa variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel tingkat pengangguran dengan hubungan positif. Hal ini kontradiktif dengan hipotesis yang telah dibangun, yaitu IPM berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran di Sulawesi. Pada realisasinya, setiap kenaikan indeks IPM sebagai tolak ukur kesejahteraan masyarakat, justru akan berpengaruh pada kenaikan tingkat pengangguran di Sulawesi pada periode tahun 2019.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu angka yang mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup yang dapat mempengaruhi tingkat produktivitas yang dihasilkan oleh seseorang (Saputra, 2011). Dalam hal ini produktivitas dapat digambarkan melalui pekerjaan. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak (BPS, 2019).

Semakin tinggi kualitas manusia, maka akan meningkatkan pengetahuan dan keahlian sehingga dapat mendorong peningkatan produktivitas kerjanya. Perusaha-

an akan memperoleh hasil yang lebih banyak dengan memperkerjakan tenaga kerja dengan produktivitas yang tinggi, sehingga dengan penyerapan tenaga kerja yang semakin banyak menyebabkan berkurangnya tingkat pengangguran (Todoro, 2003).

Hasil penelitian ini berbeda dengan teori pada penelitian Mahroji dan Nurkhasanah (2019), Baharom dan Kanapathy (2013), Alhudori (2017), Bahrudin (2015), yang menyatakan terdapat hubungan negatif antara IPM dengan tingkat pengangguran. Terdapat kontradiksi antara teori dengan hasil penelitian lapangan mengenai hubungan IPM dengan pengangguran di Sulawesi pada periode 2019. Rata-rata angka IPM pada kabupaten dan kota di Sulawesi mengalami peningkatan terhitung sejak tahun 2016, di sisi lain angka pengangguran mengalami fluktuasi cenderung meningkat.

Alasan lain yang relevan adalah tingginya pemberian bantuan oleh pemerintah. Tujuan dari pemberian bantuan sosial adalah bentuk keberpihakan untuk mensejahterakan rakyat miskin. Penyaluran bantuan sosial pemerintah hingga april 2019 naik sebesar 17,03 triliun rupiah, yaitu 54 triliun rupiah, lebih tinggi dari periode sebelumnya tahun 2018 sebesar 36,97 triliun rupiah. Angka tersebut mencapai 55,4 persen APBN 2019 (Putra, 2019). Alokasi bantuan sosial tersebut diberikan dalam bentuk bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Program bansos lain berupa program Indonesia pintar, jaminan kesehatan nasional, Bansos rasta dan pangan non tunai, dan simpanan keluarga sejahtera (Kementerian Komunikasi dan Informatika, n.d.). Di sisi lain, besarnya bantuan yang diberikan kepada masyarakat dapat memunculkan distorsi pemikiran bahwa kebutuhan masyarakat dapat tercukupi melalui

bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah, sehingga masyarakat tidak berupaya meningkatkan kebutuhan ekonominya dengan cara bekerja. Lebih lanjut hal ini dapat mempengaruhi kenaikan tingkat pengangguran.

Penelitian dengan hasil serupa dilakukan oleh Nurcholis (2014), dengan hasil yang menyatakan bahwa IPM memiliki hubungan positif terhadap tingkat pengangguran. Hasil penelitian Azmi (2019) menemukan bahwa IPM memiliki hubungan positif terhadap tingkat kemiskinan sebesar 3,8 persen.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa variabel PDRB tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat pengangguran di Sulawesi pada tahun 2019. Sedangkan, angkatan kerja memiliki pengaruh negatif terhadap pengangguran, yang menunjukkan apabila terjadi kenaikan angkatan kerja akan berpengaruh pada penurunan pengangguran. Sebaliknya, hasil pengujian dari IPM menunjukkan hubungan yang berlawanan dengan hipotesis yang dibentuk, dimana IPM dinyatakan berpengaruh positif terhadap tingkat pengangguran di Sulawesi pada tahun 2019.

Adapun saran yang berikan pada penelitian sejenis selanjutnya adalah penambahan variabel yang berkaitan dengan aspek pengangguran dan perluasan daerah serta periode penelitian. Selain itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dan mendalam mengenai hubungan antara pemberian bantuan sosial dengan kesejahteraan masyarakat untuk dapat melihat kemungkinan keterkaitan dengan produktifitas masyarakat, dalam hal ini mencari pekerjaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriani, D. (2013). *Added Worker Dan Discourage Worker*.
- Ahmad, M., Khan, Y. A., Jiang, C., Kazmi, S. J. H., & Abbas, S. Z. (2021). The impact of COVID-19 on unemployment rate: An intelligent based unemployment rate prediction in selected countries of Europe. *International Journal of Finance and Economics*, December 2020, 1–16. <https://doi.org/10.1002/ijfe.2434>
- Alhudhori, M. (2017). Pengaruh IPM, PDRB dan jumlah pengangguran terhadap penduduk miskin di Provinsi Jambi. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 1(1), 113–124.
- Amalia, F. (2013). Pengaruh Pendidikan, Pengangguran dan Inflasi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia (KTI Periode 2001-2010. *Jurnal Ilmiah Econosains*, 10(158–169). <https://doi.org/https://doi.org/10.21009/econosains.0102.02>
- Anggoro, M. H. (2015). Pengaruh pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan angkatan kerja terhadap tingkat pengangguran di kota Surabaya. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, 3(3).
- Azmi, R. (2019). *Pengaruh Jumlah Pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia dan PDRB Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten Labuhanbatu*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Badan Pusat Statistik. (2008). *Produk Domestik Regional Bruto (Lapangan Usaha)*. <https://www.bps.go.id/subject/52/produk-domestik-regional-bruto--lapangan-usaha-.html>

- Badan Pusat Statistik. (2020). Berita Resmi Statistik. In *Bps.Go.Id* (Issue November). <https://jakarta.bps.go.id/pressrelease/2019/11/01/375/tingkat-penghunian-kamar--tpk--hotel--berbintang-dki-jakarta-pada-bulan-september-2019-mencapai-58-97-persen.html>
- Baeti, N. (2013). Pengaruh Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2011. *Economics Development Analysis Journal*, 2(3).
- David, Y. B., Engka, D. S. M., & Sumual, J. I. (2019). Pengaruh Angkatan Kerja Dan Jumlah Penduduk Terhadap Pengangguran Di Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 7(3).
- Davidson, S., Filippi, P. De, & Potts, J. (2016). Economics of Blockchain. *Public Choice Conference 2016, May*, 1–24. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2744751>
- Gilarso, T. (2004). *Pengantar ilmu ekonomi makro*. Kanisius.
- Hadi, S. (2005). *Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi di Indonesia Dalam Setengah Abad Terakhir*. Kanisius.
- Jonaidi, A. (2012). Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Indonesia. *Kajian Ekonomi*, 1(April), 140–164.
- Kanapathy, R., & Baharom, A. H. (2013). A review of unemployment and labor force participation rate: evidence from Sweden, United State and urban China. *INternational Business Management*, 54A, 12754–12758.

- Kementerian Komunikasi dan Informatika. (n.d.). *Program Bantuan Sosial Untuk Rakyat*. Kominfo.Go.Id. Retrieved June 16, 2021, from https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/15708/program-bantuan-sosial-untuk-rakyat/o/artikel_gpr
- Khotimah, K. (2018). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pertumbuhan Ekonomi, Angkatan Kerja, Dan Upah Minimum Terhadap Tingkat Pengangguran Di DIY Tahun 2009-2015. *Jurnal Pendidikan Dan Ekonomi*, 7(6), 599–609.
- Laksamana, R. (2016). Pengaruh PDRB Terhadap Pengangguran Di Kabupaten/Kota Kalimantan Barat. *Jurnal Audit Dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Tanjungpura*, 5(2).
- Mahroji, D., & Nurkhasanah, I. (2019). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Pengangguran di Provinsi Banten. *Jurnal Ekonomi-Qu*, 9(1).
- Mankiw, G. N. (2006). *Pengantar Ekonomi Makro*. Salemba Empat.
- Nurcholis, M. (2014). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Pengangguran di Provinsi Jawa Timur Tahun 2008-2014. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 12(1), 48–57.
- Pebrianto, F. (2020). *BPS: Pertumbuhan Ekonomi 2019 Turun Jadi 5,02 Persen - Bisnis Tempo.co*. Tempo. Co. <https://bisnis.tempo.co/read/1303724/bps-pertumbuhan-ekonomi-2019-turun-jadi-502-persen>
- Putra, D. A. (2019). *Hingga April 2019, Penyaluran Bantuan Sosial Pemerintah Capai Rp54 Triliun*

- | *merdeka.com*. Merdeka.Com. <https://www.merdeka.com/uang/hingga-april-2019-penyaluran-bantuan-sosial-pemerintah-capai-rp-54-triliun.html>
- Rayhan, A. A. M., Rusdarti, R., & Yanto, H. (2020). Factors Influencing Unemployment Rate: A Comparison Among Five Asean Countries. *Journal of Economic Education*, 9(1), 37–45.
- Sarimuda R, T., & Soekarnoto. (2014). Pengaruh PDRBm UMK, Inflasi, dan Investasi Terdap Pengangguran Terbuka di Kab/Kota Provinsi Jawa Timur (Tahun 2007-2011). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2(2), 106–119.
- Sukirno, S. (2008). *Makro Ekonomi Teori Pengantar* (E. Ketiga (ed.)). Raja Grafindo Persada.
- Sunardi, D. (2014). Etos Kerja Islami. *JISI: Jurnal Integrasi Sistem Industri*, 1(1), 82–94. <https://doi.org/10.24853/Jisi.1.1.%25p>
- Todoro, M. (2003). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Erlangga.
- Tohar, M. (2000). *Membuka Usaha Kecil*. Kanisius.
- UMAM, K. (2019). *Analisis Pengaruh Investasi Terhadap Jumlah Pengangguran Di Kota Bandarlampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam Periode 2006-2015 (Studi Pada DPM & PTSP Provinsi Lampung)*. UIN Raden Intan Lampung.
- Vincent, B. (2009). The Concept ‘Poverty’ towards Understanding in the Context of Developing Countries ‘Poverty qua Poverty’: with Some Comparative Evidence on Britain. *Journal of Sustainable Development*, 2(2), 3–13. <https://doi.org/10.5539/jsd.v2n2p3>

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMISKINAN DI PAPUA

Dr. Misnen Ardiansyah

(misnen.ardiansyah@uin-suka.ac.id)

Arif Muallim

(19208012019@student.uin-suka.ac.id)

Tegar Brian Kusuma

(19208012009@student.uin-suka.ac.id)

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan isu sentral bagi setiap Negara di dunia, khususnya bagi Negara berkembang, pengentasan kemiskinan dan menciptakan kesejahteraan bagi rakyat merupakan tujuan akhir satu Negara. Isu-isu mengenai kemiskinan merupakan fokus pembangunan di setiap Negara di dunia. Perhatian terhadap kemiskinan bahkan menjadi isu global yang terungkap secara tegas dalam sasaran-sasaran pembangunan Milenium (*Millenium Development Goals, MDGs*). Sekalipun sudah merupakan komitmen global, upaya penanggulangan kemiskinan bukan merupakan hal yang sederhana, karena kemiskinan bersifat kompleks.

Di Indonesia, kemiskinan merupakan masalah yang sangat krusial, tidak hanya karena tendensinya yang semakin meningkat, namun juga konsekuensinya yang tidak hanya meliputi ruang lingkup ekonomi semata namun juga masalah sosial dan instabilitas politik dalam negeri. Sejarah menunjukkan, sejak Indonesia merdeka konsep trilogy pembangunan dengan menggunakan teori *trickle down effect* dengan memfokuskan pembangunan baik ekonomi dan sosial politik terpusat di Jakarta sebagai ibu kota Negara. Strategi ini diharapkan bisa meneteskan kesejahteraan pembangunan ke daerah-daerah. Namun yang terjadi adalah pertumbuhan ekonomi yang semu dan menghasilkan disparitas yang tinggi antara golongan kaya dan miskin. Hal ini ditunjukkan dengan tingginya angka kemiskinan di daerah Indonesia timur yang masih kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah. Berdasarkan data presentase kemiskinan yang diambil dari Badan Pusat Statistik tahun 2021.

Tabel 1. Presentase Penduduk Miskin di provinsi Indonesia Timur

Provinsi	2018		2019		2020	
	Sem. 1	Sem. 2	Sem. 1	Sem. 2	Sem. 1	Sem. 2
Sulawesi Utara	7.8	7.59	7.66	7.51	7.62	7.78
Sulawesi Tengah	14.01	13.69	13.48	13.18	12.92	13.06
Sulawesi Selatan	9.06	8.87	8.69	8.56	8.72	8.99
Sulawesi Tenggara	11.63	11.32	11.24	11.04	11	11.69
Gorontalo	16.81	15.83	15.52	15.31	15.22	15.59
Sulawesi Barat	11.25	11.22	11.02	10.95	10.87	11.5
Maluku	18.12	17.85	17.69	17.65	17.44	17.99
Maluku Utara	6.64	6.62	6.77	6.91	6.78	6.97

Provinsi	2018		2019		2020	
	Sem. 1	Sem. 2	Sem. 1	Sem. 2	Sem. 1	Sem. 2
Nusa Tenggara Barat	14.75	14.63	14.56	13.88	13.97	14.23
Nusa Tenggara Timur	21.35	21.03	21.09	20.62	20.9	21.21
Papua Barat	23.01	22.66	22.17	21.51	21.37	21.7
Papua	27,74	27,43	27,53	26,55	26,64	26,8

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2021

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan presentase tingkat kemiskinan di provinsi Indonesia timur. Provinsi di Indonesia timur yang memiliki presentase kemiskinan terendah adalah Maluku Utara. Dalam 3 tahun terakhir dapat dilihat ada 3 provinsi yang selalu memiliki presentase kemiskinan paling tinggi, yaitu Nusa Tenggara Timur, Papua Barat dan Papua. Papua selalu menjadi provinsi dengan presentase penduduk miskin paling tinggi dalam 3 tahun terakhir. Hal ini menjadi tanda tanya besar karena masyarakat Papua memiliki sumber daya alam yang melimpah diantaranya hasil perikanan, perkebunan, kehutanan dan lain-lain serta memiliki potensi yang besar untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat namun kenyataannya hal tersebut belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.

Suparlan (2000) mendefinisikan bahwa kemiskinan adalah keadaan serba kekurangan harta dan benda berharga yang di derita oleh seseorang atau sekelompok orang yang hidup dalam lingkaran serba miskin atau kekurangan modal, baik dalam pengertian uang, pengetahuan, kekuatan sosial, politik, hukum, maupun akses terhadap fasilitas pelayanan umum, kesempatan berusaha dan bekerja. Lebih jauh, kemiskinan juga suatu kondisi dimana

orang atau kelompok orang tidak mempunyai kemampuan, kebebasan, asset dan aksesibilitas untuk kebutuhan mereka di waktu yang akan datang, serta sangat rentan (*vulnerable*) terhadap resiko dan tekanan yang disebabkan oleh penyakit dan peningkatan secara tiba-tiba atas harga-harga bahan makanan dan uang sekolah (UNCHS, 1996; Pratama, 2014)

Kartasasmita dalam Sangadji (2014) mengatakan kemiskinan juga di pandang dari rendahnya derajat kesehatan karena akan menentukan gizi seseorang dengan demikian jika miskin maka gizi juga rendah menyebabkan rendahnya ketahanan fisik, daya pikir dan prakarsa yang akan mempengaruhi produktivitas dan pendapatan. Derajat kesehatan dapat di ukur dengan melihat angka harapan hidup dalam suatu wilayah tersebut. Tingkat pendapatan yang rendah akan mengurangi kesempatan masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang memadai dan tinggi dikarenakan masih mahalnya biaya pendidikan jika di ukur dari rata-rata pendapatan masyarakat. Untuk mengukur kemajuan pendidikan di suatu wilayah di lihat dari rata-rata lama sekolah masyarakat di wilayah tersebut.

Analisis faktor-faktor kemiskinan juga pernah dilakukan oleh Wahyuni dan Damayanti (2014) menyebutkan bahwa Faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan di provinsi papua adalah hubungan antara luas lahan pertanian yang diusahakan, tingkat pendidikan, penggunaan irigasi teknis, sumber air minum, tenaga medis, dan penggunaan listrik. Hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Wiguna (2012) dan Mahsunah (2013).

Penelitian lain yang dilakukan oleh Pratama (2014) menggunakan variabel pendapatan, pendidikan, inflasi, konsumsi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk mengukur kemiskinan di Indonesia. Hasil penelitian ini

menunjukkan bahwa tingkat pendapatan perkapita, pendidikan dan inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan sedangkan konsumsi dan IPM memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan. Hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Purba dan Soleman (2021).

Dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa terdapat banyak variabel yang digunakan untuk mengukur kemiskinan, dan juga terdapat hasil yang berbeda-beda disetiap wilayahnya. Sehingga penelitian ini menarik untuk dikaji lebih jauh dalam rangka memberikan gambaran mengenai fenomena kemiskinan yang terjadi di Papua. Adapun faktor-faktor yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendidikan, pendapatan, dan kesehatan.

KERANGKA TEORITIS

1. Kemiskinan

World Bank mengidentifikasikan penyebab kemiskinan dari perspektif akses dari individu terhadap sejumlah aset yang penting dalam menunjang kehidupan, yakni aset dasar kehidupan (misalnya kesehatan dan ke-trampilan/pengetahuan), aset alam (misalnya tanah pertanian atau lahan olahan), aset fisik (misalnya modal, sarana produksi dan infrastruktur), aset keuangan (misalnya kredit bank dan pinjaman lainnya), dan aset sosial (misalnya jaminan sosial dan hak-hak politik). Ketiadaan akses dari satu atau lebih dari asset-aset di atas merupakan penyebab seseorang masuk ke dalam kemiskinan. Menurut Todaro dan Smith (2006), kemiskinan yang terjadi di Negara-negara berkembang akibat dari interaksi antara 6 karakteristik berikut:

- a. Tingkat pendapatan nasional negara-negara berkembang terbilang rendah, dan laju pertumbuhan ekonominya tergolong lambat.
- b. Pendapatan perkapita negara-negara berkembang juga masih rendah dan pertumbuhannya sangat lambat, bahkan ada beberapa yang mengalami stagnasi.
- c. Distribusi pendapatan sangat timpang atau sangat tidak merata.
- d. Mayoritas penduduk di negara-negara berkembang harus hidup di bawah tekanan kemiskinan absolut.
- e. Fasilitas dan pelayanan kesehatan buruk dan sangat terbatas, kekurangan gizi dan banyaknya wabah penyakit sehingga tingkat kematian bayi di negara-negara berkembang sepuluh kali lebih tinggi dibandingkan dengan yang ada di negara maju.
- f. Fasilitas pendidikan di kebanyakan negara-negara berkembang maupun isi kurikulumnya relatif masih kurang relevan maupun kurang memadai.

Menurut Samuelson dan Nordhaus (1997), penyebab dan terjadinya penduduk miskin di negara yang berpenghasilan rendah adalah karena dua hal pokok, yaitu rendahnya tingkat kesehatan dan gizi, dan lambatnya perbaikan mutu pendidikan. Oleh karena itu, upaya yang harus dilakukan pemerintah adalah melakukan pemberantasan penyakit, perbaikan kesehatan dan gizi, perbaikan mutu pendidikan, pemberantasan buta huruf, dan peningkatan keterampilan penduduknya. Kelima hal itu adalah upaya untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia.

2. Kemiskinan dalam Islam

Islam melalui kitab suci Al-Qur'an menggunakan beberapa kata dalam menggambarkan kemiskinan, yaitu *faqiir*, *miskiin*, *al-sa'iil*, dan *al-mahruum* (Iqbal, 2017). Tetapi kata fakir dan miskin yang paling banyak disebutkan dalam Al-Qur'an. Menurut Ridwan (2011) kata *faqiir* dan *miskiin* disebutkan dalam Al-Qur'an berjumlah 36 ayat, kata *faqiir* dijumpai sebanyak 12 kali dan kata *miskiin* disebut sebanyak 25 kali. Pendapat berbeda dijelaskan oleh Iqbal (2017) yang menyebutkan bahwa kata *miskiin* dalam konteks kemiskinan hanya disebut pada 24 ayat, karena pada ayat 72 surat At-Taubah kata *masaakin* merupakan kata yang bermakna tempat bukan merupakan jamak dari kata *miskiin*, pada ayat tersebut konteksnya adalah janji allah kepada orang-orang yang beriman bahwa mereka akan mendapatkan surge dan tempat yang baik di dalamnya. Dan ada tambahan pada kata *faqiir* menjadi 13 ayat yaitu pada surat An-Nur ayat 32.

Lafadz *faqiir* berasal dari kata *faqura-yafquru-faqarah* yang maknanya lawan dari kaya. Dan secara istilah *al-fuqara*, mufrad kata *faqiir*, menunjukkan kepada seseorang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai usaha tetap untuk mencukupi kebutuhannya, seolah-olah ia adalah orang yang sangat menderita karena kefakiran hidupnya (Qurtubi, 2008). Lafadz *miskiin* merupakan *isim masdar* yang berasal dari *sakana-yaskunu-sukun/miskiin* yang memiliki arti diam, tetap atau reda. Jika dilihat dari makna diam, maka secara istilah *miskiin* yaitu orang yang tidak dapat memperoleh sesuatu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan diamnya itulah yang menyebabkan kemiskinan (Ilmi, 2017).

Iqbal (2017) menyatakan bahwa fakir dan miskin mempunyai persamaan dan perbedaan. Persamaannya keduanya sama-sama sebagai pihak yang memerlukan bantuan untuk mengentaskan diri dari kepapaan. Perbedaannya adalah orang fakir memiliki potensi untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, sedangkan orang miskin tidak memiliki potensi tersebut, atau jika memiliki, potensinya sangat rendah, sehingga tidak memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, hal ini sejalan dengan pendapat dari Ibrahim (2007) dan Qardhawi (2009). Korayem dan Mashhour (2014) menambahkan golongan *gharim* dan *ibn sabil* ke dalam golongan yang membutuhkan bantuan secara temporer untuk dapat lepas dari kepapaan.

Guner (2005) membedakan kemiskinan dalam Al-Qur'an menjadi dua yaitu kemiskinan spiritual dan kemiskinan material. Kemiskinan spiritual sebagaimana dijelaskan pada surat Fatir 35:15, Muhammad 47:38, dan Al-hasr 59:8 yang menunjukkan kebutuhan manusia yang fakir akan karunia dari Allah. Sedangkan pada selain ayat tersebut Al-Qur'an lebih banyak menunjukkan kemiskinan material. Sejalan dengan hal tersebut, Ridwan (2011) menyebutkan bahwa kemiskinan dalam islam mencakup ranah mental/psikis sebagaimana keadaan miskin yang kebanyakan malah membuat orang-orang miskin menikmati bantuan dari orang lain, bukan malah membuat mereka bangkit dan berubah untuk menjadi orang yang membantu daripada orang yang menerima bantuan.

Korayem dan Mashhour (2014) menjelaskan lebih jauh lagi mengenai kebutuhan hidup manusia di dunia dan hubungannya dengan kemiskinan. Mereka menyatakan bahwa dalam mengestimasi kemiskinan ilmu ekonomi sekuler (konvensional) dan ilmu ekonomi Islam berbeda,

meskipun menurut Rasool et al. (2012) hampir mirip. Kemiskinan dalam ekonomi konvensional diestimasi dengan melihat siapa yang hidupnya berada di bawah garis kemiskinan, sedangkan kemiskinan dalam ekonomi Islam diestimasi dengan tingkat kecukupan (*sufficiency level*), dan barang siapa yang hidup di bawah tingkat kecukupan itu tergolong miskin. Hasan (2010) menjelaskan bahwa tingkat kecukupan di sini dapat dilihat dari terpenuhinya tujuan-tujuan syariah (*maqashid al-syariah*), yaitu terlindunginya agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Kemiskinan maupun kekayaan pada dasarnya merupakan ujian bagi seorang muslim di dunia. Miskin dan kaya bukan ukuran seorang hina atau mulia. Kemiskinan dan kekayaan keduanya sama-sama merupakan ujian dan cobaan bagi seorang hamba. Orang yang miskin diuji dengan kafakirannya, apakah ia dapat bersabar atau tidak. Sementara orang kaya diuji dengan kekayaannya, apakah ia dapat bersyukur ataukah kufur terhadap nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT.

3. Pendapatan

Pratama (2014) tingkat pendapatan secara riil akan menurun manakala terjadi inflasi dan akibatnya adalah penurunan tingkat konsumsi secara agregat yang pada akhirnya akan menambah tingkat kemiskinan. Tingkat pendapatan yang rendah akan mengurangi kesempatan masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang memadai dan tinggi dikarenakan masih mahal biaya pendidikan di Indonesia jika diukur dari rata-rata penghasilan masyarakat Indonesia. Sukirno (2006) menjelaskan bahwa untuk menghitung besar-kecilnya pendapatan dapat dilakukan dengan tiga pendekatan, yaitu:

- a. Pendekatan produksi (*Production approach*) yaitu menghitung semua nilai produksi barang dan jasa akhir yang dapat dihasilkan dalam periode tertentu.
- b. Pendekatan pendapatan (*Income approach*) yaitu dengan menghitung nilai keseluruhan balas jasa yang dapat diterima oleh pemilik faktor produksi dalam suatu periode tertentu.
- c. Pendekatan pengeluaran (*Expenditure approach*) yaitu pendapatan yang diperoleh dengan menghitung pengeluaran konsumsi masyarakat.

Pratama (2014) mengatakan bahwa pendapatan berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fadillah, Sukiman dan Dewi (2016) dan penelitian Arif dan Fadillah (2019). Jadi secara teori semakin tinggi pendapatan penduduk suatu daerah maka kemiskinan di daerah tersebut semakin berkurang, dengan ketentuan bahwa adanya pemerataan pendapatan sehingga tidak terjadi ketimpangan pendapatan yang dapat mengakibatkan orang kaya menjadi semakin kaya dan orang miskin menjadi semakin miskin.

H1 = Pendapatan berpengaruh negatif terhadap kemiskinan

4. Pendidikan

Teori pertumbuhan baru menekankan pentingnya peranan pemerintah terutama dalam meningkatkan pembangunan modal manusia (*human capital*) dan mendorong penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan produktivitas manusia. Kenyataannya dapat dilihat dengan melakukan investasi pendidikan akan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang diperlihatkan dengan

meningkatnya pengetahuan dan keterampilan seseorang. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka pengetahuan dan keahlian juga akan meningkat sehingga akan mendorong peningkatan produktivitas kerjanya. Rendahnya produktivitas kaum miskin dapat disebabkan oleh rendahnya akses mereka untuk memperoleh pendidikan (Sitepu, Sinaga dan Oktaviani, 2009).

Pendidikan yang rendah akan mengakibatkan tidak adanya skill dan kompensasi masyarakat untuk bisa lebih berdaya, yang mengakibatkan rendahnya produktivitas dari masyarakat tersebut dan pada akhirnya menghasilkan pendapatan yang minim, hal ini akan mengakibatkan terjadinya lingkaran kemiskinan (Pratama, 2014). Penelitian ini sejalan dengan Ikhsan (1999). Permana (2012) mengatakan bahwa pendidikan berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Jadi, secara umum semakin tinggi pendidikan anggota keluarga maka akan semakin tinggi kemungkinan keluarga tersebut bekerja di sektor formal dengan pendapatan yang lebih tinggi.

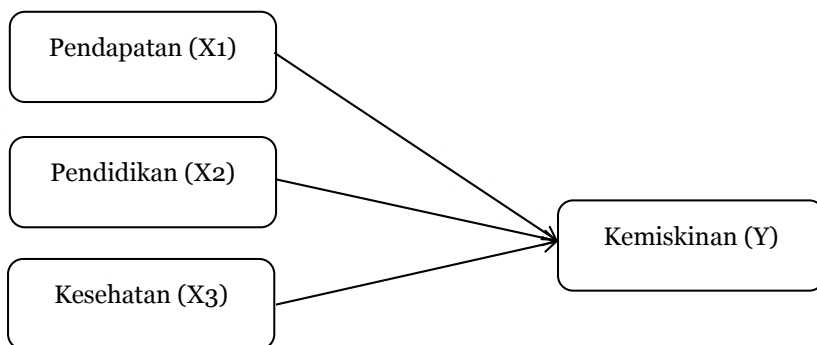
H2 = Pendidikan berpengaruh negatif terhadap kemiskinan

5. Kesehatan

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Dalam membandingkan tingkat kesejahteraan antar kelompok masyarakat sangatlah penting untuk melihat angka harapan hidup. Di negara-negara yang tingkat kesehatannya lebih baik, setiap individu memiliki rata-rata hidup lebih lama, dengan demikian secara ekonomis mempunyai peluang

untuk memperoleh pendapatan lebih tinggi. Selanjutnya, Lincoln (1999) menjelaskan intervensi untuk memperbaiki kesehatan dari pemerintah juga merupakan suatu alat kebijakan penting untuk mengurangi kemiskinan. Salah satu faktor yang mendasari kebijakan ini adalah perbaikan kesehatan akan meningkatkan produktivitas golongan miskin. Permana (2012) mengatakan bahwa kesehatan berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Jadi, secara umum kesehatan yang lebih baik akan meningkatkan daya kerja, mengurangi hari tidak bekerja dan menaikkan output energi, sehingga akan mendapatkan penghasilan yang lebih baik.

H3 = Kesehatan berpengaruh negatif terhadap kemiskinan



METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode penelitian deskriptif kuantitatif. Metode deskriptif pada penelitian ini digunakan untuk menggambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Papua. Metode kuantitatif digunakan untuk menguji hipotesis-hipotesis yang telah ditetapkan. Metode yang digunakan yaitu metode kuantitatif dengan analisis data panel. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data

gabungan antara data *cross section* dan *time series*, data *cross section* yaitu data 29 kabupaten di provinsi Papua dan *data time series* tahun 2017-2019. Data yang digunakan bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) provinsi Papua, jurnal, buku serta sumber-sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu kemiskinan dan variabel independen dalam penelitian ini yaitu pendapatan, pendidikan dan kesehatan.

Analisis regresi data panel merupakan analisis yang mengkombinasikan data *time series* dan *cross section*. Model persamaannya adalah sebagai berikut:

$$TK_{it} = \beta_0 + \beta_1 \log P_{it} + \beta_2 \log Ks_{it} + \beta_3 \log Pd_{it} + e_{it}$$

Keterangan:

TK = Tingkat kemiskinan (variabel terikat)

β_0 = Konstanta

P = Pendapatan (variabel bebas 1)

Ks = Kesehatan (variabel bebas 2)

Pd = Pendidikan (variabel bebas 3)

e = parameter pengganggu (*term of error*)

Metode estimasi akan dilakukan dengan menggunakan pendekatan *common effect*, *random effect* dan *fixed effect* tergantung pada model mana yang terbaik. Untuk menentukan model regresi terbaik maka terdapat tiga pengujian, yaitu sebagai berikut:

1. Uji F Statistik

Uji F Statistik digunakan untuk memilih model terbaik antara *Common Effect* dan *Fixed Effect*. Uji F statistik disini menggunakan Uji Chow. Uji ini dilakukan untuk menguji apakah ada perbedaan antar perusahaan. Perbedaan antar perusahaan ditunjukkan oleh variabel dummy. Sehingga dalam uji ini kita menguji secara

bersama-sama variabel dummy tersebut.

2. Uji Hausman

Uji Hausman digunakan untuk memilih model terbaik antara *fixed effect* (OLS) dan *random effect* (GLS). Uji hausman ini mengikuti distribusi *chi-square* dengan *degree of freedom* sebanyak k , dimana k adalah jumlah variabel independen.

3. Uji Lagrange Multiplier (LM)

Uji *Lagrange Multiplier* dari Breusch-Pagan digunakan untuk memilih model terbaik antara *common effect* dan *random effect*. Uji LM ini didasarkan pada distribusi *chi-square* dengan *degree of freedom* sebesar jumlah variabel independen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan tampilan atau gambaran data yang terdiri dari nilai rata-rata (mean), minimum, maksimum dan standar deviasi dari setiap variabel penelitian. Hasil analisis tabel deskriptif ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 2. Hasil Analisis Deskriptif

	TINGKAT KEMISKINAN	PENDAPATAN	PENDIDIKAN	KESEHATAN
Mean	29.27230	48.35276	5.884023	64.71207
Median	30.60000	26.85000	5.170000	65.51000
Maximum	43.65000	395.9900	11.55000	72.27000
Minimum	10.35000	8.660000	0.710000	54.60000
Std. Dev.	9.869899	61.77334	3.006136	3.843255
Observations	87	87	87	87

Sumber: Olah data Eviews, 2021

Berdasarkan data diatas hasilnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Variabel tingkat kemiskinan memiliki nilai rata-rata sebesar 29,27 dengan standar deviasi sebesar 9,86. Adapun nilai tingkat kemiskinan tertinggi sebesar 43,65 dan nilai minimumnya sebesar 10,35.
- b. Variabel pendapatan memiliki nilai rata-rata sebesar 48,35 dengan standar deviasi sebesar 61,77. Adapun nilai pendapatan tertinggi adalah sebesar 395,99 dan nilai minimumnya sebesar 8,66.
- c. Variabel pendidikan memiliki nilai rata-rata sebesar 5,88 dengan standar deviasi sebesar 3,00. Adapun nilai pendidikan tertinggi sebesar 11,55 dan nilai minimumnya sebesar 0,71.
- d. Variabel kesehatan memiliki nilai rata-rata sebesar 64,71 dengan standar deviasi sebesar 3,84. Adapun nilai kesehatan tertinggi adalah sebesar 72,27 dan nilai minimumnya adalah sebesar 54,60.

2. Analisis Model Regresi Panel

a. Uji F atau Uji Chow

Uji ini digunakan untuk menentukan model terbaik antara model *fixed effect* dan *common effect*. Hipotesis dalam uji chow adalah sebagai berikut:

H_0 : Menggunakan *Common Effect*

H_a : Menggunakan *Fixed Effect*

Ketentuan yang digunakan adalah jika F-hitung $>$ F-kritis atau nilai prob $< \alpha$ maka menolak H_0 artinya menggunakan model *fixed effect* dan sebaliknya jika F-hitung $<$ F-kritis atau nilai prob $> \alpha$ maka gagal menolak H_0 berarti menggunakan model *common effect*. Berdasarkan

hasil uji sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Uji Chow/F

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: FEM

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	1018.374481	(28,55)	0.0000
Cross-section Chi-square	543.990233	28	0.0000

Sumber: Olah data Eviews, 2021

Berdasarkan hasil uji, didapatkan nilai prob sebesar $0,00 < 0,05$ artinya menolak H_0 atau menggunakan model *fixed effect*.

b. Uji Hausman

Uji ini digunakan untuk menentukan model terbaik antara model *fixed effect* dan *random effect*. Hipotesis dalam uji Hausman adalah sebagai berikut:

H_0 : Menggunakan model *Random Effect*

H_a : Menggunakan model *Fixed Effect*

Jika nilai $\text{prob} < \alpha$ maka menolak H_0 berarti menggunakan model *fixed effect* dan sebaliknya jika nilai $\text{prob} > \alpha$ maka gagal menolak H_0 berarti menggunakan model *random effect*. Hasil uji Hausman adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: REM

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	40.729901	3	0.0000

Sumber: Olah Data Eviews, 2021

Berdasarkan hasil uji Hausman nilai prob sebesar $0,00 < 0,05$ maka menolak H_0 berarti menggunakan model *fixed effect*. Dengan hasil ini tidak perlu lagi melakukan uji *Lagrange Multiplier* (LM) karena dari dua uji sebelumnya menghasilkan model *fixed effect*. Jadi dalam mengestimasi data panel penelitian ini yang terbaik adalah menggunakan model *fixed effect*.

3. Model Regresi Data Panel

Berdasarkan hasil uji pemilihan model terbaik maka model *fixed effect* yang digunakan. Maka model persamaan regresi adalah sebagai berikut:

$$TK_{it} = \beta_0 + \beta_1 \log P_{it} + \beta_2 \log Ks_{it} + \beta_3 \log Pd_{it} + e_{it}$$

$$TK_{it} = 130,71 + 0,46 P_{it} + 2,85 Ks_{it} - 25,82 Pd_{it} + e_{it}$$

Tabel 5. Hasil Estimasi Data Panel

Dependent Variable: TINGKAT_KEMISKINAN

Method: Panel Least Squares

Date: 05/26/21 Time: 02:45

Sample: 2017 2019

Periods included: 3

Cross-sections included: 29

Total panel (balanced) observations: 87

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	130.7119	64.22945	2.035078	0.0467
LOG(PENDAPATAN)	0.461575	0.765321	0.603112	0.5489
LOG(PENDIDIKAN)	2.855367	1.446407	1.974110	0.0534
LOG(KESEHATAN)	-25.82184	16.00580	-1.613280	0.1124

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.999248	Mean dependent var	29.27230
Adjusted R-squared	0.998824	S.D. dependent var	9.869899

Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Papua

S.E. of regression	0.338497	Akaike info criterion	0.948456
Sum squared resid	6.301926	Schwarz criterion	1.855457
Log likelihood	-9.257853	Hannan-Quinn criter.	1.313678
F-statistic	2356.811	Durbin-Watson stat	2.765794
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Olah data Eviews, 2021

a. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Berdasarkan hasil estimasi regresi panel dengan model *fixed effect* diperoleh nilai *adjusted R-Squared* adalah sebesar 0,9988 atau 99,88%. Hasil ini menunjukkan berapa tingginya kontribusi yang diberikan oleh variabel independen terhadap variabel dependen tetapi terdapat juga kontribusi variabel independen lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

b. Uji F (Simultan)

Berdasarkan hasil estimasi besarnya F-hitung adalah 2356,81 dan besarnya F-kritis adalah 2,48. Hasil ini menunjukkan bahwa $F\text{-hitung} > F\text{-kritis}$ sehingga berada pada daerah Menolak H_0 sehingga model penelitian ini layak digunakan. Dan berdasarkan nilai prob $0,00 < 0,05$ artinya variabel independen dalam penelitian ini secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap variabel dependen.

4. Interpretasi Hasil dan Pembahasan

a. Pengaruh Pendapatan terhadap Tingkat Kemiskinan

Variabel pendapatan memiliki hubungan negatif dengan kemiskinan, hal ini sesuai dengan teori bahwa semakin tinggi pendapatan akan menurunkan kemiskinan, tetapi berdasarkan hasil penelitian ini, nilai prob variabel pendapatan adalah sebesar 0,54 (lebih besar dari α 0,10)

dan nilai t-statistik sebesar 0,60 dan t-kritis dengan tingkat error 10% adalah 1,29 maka garis t-hitung berada pada daerah gagal menolak H_0 sehingga menolak hipotesis awal artinya variabel pendapatan tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Papua. Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Pratama (2014) yang juga menyebutkan bahwa pendapatan tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini dikarenakan variabel pendapatan tidak mempresentasikan secara riil pendapatan di masyarakat dan juga menunjukkan bahwa distribusi pendapatan tidak berjalan secara optimal sehingga terjadinya disparitas pendapatan antara penduduk. Hasil yang berbeda ditunjukkan dari penelitian yang dilakukan oleh Arif dan Fadhilah (2017) dan Ariyati (2019) yang menyebutkan bahwa pendapatan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan dan menemukan kesesuaian yang sejalan dengan teori yang ada bahwa semakin tinggi pendapatan akan menurunkan kemiskinan, dengan ketentuan bahwa adanya pemerataan pendapatan sehingga tidak terjadi ketimpangan pendapatan yang dapat mengakibatkan orang kaya menjadi semakin kaya dan orang miskin menjadi semakin miskin.

b. Pengaruh Pendidikan terhadap Tingkat Kemiskinan

Hasil pengujian untuk variabel pendidikan menunjukkan nilai prob sebesar 0,05 (lebih kecil dari α 0,10) dan nilai t-statistik sebesar 1,97 dan t-kritis dengan tingkat error 10% adalah 1,29 maka garis t-hitung berada pada daerah menolak H_0 . Hal ini berarti variabel pendidikan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Papua. Hasil ini sejalan

dengan penelitian yang dilakukan oleh Agustina, syechalad dan Hamzah (2018) dan Ariyanti (2019) menyebutkan bahwa pendidikan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, dimana tingkat pendidikan belum mampu menurunkan kemiskinan di provinsi Papua. Hal tersebut disebabkan karena mayoritas masyarakat Papua masih bekerja di sektor pertanian, pertambangan, atau buruh kasar lainnya yang tidak ditentukan berdasarkan pendidikan formal maupun kemampuan melek huruf. Faktor lainnya karena kurangnya kemampuan dan keahlian tertentu untuk bersaing dalam mencari pekerjaan yang lebih baik. Jadi tidak cukup berbekal melek huruf mereka dapat terhindar dari kemiskinan, tetapi juga membutuhkan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan. Namun, hasil ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratama (2014) yang mengemukakan bahwa pendidikan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Dan pada penelitian Munawaroh dan Puruwita (2012) mengemukakan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, hal ini dikarenakan melalui pendidikan memiliki peran penting untuk mengurangi kemiskinan dalam jangka panjang karena pendidikan akan memberikan perbaikan produktivitas dan efisiensi secara umum, serta secara langsung melalui pelatihan golongan miskin dengan bekal keterampilan yang dibutuhkan sehingga akan memberikan peluang untuk mendapatkan pekerjaan di sektor formal yang akan memberikan peningkatan pendapatannya.

c. Pengaruh Kesehatan terhadap Tingkat Kemiskinan

Hasil pengujian untuk variabel kesehatan menunjukkan

nilai prob sebesar 0,11 (lebih besar dari α 0,10) dan nilai t-statistik sebesar -1,61 dan t-kritis dengan tingkat error 10% adalah 1,29 maka garis t-hitung berada pada daerah gagal menolak H_0 . Hal ini berarti variabel kesehatan tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Papua. Hasil penelitian ini berbeda yang dikemukakan oleh Sangadji (2014) dan Permana (2012) bahwa kesehatan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini dikarenakan baiknya kesehatan, maka setiap individu memiliki rata-rata hidup yang lebih lama dengan demikian secara ekonomis memiliki peluang untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi dan akan meningkatkan kesejahteraan serta menurunkan tingkat kemiskinan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dipaparkan diatas dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel-variabel independen dalam penelitian ini yaitu pendapatan, pendidikan dan kesehatan menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen yaitu tingkat kemiskinan di provinsi Papua. Namun secara parsial hanya variabel pendidikan yang memberikan pengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan, sedangkan variabel pendapatan dan kesehatan tidak memberikan pengaruh terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Papua.

Adapun saran untuk penelitian selanjutnya adalah penambahan variabel yang berkaitan dengan tingkat kemiskinan seperti pengangguran, pertumbuhan ekonomi daerah dan pengeluaran pemerintah. Selain itu juga bisa dengan memperluas atau mempersempit lokasi penelitian serta menambah waktu yang digunakan untuk pengamatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, E., Syechalad, M. N., & Hamzah, A. (2018). Pengaruh jumlah penduduk, tingkat pengangguran dan tingkat pendidikan terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 4(2), 265-283.
- Arief, M., & Fadhilah, D. (2019). Pengaruh Pendapatan terhadap Kemiskinan dan Pengangguran dengan Inflasi sebagai Pemoderasi di Sumatera Utara. *Jurnal Ilman: Jurnal Ilmu Manajemen*, 5(2).
- Ariyanti, L. D. (2019). Pengaruh Pendidikan, Pengangguran, Dan Pendapatan Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten Madiun. In *SIMBA: Seminar Inovasi Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi* (Vol. 1).
- Badan Pusat Statistik. (2020). Profil Kemiskinan di Provinsi Papua. <https://papua.bps.go.id/pressrelease/2020/07/15/482/profil-kemiskinan-di-privinsi-papua-maret-2020.html>
- Fadillah, N., Sukirman, S., & Dewi, A. S. (2016). Analisis Pengaruh Pendapatan Per Kapita, Tingkat Pengangguran, IPM dan Pertumbuhan Penduduk Terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2009-2013. *Eko-Regional: Jurnal Pembangunan Wilayah*, 11 (1).
- Ibrahim, M. (2007). *Kemiskinan dalam perspektif al-Qur'an*. UIN-Maliki Press.
- Ilmi, S. (2017). Konsep Pengentasan Kemiskinan Perspektif Islam. *Al-Maslahah*, 13(1), 67-84.
- Iqbal, M. (2017). *Konsep Pengentasan Kemiskinan Dalam Ekonomi Islam* (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).

- Korayem, K., & Mashhour, N. (2014). Poverty in Secular and Islamic Economics; Conceptualization and Poverty Alleviation Policy, with Reference to Egypt. *Topics in Middle Eastern and African Economies*, 16(1), 1-16.
- Mahsunah, D. (2013). Analisis pengaruh jumlah penduduk, pendidikan dan pengangguran terhadap kemiskinan di Jawa Timur. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, 1(3).
- Munawaroh, M., & Puruwita, D. (2012). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pendapatan per Kapita dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di DKI Jakarta. *Econosains Jurnal Online Ekonomi dan Pendidikan*, 10(2), 144-157.
- Permana, A. Y., & Arianti, F. (2012). *Analisis Pengaruh PDRB, Pengangguran, Pendidikan, dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2004-2009* (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomika dan Bisnis).
- Pratama, Y. C. (2014). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Indonesia. *Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 4(2).
- Purba, N. S., & Soleman, L. A. (2021, January). Analisis Spasial Mengenai Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kemiskinan Di Provinsi Papua Tahun 2019. In *Prosiding Senantias: Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* (Vol. 1, No. 1, pp. 71-80).
- Ridwan, A. M. (2011). *Geliat ekonomi Islam: Memangkas kemiskinan, mendorong perubahan*. UIN-Maliki Press.
- Sangadji, M. (2014). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Provinsi Maluku. *Media Trend*, 9(2).

- Sitepu, R. K. K., Sinaga, B. M., Oktaviani, R. S. & Tambunan, M., (2009). Dampak Investasi Sumber Daya Manusia Terhadap Distribusi Pendapatan dan Kemiskinan Di Indonesia. *In Forum Pascasarjana Institut Pertanian Bogor* (Vol. 32, No. 2, pp. 117-118).
- Sukirno, S. (2006). *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan*. Kencana: Jakarta.
- Todaro, M. P. (2006). stephen C. Smith. *Economic development*, 10.
- Wahyuni, R. N. T., & Damayanti, A. (2014). Faktor-Faktor yang Menyebabkan Kemiskinan di Provinsi Papua: Analisis Spatial Heterogeneity. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 14(2), 128-144.
- Wiguna, V. I., & Sakti, R. K. (2012). Analisis Pengaruh PDRB, Pendidikan, dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2010. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 1(2).

PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH DALAM SEKTOR KESEHATAN TERHADAP KASUS COVID-19 DI SULAWESI TENGGARA

Dr. Ibnu Muhdir

(ibnu.muhammad@uin-suka.ac.id)

Busman

(19208012013@student.uin-suka.ac.id)

Mohammad Hilmy Muwaffaq Ma'as

(19208012020@student.uin-suka.ac.id)

PENDAHULUAN

Pembangunan daerah dan sumber daya manusia (SDM) menjadi tujuan pemerintah untuk meningkatkan perekonomian dalam mencapai kesejahteraan masyarakat maupun daerah. Kesehatan merupakan hal yang sangat mendasar untuk mendukung peningkatan pembangunan ekonomi dalam suatu negara. Pemerintah berkewajiban untuk memenuhi hak-hak warganya termasuk dalam sektor kesehatan, adanya wabah pandemi *Covid-19* terjadi sekarang ini yang merupakan penyakit mengglobal yang meresahkan negara untuk mengatasinya. Indonesia merupakan salah satu negara yang masuk dalam area yang terkena *Covid-19*, dan Sulawesi Tenggara merupakan

**Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dalam Sektor Kesehatan
terhadap Kasus Covid-19 di Sulawesi Tenggara**

daerah yang ikut berpartisipasi dalam penanganan pandemi ini.

Berdasarkan data Satgas *Covid-19* tahun 2020 di Sulawesi Tenggara menyatakan bahwa angka kematian mencapai 149 orang yang merupakan korban yang positif *Covid-19*, sedangkan konfirmasi positif sebesar 7.970 orang dan yang dinyatakan sembuh sebesar 7.037 orang dan 784 orang yang dinyatakan masih dalam perawatan. Dengan adanya pandemi tersebut menjadi sebuah problem di Sulawesi Tenggara yang belum terpecahkan hingga saat ini. Pemerintah telah berupaya untuk mengatasi problem tersebut salah satunya dengan memberikan sarana kesehatan, dan tenaga medis untuk penanganan kasus *Covid-19*, dalam mengatasi pandemi ini pada sektor ekonomi pemerintah mengalokasikan APBN untuk mengatasi masalah *Covid-19*. Berikut lampiran tabel anggaran pemerintah untuk penanggulangan *Covid-19* Sulawesi Tenggara,

Tabel 1 Pengeluaran Pemerintahan Sulawesi Tenggara untuk penanganan Covid-19

NO	Kabupaten /Kota	Pengeluaran	NO	Kabupaten /Kota	Pengeluaran
1	Buton	54.740.000	10	Buton Utara	9.854.000
2	Muna	186.474.700	11	Kolaka Timur	24.456.181
3	Kolaka	115.882.030	12	Konawe Kepulauan	54.850.000
4	Konawe Selatan	66.585.000	13	Kota Kendari	2.526.369.187
5	Bombana	27.305.000	14	Kota Bau-bau	136.888.150
6	Wakatobi	80.061.000	15	Muna Barat	48.654.000
7	Kolaka Utara	46.765.388	16	Buton Selatan	64.994.000
8	Konawe	80.367.000	17	Buton Tengah	16.121.000
9	Konawe Utara	40.000.000			

Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Berdasarkan tabel diatas menjelaskan pengeluaran terbesar dialokasikan di Kota Kendari senilai 2.526.369.187,

dan pengeluaran terkecil dialokasikan di Kabupaten Buton Utara senilai 9.854.000. Hal ini seharusnya bisa membantu dalam pengadaan alat-alat kesehatan untuk mencegah bertambahnya korban kematian *Covid-19*.

Faktor-faktor yang berperan untuk mengatasi permasalahan *Covid-19* tidak hanya berasal dari faktor kesehatan, tetapi juga berasal dari faktor ekonomi, menurut peneliti faktor ekonomi sangat berperan penting untuk menangani *Covid-19* dalam bentuk anggaran pemerintah, karena dengan adanya anggaran tersebut bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang berkaitan untuk kesehatan seperti pengadaan APD, alat tes, dan yang terbaru untuk pengadaan vaksin. Selaras dengan pendapat diatas menurut Juaningsih et al., (2020) dalam situasi seperti ini negara harus hadir dalam memberikan berbagai bantuan yang dibutuhkan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali, mengingat dampak yang ditimbulkan oleh keganasan virus ini masif dan memberikan efek pelumpuhan pada jalannya roda perekonomian hampir di seluruh sektor.

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas maka tujuan penelitian ini adalah untuk menguji secara statistik apakah pengeluaran pemerintah dalam sektor kesehatan berpengaruh terhadap masyarakat yang terpapar *Covid-19* dan angka kematian korban *Covid-19*. Terkait dengan tujuan penelitian ini, terdapat beberapa manfaat terutama dalam masalah pemanfaatan alokasi pengeluaran pemerintah dalam penanggulangan *Covid-19* terutama daerah pelosok Sulawesi Tenggara. Selain itu harapan penulis dengan adanya artikel ini bisa ikut berpartisipasi dengan pemerintah Sulawesi Tenggara dalam mencegah penyebaran virus *Covid-19*.

KERANGKA TEORI

Pengeluaran Pemerintah

Berdasarkan teori makro yang dikemukakan oleh Musgrave, (1989) dalam ruang lingkup menganalisis ukuran pemerintahan sehingga dapat terlihat dari transaksi anggaran, perusahaan publik dan kebijakan publik. Sejalan dengan teori Musgrave, menurut wagner dalam Mangkoesobroto, (1999) jika pendapatan perkapita meningkat maka secara relative pengeluaran pemerintah akan meningkat. Dalam konteks pengeluaran di bidang kesehatan untuk mencapai kondisi kesehatan yang dibutuhkan suatu sarana kesehatan yang baik (Todaro, 2006). Oleh karena itu, dukungan dari pemerintah dalam masalah anggaran dalam sektor kesehatan merupakan salah tolak ukur yang menggambarkan kualitas kehidupan dari setiap individu

Mills et al., (1999) mendefinisikan ekonomi kesehatan sebagai penerapan teori, konsep dan teknik ilmu ekonomi dalam kesehatan. Ekonomi kesehatan berhubungan dengan alokasi sumber daya dalam pelayanan kesehatan, jumlah sumber daya yang dipergunakan dalam pelayanan kesehatan, pengorganisasian dan pembiayaan dari berbagai pelayanan kesehatan, efisiensi pengalokasian dan penggunaan berbagai sumber daya, dan dampak upaya pencegahan serta pengobatan pemulihan pada individu maupun masyarakat.

Jaminan Kesehatan

Salah satu bentuk ekonomi kesehatan adalah jaminan kesehatan untuk masyarakat kurang mampu, kementerian kesehatan mendefinisikan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikembangkan di Indonesia merupakan bagian

dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Sistem Jaminan Sosial Nasional ini diselenggarakan melalui mekanisme Asuransi Kesehatan Sosial yang bersifat wajib (mandatory) berdasarkan Undang-Undang No.40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional tujuannya adalah agar semua penduduk Indonesia terlindungi dalam sistem asuransi, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak (Kemenkes RI, 2013). Teori ini didukung dengan hasil penelitian Erlangga et al., (2019) utilizing longitudinal data from the Indonesian Family Life Survey. Methods: Two treatment groups were identified: a contributory group (N = 982 Program JKN meningkatkan penggunaan system rawat jalan dan rawat inap bagi kelompok iuran, dan bagi mereka memiliki asuransi bersubsidi hanya memiliki akses ke fasilitas rawat inap, dan jumlahnya lebih kecil.

Sarana Kesehatan

Menurut Ristiani, (2017) suatu instansi pelayanan kesehatan merupakan suatu lembaga pelayanan publik. Masyarakat setiap waktu selalu menuntut pelayanan publik yang berkualitas yang dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat penerima layanan publik. Selaras teori diatas Sarana dan pelayanan kesehatan sebagai proses kerjasama pendayagunaan semua sarana dan prasarana kesehatan secara efektif dan efisien untuk memberikan layanan secara professional dibidang sarana dan prasarana dalam proses pelayanan kesehatan yang efektif dan efisien (Muhammad, 2010).

Berdasarkan teori tersebut sarana kesehatan yang baik adalah sarana kesehatan yang sesuai dengan persyaratan sebagai rujukan perawatan pasien *Covid-19* dan

memiliki tenaga medis yang memadai. Hal ini juga selaras dengan pendapat Sinambela, (2011) yang mendefinisikan kualitas pelayanan kesehatan adalah kegiatan pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik yang mampu memenuhi harapan, keinginan, dan kebutuhan serta mampu memberikan kepuasan kepada masyarakat luas pada umumnya dan pasien pada khususnya. Salah satu problem akhir-akhir ini dalam kinerja tenaga kesehatan, Menurut Feri & Fithriana, (2019) Kinerja tenaga kesehatan sebagai konsekuensi tuntutan masyarakat terhadap kebutuhan akan pelayanan yang bermutu tinggi. Melalui kinerja tenaga kesehatan, diharapkan dapat menunjukkan kontribusi profesionalnya secara nyata dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, yang berdampak pada organisasi tempatnya bekerja, dan dampak akhir bermuara pada kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Pandemi Covid-19

Covid-19 atau virus corona merupakan penyakit yang baru ditemukan secara global dengan beberapa gejala berat dan ringan, dan memberikan dampak masalah pernafasan seperti sesak nafas, batuk disertai demam. Teori ini selaras dengan pendapat dari Junaedi & Salistia, (2020) yang mendefinisikan gejala serta tanda klinis mayoritasnya yakni demam, sulit bernapas, serta perolehan rontgen untuk memperlihatkan infiltrat pneumonia luas di dua paru-paru.

Penyebaran *Covid-19* secara global bermula di Provinsi Wuhan, China dan pada tanggal 2 Maret 2020, penyebarannya sampai di Indonesia, bermula dengan adanya korban pertama seorang ibu berumur 64 tahun serta wanita berumur 31 tahun, berawal dari kontak dengan wisatawan jepang pada tanggal 14 Februari di Jakarta (Detik

News, 2020). Kasus pandemi Corona sampai saat ini terus meningkat, dan pemerintah sudah berusaha melakukan berbagai cara untuk mengurangi penyebarannya dengan mewajibkan setiap masyarakat yang ingin melakukan kegiatan diluar rumah harus memenuhi protokol kesehatan yang ketat.

Kesehatan Dalam Pandangan Islam

Islam merupakan agama yang sempurna, agama yang memiliki pedoman kitab dari Al-quran. Dalam Al-quran tidak hanya membahas terkait manusia dengan tuhan dan manusia dengan manusia, akan tetapi juga membahas mengenai seluruh aspek kehidupan salah satu diantaranya ialah kesehatan, lingkungan, bahkan seluruh alam semesta. Hal ini selaras dengan penelitian Purmansyah Ariadi, (2013) yang menemukan bahwa kesehatan memiliki ketekaitan dengan Islam, salah satu bukti bahwa kesehatan mental atau gangguan kejiwaan dapat disembuhkan dengan pendekatan agama, selain itu penelitian ini juga menemukan bahwa Al-quran yang merupakan kitab agama Islam berfungsi sebagai obat untuk menyembuhkan penyakit rohani maupun fisik.

Kesehatan manusia sekarang ini telah digemparkan secara global dengan terjadinya pandemik *Covid-19* yang merupakan virus yang mematikan. Negara indonesia tak terkecuali Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan salah satu negara yang berpartisipasi dalam pencegahan penyakit tersebut, dengan memberikan kebijakan kepada masyarakat untuk memperhatikan protokol kesehatan dan menjaga kebersihan lingkungan dari virus-virus tersebut dan apabila masyarakat terdampak virus maka harus melaksanakan isolasi. Bentuk kebijakan ini selaras dengan

temuan Ismail Evendy, (2016) bahwa dalam usaha untuk melindungi, memelihara, memanfaatkan lingkungan hidup adalah bentuk ibadah kepada sang pencipta.

Oleh karena itu agama Islam juga mengatur dalam masalah pencegahan wabah penyakit *Covid-19* dalam bentuk memelihara kesehatan jasmani dan rohani secara seimbang, selain memelihara kesehatan jasmani jika dirujuk dari sejarah nabi salah satu bentuk pencegahan wabah penyakit adalah menerapkan karantina atau isolasi mandiri terhadap penderita, dan metode karantina telah diterapkan sejak zaman Rasulullah SAW untuk mencegah wabah penyakit menular ke wilayah lain dalam prakteknya, Rasulullah SAW membangun tembok disekitar daerah wabah untuk mencegah umatnya memasuki daerah wabah Supriatna, (2020). Selaras dengan Eman Supriatna, Mukharom & Aravik, (2020) juga berpendapat Islam juga tidak menghendaki kemudharatan kepada umatnya. Oleh karena itu, setiap kemudharatan wajib hukumnya untuk dihilangkan, sehingga pencegahan terhadap hal-hal yang mendatangkan kemudharatan lebih baik diterapkan. Termasuk mencegah penyebaran virus corona ini harus dilakukan dengan segala upaya termasuk mengambil risiko yang bahayanya lebih sedikit untuk menghindarkan diri dari bahaya yang lebih besar.

Maka dapat disimpulkan cara pandang Islam dalam melihat segala hal yang terjadi di dunia, sudah dipandu di dalam kitab suci Alquran, terdapat pada Surat al-Baqarah [2]: 155-157. “Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepada kamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, (yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka

mengucapkan: “Inna lillahi wa inna ilaihi raji’un”. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk.

Merujuk pada ayat tersebut, dalam konteks sekarang, dengan adanya virus corona merupakan salah satu cobaan yang diberikan oleh Allah SWT dan dalam pandangan Islam peristiwa *Covid-19* merupakan sebuah kejadian pandemi wabah virus menular seperti pada zaman Nabi Muhammad SAW dan memang sangat mirip kasusnya dengan peristiwa di zaman Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Akhirnya kita bisa menyimpulkan pula bahwa dalam pandangan Islam pandemi virus covid-19 ini merupakan suatu ujian dari Allah SWT. Kepada umat manusia, agar manusia bisa mengingat kembali bahwa Allah SWT (Supriatna, 2020).

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Sumber data

Desain penelitian ini adalah asosiatif kausalitas dengan pendekatan kuantitatif yang menggunakan alat uji statistik data panel dinamis, data penelitian diambil dari 17 kabupaten atau kota di Provinsi Sulawesi Tenggara pada periode penelitian tahun 2020. Data yang diambil bersumber dari Badan Pusat Statistik Sulawesi Tenggara dan Kementerian Keuangan, dengan indikator variabel pengeluaran pemerintah untuk *Covid-19*, jumlah sarana kesehatan di Sulawesi Tenggara, jumlah tenaga kesehatan di Sulawesi Tenggara, penduduk yang menggunakan jaminan kesehatan di Sulawesi Tenggara.

Teknik Analisis

Ada beberapa tahap dalam pengujian regresi linier berganda dengan data *cross section*: Uji Asumsi Klasik yang terdiri dari uji autokorelasi, uji heterokedastisitas, uji multikolinearitas dan uji normalitas. Koefisiensi Determinan dan Uji Hipotesis (Uji t dan Uji F). *Software* yang digunakan dalam pengujian statistik ini adalah *Eviews 9*.

Bentuk persamaan data panel yang kami gunakan adalah:

$$\text{COVID}_t = \alpha + \beta_1 \text{EXP}_t + \beta_2 \text{SRK}_t + \beta_3 \text{TKS}_t + \beta_4 \text{JMK}_t + e$$

COVID = Korban Positif *Covid-19*

EXP = Pengeluaran pemerintah

SRK = Sarana Kesehatan

TKS = Tenaga Kesehatan

JMK = Jaminan Kesehatan

HASIL OLAH DATA

Statistik Deskriptif

	KASUS POSITIF COVID-19	PENGELUARAN PEMERINTAH	SARANA KESEHATAN	TENAGA KESEHATAN	JAMINAN KESEHATAN
Mean	464,4118	2.11E+08	6394118	675,6471	61,15941
Median	206,0000	54850000	59,00000	627,0000	62,66000
Maximum	3875,000	2.53E+09	130,0000	2125,000	84,66000
Minimum	34,00000	9854000	20,00000	271,0000	30,09000
Std. Dev.	903,9462	5.98E+08	29,33315	417,9242	15,61188
Skewness	3,421910	3714003	0.488777	2,572447	0
Kurtosis	13,47627	1489183	2,569725	9,747796	2,371797
Jarque-Bera	110,9179	1.392.518	0.808031	51,00190	0.886759
Probability	0	0	0.667634	0	0.641863
Sum	7895,000	3.58E+09	1087,000	11486	1039,710
Sum Sq. Dev.	13073900	5.73E+18	13766.94	2794570	3899,690
Observations	17	17	17	17	17

Uji Asumsi Klasik

Uji Autokorelasi

Dependent Variable: KASUS_POSITIF_COVID_19

Method: Least Squares

Date: 05/04/21 Time: 13:50

Sample (adjusted): 1 17

Included observations: 17 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	289.8934	272.9040	1.062254	0.3090
PENGELUARAN_PEMERINTAH	1.47E-06	9.01E-08	16.30147	0.0000
SARANA_KESEHATAN	0.718199	1.812498	0.396248	0.6989
TENAGA_KESEHATAN	-0.046078	0.128655	-0.358154	0.7264
JAMINAN_KESEHATAN	-2.444691	3.388652	-0.721435	0.4845
R-squared	0.960313	Mean dependent var	464.4118	
Adjusted R-squared	0.947085	S.D. dependent var	903.9462	
S.E. of regression	207.9380	Akaike info criterion	13.75229	
Sum squared resid	518858.5	Schwarz criterion	13.99735	
Log likelihood	-111.8944	Hannan-Quinn criter.	13.77665	
F-statistic	72.59228	Durbin-Watson stat	2.108496	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Berdasarkan hasil uji autokorelasi dengan nilai *durbin watson* sebesar 2.108496 maka dinyatakan tidak terdeteksi autokorelasi. Karena nilai *durbin watson* lebih besar dari pada nilai dl dan du.

Uji Heterokedastisitas

Heteroskedasticity Test: White

F-statistic	2.638590	Prob. F(14,2)	0.3086
Obs*R-squared	16.12687	Prob. Chi-Square(14)	0.3057
Scaled explained SS	10.94173	Prob. Chi-Square(14)	0.6906

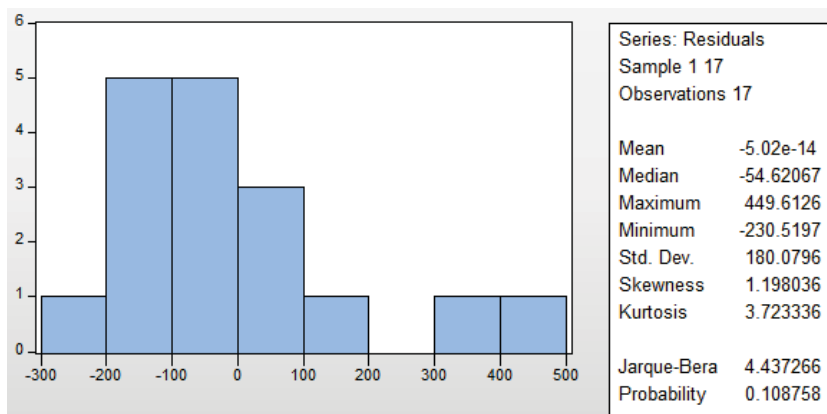
Berdasarkan hasil uji heterokedastisitas dengan nilai *chi-square* sebesar 0.3057 maka dinyatakan tidak ada gejala heteroskedastisitas. Karena nilai *chi-square* 0.3057 > alpha.

Uji Multikolinieritas

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	74476.61	29.28203	NA
PENGELUARAN_P...	8.11E-15	1.216820	1.075328
SARANA_KESEHATAN	3.285149	6.326758	1.045984
TENAGA_KESEHATAN	0.016552	4.040586	1.069791
JAMINAN_KESEHATAN	11.48296	17.92302	1.035658

Berdasarkan hasil uji multikolinieritas dengan nilai *Centered VIF* dari setiap variabel independen kurang dari 10, maka dapat dinyatakan tidak terdapat masalah multikolinieritas.

Uji Normalitas



Berdasarkan hasil uji normalitas dengan nilai *probabilitas* sebesar 0.108758 maka dinyatakan data penelitian ini berdistribusi normal. Karena nilai *probabilitas* sebesar $0.108758 > \alpha$.

Uji Koefisiensi Determinan

R-squared	0.960313
Adjusted R-squared	0.947085

Berdasarkan hasil uji regresi mendapatkan nilai R^2 sebesar 0.960313 atau 96% ini menunjukkan bahwa variabel independen mampu menjelaskan model lebih besar dan sisanya sebesar 4% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak ada dalam model penelitian ini.

Uji Hipotesis

Secara Parsial

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	289.8934	272.9040	1.062254	0.3090
PENGELUARAN__PEMERINTAH	1.47E-06	9.01E-08	16.30147	0.0000
SARANA__KESEHATAN	0.718199	1.812498	0.396248	0.6989
TENAGA__KESEHATAN	-0.046078	0.128655	-0.358154	0.7264
JAMINAN__KESEHATAN	-2.444691	3.388652	-0.721435	0.4845

- Berdasarkan hasil uji statistik pengeluaran pemerintah berpengaruh positif terhadap korban positif *covid-19*, karena nilai *probabilitas* sebesar 0.0000 lebih kecil daripada alpha, maka artinya menolak H1.
- Berdasarkan hasil uji statistik sarana kesehatan berdasarkan nilai *probabilitas* tidak berpengaruh terhadap korban positif *covid-19* karena nilai 0.6989 diatas alpha, maka artinya menolak H2.
- Berdasarkan hasil uji statistik tenaga kesehatan berdasarkan nilai *probabilitas* tidak berpengaruh terhadap korban positif *covid-19* karena nilai 0.7264 diatas alpha, maka artinya menolak H3.
- Berdasarkan hasil uji statistik jaminan kesehatan berdasarkan nilai *probabilitas* tidak berpengaruh terhadap korban positif *covid-19* karena nilai 0.4845 diatas alpha, maka artinya menolak H4.

Secara Simultan

F-statistic	72.59228
Prob(F-statistic)	0.000000

Berdasarkan hasil uji statistik secara simultan pengeluaran pemerintah, sarana kesehatan, tenaga kesehatan, dan jaminan kesehatan berpengaruh terhadap korban positif *covid-19* secara bersama-sama. Karena nilai *probabilitas* sebesar 0.0000 lebih kecil daripada α .

PEMBAHASAN

1. Pengaruh pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap korban positif *covid-19*.

Hipotesis pertama menyatakan pengeluaran pemerintah berpengaruh positif terhadap korban positif *covid-19*. Dengan adanya bantuan dari pengeluaran pemerintah sangat berpengaruh dalam sektor pengadaan alat-alat kesehatan dan obat-obatan sebagai bentuk upaya penekanan laju korban *covid-19*. Berdasarkan hasil pengujian statistik menerima hipotesis pertama yakni Pengeluaran pemerintah berpengaruh positif terhadap korban positif *covid-19*. Hasil pengujian ini tidak sejalan dengan penelitian Akhyar & Sapha, (2018) yang menyatakan pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif terhadap angka kematian bayi.

Berdasarkan data dari kementerian keuangan Pengeluaran Pemerintahan Sulawesi Tenggara untuk penanganan *Covid-19* pengeluaran terbesar dialokasikan di Kota Kendari senilai 2.526.369.187, dan pengeluaran terkecil dialokasikan di Kabupaten Buton Utara senilai 9.854.000.

2. Pengaruh sarana kesehatan berpengaruh terhadap korban positif *covid-19*.

Hipotesis kedua menyatakan sarana kesehatan berpengaruh positif terhadap korban positif *covid-19* artinya dengan adanya peristiwa pandemi *covid-19* pemerintah semakin memperhatikan masalah infrastruktur sarana kesehatan di daerah Sulawesi Tenggara untuk mencegah penyebaran *covid-19*, seperti rumah sakit ditambah, membuat tempat untuk isolasi mandiri bagi pendatang dan memberikan peluang bagi para pelaku ekonomi alat-alat kesehatan. Berdasarkan pengujian statistik menunjukkan hasil berbeda dengan hipotesis dimana sarana kesehatan tidak berpengaruh terhadap korban positif *covid-19* artinya bantuan pemerintah terkait dengan peningkatan fasilitas sarana kesehatan tidak terlalu pengaruh pada penekanan angka korban positif dan kematian *covid-19*. Hasil pengujian ini sejalan dengan (Azies, 2019) yang menyatakan fasilitas kesehatan berpengaruh terhadap angka kematian bayi di Jawa Timur.

Berdasarkan data dari badan pusat statistik sarana kesehatan paling banyak berada di Kabupaten Buton Utara sebanyak 130 unit, dan sarana kesehatan paling sedikit berada di Kabupaten Konawe Kepulauan sebanyak 20 unit.

3. Pengaruh tenaga kesehatan terhadap korban positif *covid-19*.

Hipotesis ketiga menyatakan tenaga kesehatan berpengaruh positif terhadap korban positif *covid-19* artinya melalui kinerja tenaga kesehatan dapat meningkatkan mutu pelayanan kesehatan sebagai upaya mencegah meningkatnya korban jiwa dari pandemi virus *covid-19*. Berdasarkan pengujian statistik menunjukkan hasil

berbeda dengan hipotesis dimana tenaga kesehatan tidak berpengaruh terhadap korban positif *covid-19* artinya dengan adanya peristiwa pandemi *covid-19* jumlah tenaga kesehatan tidak terlalu berpengaruh dalam pencegahan peningkatan angka positif korban *covid-19* karena banyaknya pasien-pasien sehingga sarana kesehatan tidak bisa menampung semuanya dan otomatis tenaga-tenaga kesehatan juga kewalahan dalam menjalankan tugasnya. Hasil ini sejalan dengan penelitian Suhaeri et al., (2020) yang menyatakan tenaga medis tidak berpengaruh terhadap angka kematian bayi di Provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan data dari badan pusat statistik tenaga kesehatan paling banyak berada di Kabupaten Muna Barat sebanyak 2125 orang, dan sarana kesehatan paling sedikit berada di Kabupaten Konawe Kepulauan sebanyak 271 orang.

4. Pengaruh jaminan kesehatan terhadap korban positif *covid-19*.

Hipotesis keempat menyatakan jaminan kesehatan berpengaruh negatif terhadap korban positif *covid-19* artinya dengan adanya peristiwa pandemi *covid-19* para pemilik jasa jaminan kesehatan mengalami kekurangan pemasukan dikarenakan pengguna jaminan kesehatan berkurang dan rumah sakit juga tidak memperbolehkan jaminan kesehatan untuk korban *covid-19*. Berdasarkan pengujian statistik menunjukkan hasil berbeda dengan hipotesis dimana jaminan kesehatan tidak berpengaruh terhadap korban positif *covid-19* artinya program jaminan kesehatan tidak terlalu berpengaruh terhadap upaya pencegahan korban positif *covid-19* karena pasien yang terdeteksi *covid-19* tidak bisa menggunakan jaminan

kesehatan untuk pengobatannya. Hasil ini sejalan dengan penelitian Amborowati & Rizki, (2017) yang menyatakan belum memberikan pengaruh secara langsung terhadap AKI di Indonesia, meski alokasi dana pemerintah terus meningkat tiap tahunnya.

Berdasarkan data dari badan pusat statistik jaminan kesehatan paling banyak berada di Kabupaten Konawe Kepulauan sebanyak 84.66 persen, dan sarana kesehatan paling sedikit berada di Kabupaten Buton Tengah sebanyak 30.09 persen.

5. Pengaruh pengeluaran pemerintah, sarana kesehatan, tenaga kesehatan, dan jaminan kesehatan berpengaruh secara simultan.

Hipotesis kelima menyatakan pengeluaran pemerintah, sarana kesehatan, tenaga kesehatan, dan jaminan kesehatan berpengaruh secara simultan terhadap korban *covid-19* artinya bahwa dengan adanya kebijakan pemerintah pada sektor kesehatan dalam menanggulangi korban *covid-19* menjadi sebuah strategi yang baik untuk mencegah penyebaran dan korban *covid-19* di Sulawesi Tenggara. Berdasarkan hasil pengujian statistik menerima hipotesis kelima yakni pengeluaran pemerintah, sarana kesehatan, tenaga kesehatan, dan jaminan kesehatan berpengaruh secara simultan terhadap korban *covid-19*.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil uji statistik secara parsial bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh positif terhadap korban positif *covid-19*, tetapi sarana kesehatan, tenaga kesehatan, jaminan kesehatan tidak berpengaruh terhadap korban positif *covid-19*. Sedangkan Berdasarkan hasil uji

statistik secara simultan bahwa pengeluaran pemerintah, sarana kesehatan, tenaga kesehatan, dan jaminan kesehatan secara bersama-sama mempengaruhi korban positif covid-19.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhyar, Q., & Sapha, D. (2018). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan dan Tenaga Kesehatan Terhadap Derajat Kesehatan Masyarakat Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM)*, 3(4), 776–784.
- Amborowati, S., & Rizki, C. Z. (2017). Pengaruh Jaminan Kesehatan Nasional (Milik Pemerintah) Terhadap Angka Kematian Ibu Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (Jim)*, 2(4), 526–534.
- Azies, H. Al. (2019). Analisis Pengaruh Fasilitas Kesehatan terhadap Kematian Bayi di Jawa Timur Menggunakan Pendekatan Geographically Weighted Regression. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan*, 3(2), 131–141. <https://doi.org/10.22435/jpppk.v3i2.2431>
- Erlangga, D., Ali, S., & Bloor, K. (2019). The impact of public health insurance on healthcare utilisation in Indonesia: evidence from panel data. *International Journal of Public Health*, 64(4), 603–613. <https://doi.org/10.1007/s00038-019-01215-2>
- Feri, N., & Fithriana, N. (2019). Pengaruh Kinerja Tenaga Kesehatan Terhadap Kepuasan Masyarakat (Studi Pada Puskesmas Kendalsari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang). *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 8(2), 152–159. www.publikasi.unitri.ac.id

- Juaningsih, I. N., Consuello, Y., Tarmidzi, A., & NurIrfan, D. (2020). Optimalisasi Kebijakan Pemerintah dalam penanganan Covid-19 terhadap Masyarakat Indonesia. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 7(6), 509–518. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i6.15363>
- Kemenkes RI. (2013). *Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan*. Jakarta : Kementerian Kesehatan RI.
- Mangkoesoebroto, G. (1999). *Teori ekonomi makro*. Yogkarta: STIE YKPN.
- Mills, Anne, & Lucy Gilson. (1999). *Ekonomi Kesehatan untuk Negara-Negara Berkembang*. Jakarta: Biro Perencanaan Depkes RI.
- Muhammad, A. (2010). Kesehatan Wanita, Gender dan Permasalahannya. In *Nuha Medika : Yogyakarta*. Nuha Medika.
- Mukharom, M., & Aravik, H. (2020). Kebijakan Nabi Muhammad Saw Menangani Wabah Penyakit Menular dan Implementasinya dalam Konteks Penanggulangan Coronavirus Covid-19. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 7(3). <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i3.15096>
- Musgrave, R. A., & Musgrave, P. (1989). *Public Finance : In Theory and Practice*. McGraw Hill Kogakusha, LTD Tokyo.
- Ristiani, I. Y. (2017). Pengaruh Sarana Prasarana dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pasien (Studi Pada Pasien Rawat Jalan Unit Poliklinik IPDN Jatinegoro). *Jurnal Coopetition*, 8(2), 155–166.
- Sinambela, L. P. (2011). *Reformasi Pelayanan Publik”, Teori, Kebijakan, dan Implementasi,*. Jakarta: Bumi Aksara.

**Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dalam Sektor Kesehatan
terhadap Kasus Covid-19 di Sulawesi Tenggara**

- Suhaeri, F., & Sugiharti, L. (2020). Pengaruh Faktor Sosial Ekonomi Terhadap Angka Kematian Bayi (AKB) Pada Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Timur. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 20(1), 68–87. <https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v20i1.3843>
- Supriatna, E. (2020). Wabah Corona Virus Disease (Covid 19) Dalam Pandangan Islam. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 7(6). <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i6.15247>
- Todaro, M. (2006). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Edisi Ketiga*. Jakarta : Erlangga.

ANALISIS PENGARUH JUMLAH PENDUDUK, PERTUMBUHAN PENDUDUK, DAN ANGKATAN KERJA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI PAPUA TAHUN 2017-2019

Dr. Ibi Satibi

(ibi.satibi@uin-suka.ac.id)

Dedi Mardianto

(19208012005@student.uin-suka.ac.id)

Muhamad Aliyul Adhim

(19208012026@student.uin-suka.ac.id)

PENDAHULUAN

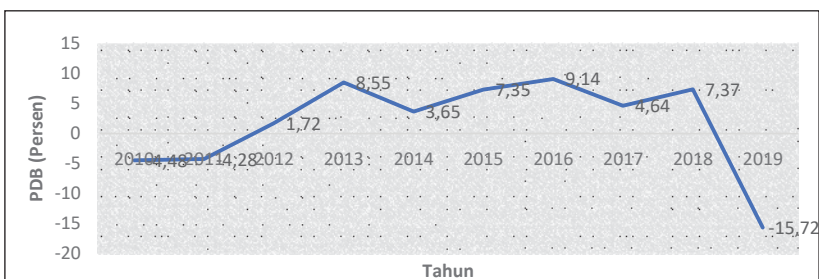
Pembangunan suatu negara tidak terlepas dengan adanya pertumbuhan ekonomi disetiap daerah. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu permasalahan jangka panjang yang dialami disetiap negara atau daerah. Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh beberapa sektor-sektor, salah satunya masalah kependudukan. Teori Pertumbuhan Ekonomi Neo-Klasik menyatakan pertumbuhan ekonomi bergantung pada perkembangan faktor-faktor produksi yaitu ; modal, tenaga kerja dan

teknologi (Sukirno, 1994). Faktor tenaga kerja berkaitan dengan laju pertumbuhan kependudukan yang ada disuatu daerah.

Penduduk sebagai faktor pertumbuhan ekonomi sering dikaitkan dengan *income* per-kapita negara atau daerah tersebut, yang secara tidak langsung mencerminkan kemajuan perekonomian negara (Subri, 2003). Pertumbuhan penduduk yang cepat menjadi peluang sendiri bagi negara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara atau daerah itu sendiri. Hal tersebut dapat diukur melalui tinggi atau rendahnya PDB suatu daerah, akan tetapi pertumbuhan penduduk yang cepat juga bisa menjadi penghambat laju pertumbuhan ekonomi.

Dalam negara berkembang seperti Indonesia pertumbuhan penduduk tidak diimbangi dengan adanya pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan kareteristik penduduk dalam beberapa wilayah khususnya diluar jawa cenderung memiliki kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang rendah dibandingkan wilayah jawa. Sebagai salah satu dari bagian Indonesia pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua termasuk belum stabil, hal ini berdasarkan ini garifk berikut:

Gambar 1. Grafik Poduk Domestik Bruto Provinsi Papua Tahun 2010-2019



Sumber data: Badan Pusat Statistik 2020 (Diolah)

Hal di atas menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua masih belum stabil dan pada tahun 2019 besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Papua atas dasar harga berlaku mencapai Rp.189,716 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 134,677 triliun. Selain itu pada tahun yang sama, ekonomi Provinsi Papua mengalami kontraksi sebesar -15,72 persen. Melihat kondisi pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua maka untuk mengatasi hal tersebut pemerintah dapat memanfaatkan sumber daya manusia yang dimilikinya. Mengingat bahwa provinsi Papua tercatat sekitar 28 kabupaten atau kota dengan jumlah penduduk yang cukup besar sekitar 4,30 juta jiwa. Hal ini bisa menjadi peluang pemerintah daerah untuk memberdayakannya guna menunjang pertumbuhan perekonomian daerah tersebut.

Jumlah penduduk yang besar dapat memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua. Hal tersebut sesuai dengan penelitian Rukmana (2012) yang menggunakan regresi semi log linear berganda dengan metode *Ordinary Least Square* (OLS). Hasil menunjukkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun hal tersebut tidak sesuai dengan hasil temuan yang dilakukan oleh (Yenny and Anwar, 2020) yang menunjukkan bahwa jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di kota Lhokseumawe.

Provinsi Papua yang memiliki jumlah penduduk yang banyak dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 4,13 persen pertahunnya. Hal ini bisa dimanfaatkan oleh pemerintah dalam meningkatkan ekonomi di daerah tersebut, karena dalam beberapa penelitian terkait,

pertumbuhan penduduk dapat memberikan dampak yang positif untuk pertumbuhan ekonomi di suatu daerah (Safitri, 2016). Sejalan dengan penelitian Rochaida (2016), menyatakan pertumbuhan penduduk memberika efek yang baik untuk pertumbuhan ekonomi yang sekaligus juga mendorong keluarga dalam suatu daerah menjadi sejahtera. Akan tetapi penelitian yang dilakukan oleh Gatsi and Owusu Appiah (2020), menyatakan pertumbuhan penduduk tidak memberikan hal yang positif pada pertumbuhan ekonomi.

Disisi lain pertumbuhan penduduk juga memberikan dampak pertumbuhan klasifikasi usia dalam setiap jumlah penduduk. Kareteristik dalam sebuah penduduk dibagi menjadi usia non produktif, usia produktif dan lanjut usia. Dalam penelitan Anwar (2018), menyatakan laju pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi adanya rasio usia produktif yang besar tiap pertumbuhan penduduknya. Dilain sisi Adeosun and Popogbe, (2020), menyatakan dalam pertumbuhan penduduk juga diiringi adanya proses berkurangnya usia kerja sehingga berdampak negative dengan pertumbuhan ekonomi.

Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi dan diiringi dengan angkatan kerja yang tinggi pula, maka hal tersebut akan memberikan pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini sesuai yang dikatakan oleh Novianto & Atmanti (2013) melalui metode *Ordinary Least Square* (OLS), bahwa angkat kerja berpengaruh positif terhadap PDRB di wilayah Jawah Tengah. Namun hal tersebut berbeda yang ditemukan oleh Widiawati (2018), bahwa variabel angkatan kerja tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Berdasarkan permasalahan diatas jumlah penduduk, pertumbuhan penduduk, dan usia angkatan kerja masih

bersifat fluktuatif terhadap pertumbuhan ekonomi, padahal merupakan harapan besar yang dapat dijadikan sebagai aset pembangunan, karena semakin banyaknya jumlah penduduk maka semakin banyak pula tenaga kerja yang dapat digunakan sehingga mengakibatkan perekonomian akan berkembang. Oleh karena tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan penduduk, jumlah penduduk, dan angkatan kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua. Sehingga dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pemangku kebijakan guna mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.

KERANGKA TEORITIS

Teori Kependudukan

Berdasarkan UUD 1945 pasal 26 ayat 2 menjelaskan bahwa penduduk di Indonesia terdiri dari warga negara Indonesia asli dan orang-orang bangsa asing yang mendiami negara Indonesia yang telah di data atau sensus penduduk.

Penduduk melakukan permintaan atas sesuatu barang dalam rangka memenuhi atau memuaskan kebutuhan hidup. Semakin meningkat jumlah penduduk, maka kebutuhan akan barang-barang pemuas kebutuhan akan mengalami peningkatan. Pertambahan jumlah penduduk yang tidak seiring dengan perkembangan kesempatan kerja, akan mengakibatkan meningkatkan pengangguran (Sukirno, 1996). Seperti halnya yang dikatakan oleh David Ricardo (Hapsa and Khoirudin, 2018) bahwa melimpahnya tenaga kerja disebabkan oleh pertumbuhan penduduk yang terlalu besar hingga dua kali lipat. Hal ini akan berpengaruh pada menurunnya upah yang diterima. Upah tersebut hanya

mampu membiayai tingkat hidup minimum (*subsistence level*). Sehingga perekonomian akan mengalami stagnasi (kemandekan) yang disebut *Stationary State* (Arsyad, 1997).

Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk adalah terjadinya perubahan jumlah penduduk yang di daerah tertentu pada waktu tertentu. Pada dasarnya laju pertumbuhan penduduk digunakan untuk memprediksi jumlah penduduk suatu daerah pada masa yang akan datang. Adapun asumsi yang digunakan secara geometrik adalah laju pertumbuhan sama pada setiap tahunnya. Rumus laju pertumbuhan penduduk geometrik sebagai berikut (Rumbia, 2008):

$$P_t = P_o (1+r)^t$$

Keterangan :

P_t = Jumlah penduduk pada tahun t

P_o = jumlah penduduk pada tahun dasar

t = jangka waktu

r = laju pertumbuhan penduduk

Pertumbuhan Ekonomi

a. Teori Klasik

Pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah harus mencerminkan adanya pertumbuhan output perkapita. Dengan adanya pertumbuhan perkapita mengimplikasikan adanya pertumbuhan upah riil dan meningkatnya standar hidup. Menurut Sukirno (1996), pertumbuhan dan pembangunan ekonomi memiliki definisi yang berbeda, yaitu pertumbuhan ekonomi ialah proses kenaikan output perkapita yang terus menerus dalam jangka panjang. Per-

tumbuhan ekonomi tersebut merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan.

Menurut teori klasik bahwa output akan sejalan dengan perkembangan penduduk. Teori yang dikemukakan oleh Adam Smith (Arsyad, 2010) mengungkapkan unsur pokok dari sistem produksi suatu negara ada tiga yaitu: pertama, sumberdaya alam yang tersedia, kedua, sumberdaya manusia dan ketiga, akumulasi modal yang harus dimiliki. Namun Smith lebih menekankan pada stok modal yang merupakan unsur yang secara aktif menentukan tingkat output. Sedangkan Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan kenaikan output per kapita. Sehingga Produk Domestik Bruto perkapita yang dihasilkan oleh penduduk yang ada suatu daerah mempengaruhi adanya pertumbuhan ekonomi dalam suatu daerah. Output per kapita adalah output total dibagi dengan jumlah penduduk. Jadi proses kenaikan output per kapita, tidak bisa dianalisa dengan cara melihat apa yang terjadi dengan output total di satu pihak, dan jumlah penduduk di lain pihak (Boediono, 2001).

b. Teori Neoklasik (Solow Swan)

Pada penelitian ini erat kaitanya dengan adanya jumlah penduduk, pertumbuhan penduduk dan usia Angkatan kerja sehingga jika melihat teori model pertumbuhan Neoklasik di mana Menurut Teori Neoklasik, pertumbuhan ekonomi tergantung pada ketersediaan faktor-faktor produksi: penduduk, tenaga kerja, dan akumulasi modal dan tingkat kemajuan teknologi (Arsyad, 2010). Analisis teori ini didasarkan atas asumsi-asumsi dari teori klasik yaitu bahwa perekonomian berada pada tingkat pengerjaan penuh (*full employment*) dan tingkat penggunaan penuh (*full utilization*) dari faktor-faktor produksinya. Model ini menjelaskan bahwa teknologi yang digunakan menentukan

besarnya output yang diproduksi dari jumlah modal dan tenaga kerja tertentu.

Teori Pertumbuhan Neoklasik yang disajikan dalam fungsi Cobb-Douglas menekankan peran pembentukan modal sebagai salah satu faktor penting dalam pertumbuhan. Solow (dalam (Jhingan, 1983); (Mankiw, 2007)) menekankan pertumbuhan jangka panjang dan peranan modal, tenaga serta teknologi sebagai faktor produksi. Lebih jauh menurut Solow, pertumbuhan akan terjadi apabila ada modal, ada pertumbuhan penduduk dan ada teknologi, walaupun teknologi masih dianggap sebagai faktor eksogen. Dengan demikian fungsi produksi dapat diformulasikan ke dalam Persaman berikut:

$$Y = F(K, L \times E)$$

Dimana E adalah variabel yang disebut efisiensi tenaga kerja. $L \times E$ mengukur jumlah para pekerja efektif yang memperhitungkan jumlah pekerja L dan efisiensi masing-masing pekerja. Fungsi produksi ini menyatakan bahwa output total Y bergantung pada jumlah unit modal K dan jumlah pekerja efektif $L \times E$. Ini bermakna bahwa peningkatan efisiensi tenaga kerja E sejalan dengan peningkatan angkatan kerja L (Mankiw, 2007). Dalam model ini, tabungan akan mendorong pertumbuhan ekonomi untuk sementara, tetapi pengembalian modal yang kian menurun pada akhirnya akan mendorong pencapaian perekonomian yang mapan akan tergantung pada kemajuan teknologi (eksogenous).

Model Malthus

Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Malthus (1798) sebagai pencetus pertama. Dalam teori tersebut

Malthus menyatakan bahwa pertumbuhan jumlah penduduk lebih cepat dari sumber daya kehidupan yang ada. Jumlah penduduk cenderung bertambah cepat ibarat deret ukuran 1,2,4,8,16,32 dan seterusnya, sedangkan alat-alat subsistensi bertambah menurut deret hitung 1,2,3,4 dan seterusnya, yakni pertumbuhannya lebih lambat dari pertumbuhan penduduk. Kondisi tersebut akan mengakibatkan penurunan pendapatan pekerja. Pada akhirnya manusia akan mengalami kemiskinan dan kesengsaraan kecuali dengan cara menekan laju pertumbuhan penduduk baik melalui (Gunawan, 2020):

- 1) *Preventive checks* (pencegahan preventif) misalnya dengan melakukan perkawinan pada usia matang
- 2) *Positive Checks* (pencegahan positif) misalnya adanya musibah perang atau penyakit.

Hal tersebut menimbulkan beberapa Langkah positif untuk mencegah pertumbuhan penduduk yang tak terkontrol. Ada beberapa solusi yang dikemukakan sebagai berikut (Winardi, 1993):

- 1) perpindahan penduduk dari daerah yang padat pada daerah yang kurang penduduk.
- 2) mengembangkan sumber daya baru serta teknik- teknik produksi baru dengan tingkat kecepatan yang lebih tinggi dan memiliki tingkat pertumbuhan penduduk.

Ukuran Pertumbuhan Ekonomi

Pengukuran kemajuan ekonomi dalam suatu daerah memerlukan alat ukur yang tepat. Menurut Suparmoko (1998), ada beberapa alat ukur pertumbuhan ekonomi antara lain:

a. Produk Domestik Bruto (PDB)

Produk Domestik Bruto (PDB) atau apabila dalam tingkat regional disebut dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), merupakan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam satu tahun. Seperti halnya dikatakan oleh Sasana (2007), bahwa PDRB adalah nilai bersih yang dihasilkan dari kegiatan ekonomi baik barang ataupun jasa di suatu daerah dalam periode tertentu. Namun pada setiap daerah memiliki besaran PDRB yang bervariasi karena masing-masing daerah sangat bergantung kepada potensi dari faktor-faktor produksi dalam mengelola sumber daya alam yang dimilikinya.

b. Produk Domestik Bruto Per kapita/ Pendapatan Per Kapita

Produk Domestik Bruto Per kapita atau Pendapatan Per kapita pada skala daerah digunakan sebagai pengukur pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dan tepat mencerminkan kesejahteraan penduduk suatu Negara, karena dalam Produk Domestik Bruto Per kapita diperoleh dari Produk Domestik Regional Bruto Daerah Dibagi dengan Jumlah penduduk di suatu daerah yang bersangkutan. Hal ini juga sering disebut dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) rata. Sehingga hal ini lebih menggambarkan tingkat perekonomian setiap penduduk yang ada di daerah yang bersangkutan. Adapun rumus untuk mencari pendapatan perkapita sebagai berikut:

$$\text{PDB perkapita} = \frac{\text{PDB}_t}{\text{Jumlah Penduduk}_t}$$

Dimana:

PDB_t : Produk Domestik Bruto Tahun tertentu

Jumlah Penduduk_t : Jumlah Penduduk Tahun Tertentu

Pertumbuhan Ekonomi dalam perspektif Ekonomi islam

Penggunaan parameter *falah* merupakan salah satu hal yang menjadi pembeda ekonomi Islam dengan ekonomi lainnya. Dalam arti sebuah sistem ekonomi (*Nidhom Al-Iqtishad*) ekonomi Islam merupakan sebuah sistem ekonomi yang dapat mengantar umat manusia kepada *real welfare (falah)*, yaitu kesejahteraan sebenarnya (Nurul, 2008). Pada dasarnya ekonomi Islam mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai *sustained growth of a right kind of output which can contribute to human welfare* (pertumbuhan terus menerus dari faktor produksi secara benar yang mampu memberikan kontribusi bagi kesejahteraan manusia). Berdasarkan pengertian ini, maka pertumbuhan ekonomi merupakan hal yang sarat nilai. Suatu peningkatan yang dialami oleh faktor produksi tersebut misalnya memasukkan barang-barang yang memberikan efek buruk dan membahayakan manusia (Naf'an, 2014).

Manusia dalam pandangan Islam selain hamba Allah juga sebagai khalifah dimuka bumi ini. Posisi manusia sebagai khalifah sesungguhnya adalah konsekuensi logis dari fasilitas yang diberikan Allah kepadanya. Manusia dilengkapi dengan perangkat-perangkat *aql, qalb, hawa* dan *nabs* yang membuatnya menjadi mungkin untuk mengembangkan potensi diri. Allah juga mengajarkan kepada manusia *al-asma* atau simbol-simbol yang membuatnya mengenal apa-apa yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung fungsi kekhalifahannya (Chapra, 1999).

Berdasarkan hal tersebut, bahwa manusia juga diberikan kebebasan untuk mengelola bumi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam persepektif kependudukan, sebagai manusia harus mampu mengatur bumi supaya menjadi tempat yang tetap layak untuk ditempati untuk melakukan aktivitas. Selain itu manusia juga dituntut untuk menjaga keseimbangan antara manusia dengan alam dan memenuhi hidupnya dengan memanfaatkan sumber daya alam yang telah disediakan (Syahatah, 1998). Meski demikian, dalam Islam sendiri mendorong agar manusia memiliki keturunan yang berkualitas jika dibandingkan dengan memiliki kuantitas. Karena kuantitas namun tidak bisa membangun perekonomian dan mensejahterahkan hidup akan menghasilkan akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini sesuai dengan Q.S An-Nisa ayat 9:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرْكُوهُ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّتَهُ ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

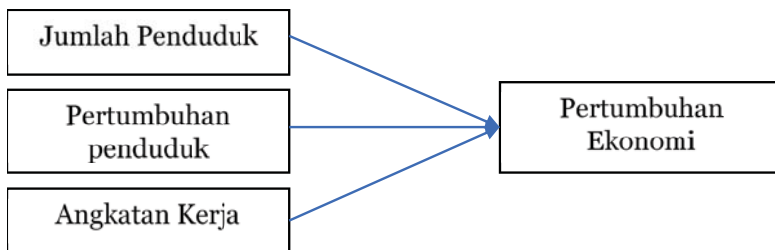
Artinya: “dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendak mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.”

Pada tafsir Quraish Shihab ayat tersebut menjelaskan manusia sekali-kali tidak boleh berlaku zalim terhadap anak-anak yatim. Hendaklah mereka merasa takut terhadap keturunannya yang lemah akan menerima perlakuan zalim sebagaimana yang dirasakan oleh anak-anak yatim. Bertakwalah kepada Allah dalam menghadapi anak-anak yatim. Berbicaralah dengan ucapan yang

mengarah kepada kebenaran tanpa berlaku zalim kepada siapa pun. Tafsir tersebut menegaskan bahwa masyarakat dalam kaitanya dengan kependudukan dianjurkan untuk mempertimbangkan dan mengutamakan kesejahteraan keluarganya. Sehingga dari situ bis akita pahami bahwa islam mengutamakan kualitas keturunannya disbanding jumlah anak, meskipun dalam islam tidak ada aturan mengenai pembatasan jumlah anak.

Berdasarkan Teori yang dijelaskan diatas, penulis memuculkan beberpa hipotesis dan kerangka teori sebagai berikut:

- H1 : Variabel Jumlah Penduduk Berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi
- H2 : Variabel Pertumbuhan Penduduk Berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi
- H3 : Variabel Angkatan kerja Berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi



METODE PENELITIAN

Jenis dan sumber data

Penelitian ini mempunyai ruang lingkup pada pertumbuhan penduduk, jumlah penduduk, dan angkatan kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi papua.

Penelitian ini menggunakan data sekunder dalam bentuk data panel yang mencakup kabupaten diprovinsi papua dari tahun 2017-2019. Data yang diolah adalah data jumlah penduduk, pertumbuhan penduduk, Usia Angkatan kerja dan Pertumbuhan Ekonomi.

Dalam penelitian ini menggunakan data panel yang merupakan gabungan antara data *cross section*, yaitu 33 kabupaten/kota di provinsi papua dan data *time series* dari tahun 2017-2019. Sehingga dalam penelitian ini data yang digunakan berjumlah 99 data. Data dalam penelitian bersumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi Papua.

Variabel Penelitian

Variabel penelitian menggunakan variabel independent dan variabel dependen. Variabel independent dalam penelitian ini yaitu Pertumbuhan Penduduk (X1), Jumlah Penduduk (X2) dan Usia Angkatan Kerja (X3) kemudian variabel pertumbuhan ekonomi (Y) sebagai vadiabel dependen.

Tabel Definisi Operasional Penelitian

No.	Variabel	Alat Ukur
1	Jumlah Penduduk	Dalam ukuran Jiwa
2	Pertumbuhan Penduduk	$P_t = P_o (1+r)^t$
3	Jumlah Angkatan Kerja	Dalam Ukuran Jiwa
4	Pertumbuhan Ekonomi	$PDB \text{ perkapita} = \frac{PDB_t}{\text{Jumlah Penduduk}_t}$

Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data panel yang merupakan alat analisis regresi dimana data dikumpulkan secara individu (*cross section*) dan diikuti pada waktu tertentu (*time series*) dengan melalui tiga pendekatan, yaitu

common effect, fixed effect, dan random effect. Pendekatan tersebut selanjutnya akan dipilih model yang tepat untuk penelitian dengan melakukan uji chow dan uji hausman. Uji chow dilakukan untuk membandingkan model terbaik antara common dan fixed. Sedangkan uji hausman akan menentukan model yang tepat antara random dengan fixed. Kemudian dilakukan regresi secara parsial melalui uji t dan pengujian secara simulat menggunakan uji F. pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan Microsoft Excel dan EvIEWS versi 9.

Adapun model persamaan regresi data panel yang digunakan pada penelitian ini yaitu:

$$\text{PDRB}_{it} = \alpha + \beta_1 \text{PP}_{it} + \beta_2 \text{JP}_{it} + \beta_3 \text{UAK}_{it} + e_{it}$$

Dimana:

PDRB = Pertumbuhan Ekonomi

i = Kabupaten/Kota

t = waktu (2017-2019)

α = konstanta

$\beta_1 - \beta_5$ = Koefisien

PP = Pertumbuhan Penduduk

JP = Jumlah penduduk

UAK = Usia Angkatan Kerja

e = error

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Statistik Deskriptif

Uji statistik deskriptif dilakukan untuk memberikan gambaran mengenai data yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun hasilnya dapat dilihat pada tabel 1.1 di bawah ini.

Tabel 1.1 Hasil Uji Statistik Deskriptif

	X1(JP)	X2(PP)	X3 (AK)	Y (PDRB)
Mean	117795.4	1.978372	62598.64	38126443
Median	100401.5	1.875000	52573.50	27642385
Maximum	300192.0	5.210000	146739.0	1.23E+08
Minimum	19104.00	0.230000	7747.000	8505767.
Std. Dev.	68681.89	0.991101	37756.83	27336095

Sumber data: *Eviews* (Data diolah)

Hasil uji statistik deskriptif menunjukkan bahwa dalam 3 tahun, mean (nilai rata-rata) sebesar 381 dengan nilai minimum sebesar 85, dan nilai maximum sebesar 1.23E+08 serta nilai Standar Deviasiasi sebesar 273.

Uji Regresi Model

Uji Chow

Pada uji chow dilakukan untuk melihat model terbaik antara model *Common Effect* atau *Fixed Effect*. Adapun hasil uji chow disajikan dalam tabel 1.2 di bawah ini.

Tabel 1.2 Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	323.222834	(28,54)	0.0000
Cross-section Chi-square	440.965980	28	0.0000

Sumber data: *Eviews* (Data diolah)

Hasil uji model *Common Effect* vs *Fixed Effect* didapatkan nilai $F < 0,05$, maka pada tahap ini model *Fixed Effect* lebih baik dari pada *Common Effect*. Selanjutnya akan dilakukan uji hausman.

Uji Hausman

Uji Hausman dilakukan untuk menguji model terbaik antara *Fixed Effect* dan *Random Effect*. Adapun hasil dari uji hausman dapat dilihat pada tabel 1.3 di bawah ini.

Tabel 1.3 Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	27.370823	3	0.0000

Sumber Data: *Eviews* (Data diolah)

Pada hasil uji hausman yang telah dilakukan dihasilkan bahwa Prob. Chi-Square < 0,05, sehingga model yang terbaik antara *Fixed Effect* dan *Random Effect* adalah *Fixed Effect*. Maka selanjutnya akan menginterpretasi model regresi terbaik yaitu uji hipotesis dan koefisien determinasi.

Model Fixed Effect

Pada hasil uji model yang telah dilakukan sebelumnya yaitu uji chow dan hausman didapatkan fixed effect sebagai model terbaik, sehingga pada penelitian ini menggunakan pendekatan model fixed effect. Adapun hasil regresi model fixed effect disajikan pada tabel 2.1 di bawah ini.

Tabel 2.1 Hasil Regresi Model Fixed Effect

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	11.79843	1.353794	8.715079	0.0000
LOG(X1JP)	0.117241	0.058135	2.016719	0.0487
LOG(X2PP)	-0.013452	0.019789	-0.679801	0.4995
LOG(X3AK)	0.375322	0.112337	3.341029	0.0015
R-squared	0.995675	Mean dependent var		17.19587
Adjusted R-squared	0.993192	S.D. dependent var		0.743665
S.E. of regression	0.061362	Akaike info criterion		-2.465224

Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pertumbuhan Penduduk, dan Angkatan Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Papua Tahun 2017-2019

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
Sum squared resid	0.203327	Schwarz criterion		-1.551979
Log likelihood	138.0046	Hannan-Quinn criter.		-2.097685
F-statistic	400.9848	Durbin-Watson stat		1.758773
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber data: *Eviews* (Data diolah)

Berdasarkan hasil regresi yang diperoleh dari model *fixed effect* dengan nilai konstanta sebesar 11.79843. Kemudian dari hasil tersebut ditemukan bahwa jumlah penduduk di suatu kabupaten atau kota dapat memberikan efek positif terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga dikatakan bahwa bertambahnya jumlah penduduk mampu menaikkan pertumbuhan ekonomi. Selain itu jumlah angkatan kerja yang ada di Kabupaten atau Kota berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. semakin bertambahnya jumlah angkatan kerja maka akan menaikkan pertumbuhan ekonomi.

Secara simultan variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua tahun 2017 sampai 2019. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai prob. F-statistik sebesar 0.0000. Kemudian dari hasil regresi didapatkan nilai Adj. R-Squared sebesar 0.993192. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen dalam penelitian, mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 99% sedangkan 1% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian.

Uji T-statistik (Parsial)

Uji T-statistik digunakan untuk menunjukkan seberapa besar variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Nilai probabilitas lebih kecil dari α maka

menerima H_a dan jika nilai probabilitas lebih besar dari α maka menolak H_a . Adapun hasil pembahasan dan diskusi berdasarkan hasil uji t pada tingkat signifikan 5% dapat diuraikan sebagai berikut:

Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hasil pengujian data yang telah dilakukan menyatakan bahwa jumlah penduduk dapat memberikan pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan hubungan searah atau positif, jadi apabila jumlah penduduk yang ada di Provinsi Papua bertambah, maka hal tersebut berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat. Dapat dinyatakan bahwa setiap jumlah penduduk bertambah 1 jiwa, maka pertumbuhan ekonomi naik sebesar Rp. 0.117241 di Provinsi Papua.

Hal di atas sejalan dengan pernyataan awal dalam penelitian bahwa penduduk melakukan permintaan atas sesuatu barang dalam rangka memenuhi atau memuaskan kebutuhan hidup. Semakin meningkat jumlah penduduk, maka kebutuhan akan barang-barang pemuas kebutuhan akan mengalami peningkatan, sehingga permintaan akan barang bertambah dan mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi. Adam Smith mengatakan, pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan kenaikan output per kapita. Sehingga Produk Domestik Bruto perkapita yang dihasilkan oleh penduduk yang ada suatu daerah mempengaruhi adanya pertumbuhan ekonomi dalam suatu daerah (Arsyad, 2010). Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Rukmana (2012) yang menyatakan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya penelitian

yang dilakukan oleh Safitri (2016) juga menyatakan jumlah penduduk yang meningkat memberikan pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Aceh.

Pengaruh Laju Pertumbuhan Penduduk terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Pada pengujian selanjutnya yang dihasilkan dari analisis regresi model fixed effect didapatkan bahwa variabel laju pertumbuhan penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua. Hal tersebut terjadi diduga karena laju pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat namun tidak diiringi dengan kesempatan kerja, sehingga menyebabkan pengangguran yang berdampak pada penurunan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua.

Malthus juga menyatakan bahwa pertumbuhan jumlah penduduk lebih cepat dari sumber daya kehidupan yang ada. Jumlah penduduk cenderung bertambah cepat ibarat deret ukuran 1,2,4,8,16,32 dan seterusnya, sedangkan alat-alat subsistensi bertambah menurut deret hitung 1,2,3,4 dan seterusnya, yakni pertumbuhannya lebih lambat dari pertumbuhan penduduk. Kondisi tersebut akan mengakibatkan penurunan pendapatan pekerja. Pada akhirnya manusia akan mengalami kemiskinan dan kesengsaraan yang kemudian berakibat pada penurunan pertumbuhan ekonomi. Dalam Islam sendiri juga mendorong agar manusia memiliki keturunan yang berkualitas jika dibandingkan dengan memiliki kuantitas, karena kuantitas tidak bisa membangun perekonomian dan mensejahterahkan hidup akan menghasilkan kemiskinan dan kesengsaraan yang akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Hasil Penelitian ini mendukung temuan yang

dilakukan oleh Gatsi & Appiah (2020), menyatakan pertumbuhan penduduk tidak memberikan hal yang positif pada pertumbuhan ekonomi.

Pengaruh Angkatan Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Pada hasil selanjutnya didapatkan variabel angkatan kerja berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua. Jadi ketika kesempatan kerja disiapkan maka angkatan kerja akan lebih bertambah. Apabila angkatan kerja bertambah 1 jiwa maka pertumbuhan ekonomi naik sebesar Rp 0.375322 di Provinsi Papua. Hal ini sesuai dengan Teori Neoklasik yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tergantung pada ketersediaan faktor-faktor produksi, salah satunya adalah tenaga kerja (Arsyad, 2010).

Hasil penelitian ini sesuai dengan apa yang dikemukakan dalam temuan Novianto & Atmanti (2013) melalui metode *Ordinary Least Square* (OLS), bahwa angkatan kerja berpengaruh positif terhadap PDRB di wilayah Jawa Tengah. Sehingga penyediaan kesempatan kerja penting untuk dilakukan agar penambahan angkatan kerja di suatu wilayah meningkat dan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi. Begitupun penelitian yang dilakukan oleh Hapsa dan Khoirudin (2018) dimana angkatan kerja di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Begitupun penelitian yg dilakukan Rahmattullah (2015),

KESIMPULAN DAN SARAN

Pada penelitian ini menguji sejauh mana jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk serta angkatan kerja dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa apabila jumlah penduduk bertambah maka pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua mengalami peningkatan. Namun sebaliknya jika terjadi laju pertumbuhan penduduk yang begitu cepat tidak memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua. Tapi kemudian, jika angkatan kerja semakin bertambah maka pertumbuhan ekonomi yang ada di Provinsi Papua akan mengalami peningkatan.

Selanjutnya dari kesimpulan diatas, maka dapat diberikan beberapa saran, yaitu hasil penelitian ini menjadi pertimbangan dari pemerintah untuk mendorong jumlah penduduk yang ada di Provinsi Papua. Hal tersebut tak terlepas dengan adanya jumlah angkatan kerja yang meningkat, sehingga dalam mendorong jumlah penduduk yang ada di Provinsi Papua pemerintah daerah harus mendorong adanya lapangan pekerjaan yang besar dan layak untuk masyarakatnya. Sehingga masyarakat dapat turut andil dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Kekurangan dalam penelitian ini yaitu variabel yang digunakan dalam mengukur pertumbuhan ekonomi hanya berbasis kependudukan dan dalam runtut waktu yang sangat pendek yaitu 3 tahun karena masih minimnya data. Sehingga rekomendasi untuk peneliti selanjutnya untuk melanjutkan penelitian ini dengan variabel-variabel pelengkap yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini dan dalam jangka waktu yang lebih panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adeosun, O. T. and Popogbe, O. O. (2020) 'Population growth and human resource utilization nexus in Nigeria', *Journal of Humanities and Applied Social Sciences*, ahead-of-print(ahead-of-print). doi: 10.1108/JHASS-06-2020-0088.
- Anwar, K. (2018) 'Pengaruh Jumlah Penduduk Usia Produktif, Kemiskinan Dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Bireuen', p. 8.
- Arsyad, L. (2010) *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Boediono (2001) *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: LPUI.
- Gatsi, J. G. and Owusu Appiah, M. (2020) 'Population growth, income growth and savings in Ghana', *Journal of Economics and Development*, 22(2), pp. 281–296. doi: 10.1108/JED-12-2019-0078.
- Gunawan, M. H. (2020) 'Pertumbuhan Ekonomi Dalam Pandangan Ekonomi Islam', (1), p. 12.
- Hapsa, S. and Khoirudin, R. (2018) 'Analisis Pertumbuhan Ekonomi D.I. Yogyakarta Tahun 2008-2016', 18(2), p. 18.
- Jhingan, M. L. (1983) *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mankiw, N. G. (2007) *Makroekonomi*. Keenam. Jakarta: Erlangga.
- Rahmattullah (2015) 'Pengaruh Penduduk Umur Produktif Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia', *Visipena Journal*, 6(2), pp. 68–87. doi: 10.46244/visipena.v6i2.366.

- Rochaida, E. (2016) 'Dampak Pertumbuhan Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Keluarga Sejahtera Di Provinsi Kalimantan Timur', 18(1), p. 11.
- Safitri, I. (2016) 'Pengaruh Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi', 1, p. 10.
- Subri, M. (2003) *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sukirno, S. (1994) *Pengantar Makro Ekonomi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sukirno, S. (1996) *Pengantar Teori Makroekonomi*. Kedua. PT. Raja Grafindo Persada.
- Suparmoko, M. (1998) *Pengantar Ekonomika Makro*. Keempat. Yogyakarta: BPFE.
- Winardi (1993) *Sejarah Perkembangan Ilmu Ekonomi*. Bandung: Tarsito.
- Yenny, N. F. and Anwar, K. (2020) 'Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Lhokseumawe', p. 6.

PENGARUH JUMLAH PENDUDUK, TINGKAT PENGANGGURAN DAN IPM TERHADAP KETIMPANGAN PENDAPATAN DI PROVINSI SULAWESI BARAT

Dr. Syafiq M. Hanafi

Hasbi

Ardi Megantoro

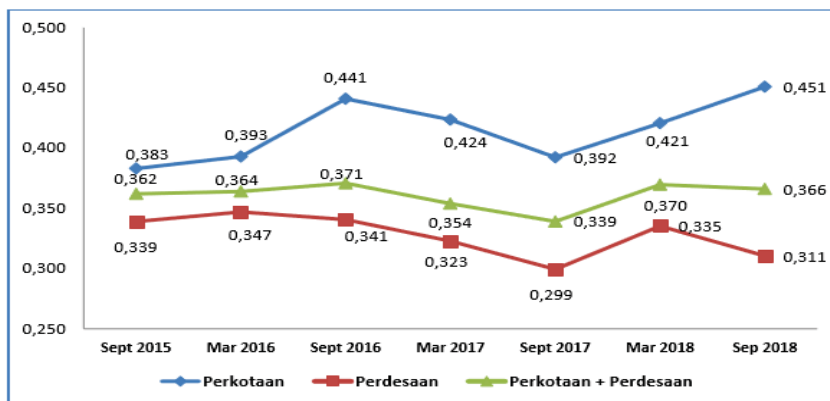
PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu dari indikator keberhasilan pembangunan di setiap wilayah. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi berdampak pada ketimpangan pendapatan. Ketimpangan pendapatan (*income inequality*) menjadi isu penting bagi pembangunan setiap negara. Masalah utama dalam distribusi pendapatan adalah terjadinya perbedaan di dalam distribusi pendapatan. Ketimpangan pendapatan merupakan tolok ukur dari distribusi pendapatan masyarakat dalam suatu daerah atau wilayah pada periode tertentu. Semakin tinggi ketimpangan pendapatan berarti distribusi pendapatan di masyarakat semakin tidak merata. Kondisi ini pada akhirnya akan memperbesar kesenjangan (*gap*) antara masyarakat

Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pengangguran dan IPM terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Sulawesi Barat

dengan tingkat ekonomi relatif baik (kelompok kaya) dengan mereka yang berpendapatan rendah (Khoirudin & Musta'in, 2020).

Gambar 1 Perkembangan Gini Ratio Provinsi Sulawesi Barat September 2015 – September 2018



Sumber : Badan Pusat Statistik Prov Sulawesi Barat, 2018

Ketimpangan masih menjadi masalah yang harus diperhatikan dalam pembangunan di setiap wilayah terutama di Provinsi Sulawesi Barat sebagai Provinsi baru di Indonesia. Dalam perkembangan sebuah daerah pemekaran, ketimpangan antar-kabupaten dalam provinsi merupakan sangat sering ditemukan. Perbedaan kondisi geografis, alokasi dana, sumberdaya alam, sumberdaya manusia, infrastruktur, dinamika politik dan kebijakan daerah, serta konsentrasi ekonomi yang berbeda mengakibatkan satu daerah lebih maju dibandingkan daerah lainnya. Hal ini dapat kita lihat Gini Ratio Provinsi Sulawesi Barat pada September 2015 tercatat sebesar 0,362, meningkat pada Maret 2016 menjadi 0,364, dan meningkat kembali pada September 2016 menjadi 0,371. Kemudian mengalami penurunan sebesar 0,032 poin pada September 2017

menjadi 0,339 dan meningkat sebesar 0,030 poin pada Maret 2018 menjadi 0,370. Pada September 2018, nilai Gini Rasio sebesar 0,366, turun 0,003 persen dan mengalami penurunan pada September 2019 sebesar 0,365. Secara umum, nilai Gini Ratio di Sulawesi Barat selama Maret 2015 hingga September 2019 mengalami fluktuasi.

Jumlah penduduk yang tinggi di suatu daerah tidak akan menimbulkan masalah jika produktivitas penduduknya juga tinggi sehingga tidak menyebabkan distribusi pendapatan timpang. Permasalahan akan muncul jika jumlah penduduk yang tinggi diikuti dengan pengangguran dan kemiskinan yang berakibat pada ketimpangan distribusi pendapatan. Permasalahan jumlah penduduk dapat diketahui melalui pembangunan ekonomi. Banyak sedikitnya jumlah penduduk di suatu daerah tidak dapat dikatakan bahwa daerah tersebut memiliki kelebihan penduduk (Matondang, 2018). Penelitian yang dilakukan oleh Lestari (2016) menyebutkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di daerah Provinsi Jawa Timur. Hal ini dikarenakan peningkatan jumlah penduduk suatu daerah tidak disertai dengan pengembangan kualitas SDM akan menyebabkan persaingan dalam memperoleh lapangan pekerjaan semakin ketat sehingga menyebabkan pengangguran dan semakin besar tingkat ketimpangan pendapatan (Arif & Wicaksani, 2017). Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Devi (2010) menunjukkan hasil bahwa laju pertumbuhan penduduk berpengaruh negatif tetapi signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Artinya banyak sedikitnya jumlah penduduk tidak mempengaruhi tingkat ketimpangan pendapatan.

Mankiw, Quah, dan Wilson (2014) mendefinisikan pengangguran adalah seseorang yang berhenti bekerja sementara atau sedang mencari pekerjaan. Seseorang yang menganggur tidak memperoleh pendapatan. Semakin besar pengangguran, semakin banyak golongan tenaga kerja yang tidak mempunyai pendapatan. Pengangguran yang terlalu besar dapat menurunkan upah golongan berpendapatan rendah sehingga ketimpangan pendapatan semakin tinggi (Sukirno, 2011). Dalam penelitian Efriza (2014) mengungkapkan bahwa terdapat pengaruh positif antara tingkat pengangguran dan ketimpangan pendapatan. Kemudian, temuan Cysne dan Turchick (2012) yang menemukan bahwa terdapat hubungan positif antara pengangguran dan ketimpangan pendapatan. Apabila pengangguran semakin meningkat, maka ketimpangan pendapatan semakin meningkat. Sedangkan penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian Dewi (2015) yang menemukan bahwa tingkat pengangguran tidak berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia periode 2009-2013.

IPM di suatu daerah menggambarkan kesejahteraan masyarakat secara umum. Peningkatan IPM berarti peningkatan terhadap pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat itu sendiri. Sehingga peningkatan IPM akan menurunkan ketimpangan pendapatan. Hasil penelitian Muhammad Arif dan Rossy Agustin Wicaksana (2017) menunjukkan bahwa IPM berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan. Hal ini dikarenakan IPM menunjukkan kemampuan penduduk dalam mengakses kebutuhan dasarnya sehingga dalam peningkatannya akan mengurangi kesenjangan. Namun hasil studi ini berbeda dengan penelitian Holifah (2017) yang menemukan hasil

IPM tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan antar kabupaten/kota di provinsi Jawa Barat Tahun 2012-2015. Penelitian ini sesuai dengan teori (Todaro dan Smith, 2006) bahwa kenaikan pendapatan yang besar dapat berperan relatif lebih kecil dalam pembangunan manusia. Ketimpangan yang terjadi pada suatu wilayah akan berpengaruh pada tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah itu sendiri. Tidak meratanya Indeks Pembangunan Manusia di berbagai daerah menyebabkan terdapat daerah yang lebih maju karena kualitas manusianya lebih baik dan ada daerah yang tidak maju karena kualitas manusianya rendah.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh jumlah penduduk, tingkat pengangguran dan indeks pembangunan manusia terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012-2019.

LANDASAN TEORI

Teori Ketimpangan Pendapatan

Ketimpangan pendapatan diartikan sebagai perbedaan kemakmuran ekonomi antara yang kaya dengan yang miskin, hal ini tercermin dari adanya perbedaan pendapatan (Baldwin, 1986). Dengan kata lain ketimpangan pendapatan adalah perbedaan jumlah pendapatan yang diterima masyarakat sehingga mengakibatkan perbedaan pendapatan yang lebih besar antar golongan dalam masyarakat tersebut. Akibatnya yang kaya akan semakin kaya dan yang miskin akan semakin miskin. Ketimpangan pendapatan terjadi karena dampak balik lebih kuat dibandingkan dengan dampak sebar yang cenderung lemah di negara-negara berkembang (Jhingan, 1999).

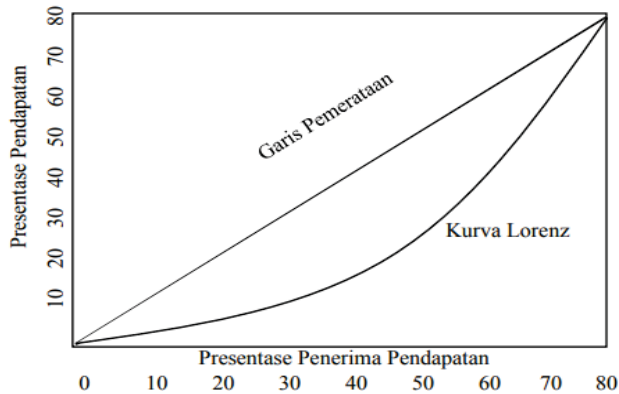
Menurut Kuznets dalam Kuncoro (2006) seorang ekonom klasik menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi di negara miskin pada awalnya cenderung menyebabkan tingginya tingkat kemiskinan dan ketidakmerataan distribusi pendapatan. Namun bila negara-negara miskin tersebut sudah semakin maju, maka persoalan kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan akan menurun (*an inverse U shaped pattern*). Beberapa ekonom pembangunan tetap berpendapat bahwa tahapan peningkatan dan kemudian penurunan ketimpangan pendapatan yang dikemukakan Kuznets tidak dapat dihindari.

Adapun indikator pengukuran ketimpangan pendapatan antara lain sebagai berikut:

a. Kurva Lorenz

Kurva Lorenz menggambarkan distribusi kumulatif pendapatan nasional di kalangan penduduk. Kurva ini terletak di dalam sebuah bujur sangkar yang sisi tegaknya merepresentasikan persentase kumulatif pendapatan nasional, sedangkan sisi datarnya merepresentasikan persentase kumulatif penduduk. Kurvanya ditempatkan pada diagonal bujur sangkar tersebut. Kurva Lorenz yang semakin dekat ke diagonal (semakin lurus) menandakan bahwa distribusi pendapatan nasional yang semakin merata, sebaliknya jika kurva Lorenz semakin jauh dari diagonal (semakin lengkung), maka menunjukkan keadaan yang semakin buruk, dan distribusi pendapatan nasional semakin timpang dan tidak merata (Arsyad, 1997).

Gambar 3 Kurva Lorenz



b. Indeks Gini

Salah satu indikator ketimpangan pendapatan adalah Indeks Gini. Indeks Gini adalah pengukuran distribusi pendapatan penduduk suatu negara. Koefisien Gini atau Indeks Gini digunakan untuk melihat adanya hubungan antara jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh keluarga atau individu dengan total pendapatan. Indeks Gini sebagai ukuran pemerataan pendapatan mempunyai ukuran nilai antara 0 sampai dengan 1. Nilai 0 menunjukkan pemerataan yang sempurna, semakin mendekati angka 0 maka daerah tersebut mengalami pemerataan. Sedangkan semakin mendekati angka 1 menunjukkan bahwa telah terjadi ketimpangan atau ketidakmerataan. Rumus yang digunakan untuk menghitung indeks gini adalah:

$$GR = 1 - \sum f_i [Y_i + Y_{i-1}]$$

Keterangan:

GR : Indeks Gini

f_i : jumlah penerima pendapatan kelas ke i (persen)

Y_i : jumlah kumulatif pendapatan pada kelas ke i (persen)

Tabel 1 Ukuran Nilai Indeks Gini

Nilai Koefisien	Distribusi Pendapatan
<0,4	Tingkat Ketimpangan Pendapatan Rendah
0,4 – 0,5	Tingkat Ketimpangan Pendapatan Sedang
>0,5	Tingkat Ketimpangan Pendapatan Tinggi

Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia.

Ketimpangan Pendapatan Dalam Perspektif Islam

Ketimpangan adalah masalah universal yang dihadapi oleh semua sistem ekonomi modern. Ketidakadilan ekonomi dan ketimpangan pendapatan dan kekayaan merupakan awal dari munculnya masalah kemiskinan. Munculnya konsep pemikiran tentang keadilan distributif dalam ekonomi Islam dimotivasi oleh fakta bahwa teori-teori ekonomi yang sudah ada tidak mampu mengatasi masalah kemiskinan dan ketimpangan pendapatan dan kekayaan. Problem ketidakadilan dan ketimpangan dalam pendistribusian pendapatan dan kekayaan saat ini, tidak bisa dilepaskan dari sistem ekonomi yang masih didominasi oleh sistem ekonomi pasar (kapitalis). Sistem ekonomi pasar (kapitalis) ini, ternyata tidak mampu mewujudkan ekonomi global yang berkeadilan dan berkeadaban, bahkan menciptakan kemiskinan permanen bagi masyarakat sebab sistem ini berimplikasi pada penumpukan harta kekayaan pada segelintir pihak saja.

Merrespon tantangan ketidakadilan dan ketimpangan distribusi tersebut, maka Islam menawarkan sistem distribusi ekonomi yang mengedepankan nilai kebebasan dalam bertindak dengan dilandasi oleh ajaran agama serta nilai keadilan dalam kepemilikan yang disandarkan pada dua sendi, yaitu kebebasan dan keadilan. Sistem distribusi ini

menawarkan mekanisme dalam distribusi ekonomi Islam, yaitu mekanisme ekonomi dan mekanisme non-ekonomi. Mekanisme ekonomi meliputi aktivitas ekonomi yang bersifat produktif, berupa berbagai kegiatan pengembangan harta dalam akad-akad muamalah, seperti membuka kesempatan seluas-luasnya bagi berlangsungnya sebab-sebab kepemilikan individu dan pengembangan harta melalui investasi, larangan menimbun harta, mengatasi peredaran dan pemusatan kekayaan di segelintir golongan, larangan kegiatan monopoli, dan berbagai penipuan dan larangan judi, riba, korupsi dan pemberian suap (Al-Jawi, 2007).

Sedangkan mekanisme non-ekonomi adalah mekanisme yang tidak melalui aktivitas ekonomi produktif melainkan melalui aktivitas non-produktif, seperti pemberian hibah, shodaqoh, zakat dan warisan. Mekanisme non-ekonomi dimaksudkan untuk melengkapi mekanisme ekonomi, yaitu untuk mengatasi distribusi kekayaan yang tidak berjalan sempurna, jika hanya mengandalkan mekanisme ekonomi semata. Mekanisme non-ekonomi diperlukan, baik disebabkan adanya faktor penyebab yang alamiah maupun non-alamiah. Faktor penyebab alamiah, seperti keadaan alam yang tandus atau terjadinya musibah bencana alam. Semua ini akan dapat menimbulkan terjadinya kesenjangan ekonomi dan terhambatnya distribusi kekayaan kepada orang-orang yang memiliki keadaan tersebut (Rahmawati, 2013). Dengan demikian, terdapat beberapa instrumen yang mampu mewujudkan keadilan distributif dalam ekonomi Islam, di antaranya adalah:

Pertama, implementasi zakat. Zakat merupakan instrumen paling efektif dan esensial yang tidak terdapat dalam sistem kapitalisme maupun sosialisme. Secara

ekonomi, zakat berfungsi distributif, yaitu: pendistribusian kembali (redistribusi) pendapatan dari muzakki kepada mustahik serta zakat memungkinkan adanya alokasi konsumsi dan investasi (Amalia, 2008).

Kedua, implementasi sistem bagi hasil dan pengembangan institusi baitul mal. Instrumen penting lainnya dalam proses keadilan distribusi ekonomi adalah sistem bagi hasil (*profit and loss sharing system*). sistem ini dapat membangun pola kerja sama dan persaudaraan antara pemilik modal (*shahib al-mal*) dan pihak yang memiliki skill (*mudharib*) sehingga terdapat transfer kekayaan dan distribusi pendapatan. Sistem bagi hasil akan menggiring para pelakunya untuk bertindak jujur, transparan dan profesional, terutama dalam hal biaya sehingga pembagian keuntungan maupun kerugian diketahui oleh kedua belah pihak dan dibagikan sesuai kesepakatan (Amalia, 2008).

Ketiga, kerjasama dalam struktur pasar bebas. Ekonomi Islam mengedepankan asas kebebasan, termasuk dalam struktur pasar dianut sistem kerja sama yang bebas. Selama kekuatan penawaran dan permintaan berjalan secara alamiah maka harga ditentukan berdasarkan mekanisme pasar sehingga tidak diperkenankan intervensi dari pihak manapun, termasuk pemerintah. Semua orang sesuai dengan potensinya memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan transaksi secara legal sesuai aturan syariah. Untuk itu perlu pengaturan dan pengawasan agar mekanisme pasar berjalan dengan baik dan menghasilkan harga yang adil (Amalia, 2008).

Pendapat ini didasarkan atas kenyataan bahwa Allah sebagai pemilik mutlak kekayaan telah memberi amanat kepada manusia untuk mengatur dan mengolah kekayaan disertai kewenangan untuk memiliki kekayaan tersebut.

Pemilikan harta pada hanya beberapa orang dalam suatu masyarakat akan menimbulkan ketimpangan atau ketidakseimbangan hidup dan preseden/kejadian buruk bagi kehidupan (Nurnasih, 2019). Berikut ini beberapa konsep Islam yang terdapat di dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan alokasi dan distribusi pendapatan antara lain:

- a) Kedudukan manusia yang berbeda antara satu dengan yang lain merupakan kehendak Allah. Di dalam Al-Qur'an telah di jelaskan dalam surat al-An'am (6) ayat 165.
- b) Pemerintah dan masyarakat mempunyai peran penting untuk mendistribusikan kekayaan kepada masyarakat. Hal tersebut juga telah dijelaskan dalam QS. Adz Dzariyat ayat 19.
- c) Islam menganjurkan untuk membagikan harta lewat zakat, sedekah, infaq dan lainnya guna menjaga keharmonisan dalam kehidupan sosial. Hal tersebut dijelaskan dalam QS. Al-Hasyr ayat 7.

Secara umum, Islam mengarahkan mekanisme berbasis moral spiritual dalam pemeliharaan keadilan sosial pada setiap aktivitas ekonomi. Menurut Antonio, pada dasarnya Islam memiliki dua sistem distribusi utama, yakni distribusi secara komersial dan mengikuti mekanisme pasar serta sistem distribusi yang bertumpu pada aspek keadilan sosial masyarakat. Islam menciptakan untuk memastikan keseimbangan pendapatan di masyarakat (Huda, 2015).

Teori Jumlah Penduduk

Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama enam bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari

enam bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Simon dalam Todaro (2000) mengemukakan bahwa penduduk merupakan orang yang bertempat tinggal menetap dalam suatu wilayah. Pengaruh jumlah penduduk pada tingkat moderat pada dasarnya positif dan bermanfaat bagi pembangunan ekonomi, baik bagi negara-negara maju maupun yang sedang berkembang.

Pada umumnya perkembangan penduduk di negara sedang berkembang sangat tinggi dan besar jumlahnya. Masalah jumlah penduduk menyangkut kepentingan pembangunan serta kesejahteraan umat manusia secara keseluruhan. Dalam konteks pembangunan, pandangan terhadap penduduk terpecah dua, ada yang menganggapnya sebagai penghambat pembangunan, ada pula yang menganggap sebagai pemacu pembangunan. Todaro dan Smith (2006) menjelaskan bahwa ada tujuh konsekuensi negatif dari jumlah penduduk, yakni berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan ketimpangan pendapatan, pendidikan, kesehatan, ketersediaan bahan pangan, lingkungan hidup, serta migrasi internasional. Distribusi pendapatan biasanya dapat didefinisikan di dalam kaitannya dengan tingkat rata-rata dari distribusi yang dimaksud.

Teori Pengangguran

Pengangguran merupakan suatu ukuran yang dilakukan jika secara aktif dalam empat minggu terakhir untuk mencari pekerjaan (Kaufman dan Hotchkiss, 1999). Pengangguran merupakan suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi mereka belum dapat memperoleh pekerjaan tersebut (Sadono Sukirno, 1994). Pengangguran

dapat terjadi disebabkan oleh ketidakseimbangan pada pasar tenaga kerja. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja yang ditawarkan melebihi jumlah tenaga kerja yang diminta.

Untuk mengetahui besar kecilnya tingkat pengangguran dapat diamati melalui dua pendekatan antara lain sebagai berikut :

- a. Pendekatan angkatan kerja (*Labor force approach*), besar kecilnya tingkat pengangguran dihitung berdasarkan persentase dari perbandingan jumlah antara orang yang menganggur dan jumlah angkatan kerja.
- b. Pendekatan pemanfaatan tenaga kerja (*Labor utilization approach*), untuk menentukan besar kecilnya tingkat pengangguran yang didasarkan pada pendekatan pemanfaatan tenaga kerja antara lain bekerja penuh (*employed*) dan setengah menganggur (*under-employed*).

Menurut Kaufman dan Hotchkiss (1999) pengangguran akan muncul dalam suatu perekonomian disebabkan oleh tiga hal yaitu proses mencari kerja, kelakuan upah dan efisiensi terhadap upah.

Teori Indeks Pembangunan Manusia

Human development atau pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi manusia (UNDP, 1990). Teori ini dicetuskan oleh UNDP untuk memperbaiki suatu konsep analisis sumber daya manusia yang sebelumnya berlandaskan produk domestik bruto atau rata-rata pendapatan perkapita. Menurut UNDP (1990), pendapatan rata-rata tidak secara detail menggambarkan kondisi sumber daya manusia di suatu wilayah. Hal tersebut disebabkan karena

kesenjangan antara penduduk kaya dan miskin cenderung tinggi, sehingga penduduk yang pada dasarnya miskin akan terdata memiliki kesejahteraan lebih tinggi.

Terdapat beberapa premis dasar pada konsep pembangunan manusia ini antara lain yaitu:

- a) Pada suatu pembangunan harus mengutamakan penduduk sebagai pusat perhatian.
- b) Pada pembangunan diartikan dalam memperbesar berbagai pilihan penduduk, tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan mereka. Sehingga konsep pembangunan manusia harus terpusat pada penduduk secara keseluruhan, bukan hanya pada aspek ekonomi saja.
- c) Pembangunan manusia memperhatikan bukan hanya pada upaya meningkatkan kemampuan (kapabilitas) manusia tetapi juga dalam upaya memanfaatkan kemampuan manusia tersebut secara optimal.
- d) Dalam pembangunan manusia ini didukung oleh empat pilar pokok, yaitu: produktivitas, pemerataan, kesinambungan, dan pemberdayaan.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitiannya.

2. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel yang merupakan gabungan antara data *cross*

section yaitu data dari 6 kabupaten/kota di provinsi Sulawesi Barat dan data *time series* dari tahun 2012-2019. Dalam penelitian ini sumber data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Barat.

3. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis yang digunakan untuk analisis data adalah data panel. Data panel adalah gabungan antara data *cross section* dan *time series*, kemudian regresi yang dilakukan dengan data panel disebut model regresi data panel. Model ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel independen yaitu jumlah penduduk, tingkat pengangguran dan IPM dengan variabel dependen yaitu ketimpangan pendapatan.

Model persamaan regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$KP_t = \beta_0 + \beta_1 JP_{1t} + \beta_2 TP_{2t} + \beta_3 IPM_{3t} + e_t$$

Dimana :

- KP : Ketimpangan Pendapatan
- β_0 : Konstanta
- JP : Jumlah Penduduk
- TP : Tingkat Pengangguran
- IPM : Indeks Pembangunan Manusia
- e : *Error term* atau kesalahan regresi

Metode estimasi akan dilakukan dengan data panel menggunakan pendekatan *common effect*, *random effect* dan atau *fixed effect*, tergantung model mana yang terbaik. Untuk menentukan model regresi terbaik, maka dilakukan pemilihan data. Widarjono (2007) menyatakan bahwa pemilihan teknik estimasi regresi data panel terdapat tiga pengujian, yaitu uji F statistik, uji hausman, dan uji *lagrange*

multiplier (LM).

Setelah diperoleh model yang terbaik, dilanjutkan pada pengujian hipotesis, yaitu uji simultan (uji F) dan uji parsial (uji t). Jika signifikansi t atau $F < 0,05$, maka variabel jumlah penduduk, tingkat pengangguran dan IPM berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan secara simultan atau parsial. Selain uji hipotesis, model regresi baik atau tidak dapat dilihat dari koefisien determinasi. Semakin mendekati angka 1, semakin baik model regresi, karena dapat menjelaskan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan tampilan atau deskripsi daya yang terdiri dari nilai minimum, maksimum, mean (rata-rata) dan standar deviasi dari setiap variabel penelitian. Hasil analisis statistik deskriptif ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 2 Hasil Analisis Deskriptif

	KP	LOGJP	TP	IPM
Mean	0.271250	12.19998	2.300208	62.49750
Median	0.341000	12.00109	2.630000	63.75000
Maximum	0.410000	13.00037	5.510000	67.72000
Minimum	0.000000	11.65432	0.000000	0.000000
Std. Dev.	0.151824	0.426922	1.381940	9.427681
Observations	48	48	48	48

Sumber : data diolah views 10

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan hasil analisis sebagai berikut:

- a. Nilai rata-rata variabel ketimpangan pendapatan (Y) sebesar 0,27 dengan standar, deviasi 0,15. Adapun nilai variabel ketimpangan pendapatan tertinggi sebesar 0,41 dan nilai minimum sebesar 0,00.
- b. Nilai rata-rata variabel jumlah penduduk (X₁) sebesar 12,19, dengan standar deviasi 0,42. Adapun nilai variabel jumlah penduduk tertinggi sebesar 13,00 dan nilai minimum sebesar 11,65.
- c. Nilai rata-rata variabel tingkat pengangguran (X₂) sebesar 2,30, dengan standar deviasi 1,38. Adapun nilai variabel tingkat pengangguran tertinggi sebesar 5,51 dan nilai minimum sebesar 0,00.
- d. Nilai rata-rata variabel indeks pembangunan manusia (X₃) sebesar 62,49, dengan standar deviasi 9,42. Adapun nilai variabel indeks pembangunan manusia tertinggi sebesar 5,51 dan nilai minimum sebesar 0,00.

2. Analisis Regresi Data

a) Uji Spesifikasi Model

1) Uji *Likelihood* (*Chow-Test*)

Uji *Likelihood* (*Chow test*) bertujuan untuk membandingkan model bersifat *fixed effect* atau *common*. Berdasarkan hasil uji *chow* diperoleh hasil berikut:

Tabel 3 Hasil Uji *Likelihood* (*Chow-Test*)

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	3.014252	(5,39)	0.0215
Cross-section Chi-square	15.683577	5	0.0078

Sumber : data diolah *views 10*

Pada pengujian ini menunjukkan bahwa nilai probabilitas F hitung sebesar $0,0215 < \alpha 0,05$), hal ini ber-

arti bahwa hipotesis H_0 ditolak (terima H_1), sehingga dapat disimpulkan bahwa model *fixed effect* lebih baik dibandingkan dengan model *common effect*.

2) Uji Hausman

Uji Hausman digunakan untuk memilih apakah model *fixed effect* atau *random effect*. Berdasarkan hasil uji hausman diperoleh probabilitas sebagai berikut:

Tabel 4 Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	14.235131	3	0.0026

Sumber : data diolah eviews 10

Pada pengujian ini menunjukkan bahwa nilai Prob. Chi-Square sebesar $0,0026 < \alpha 0,05$, hal ini dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak (terima H_1), sehingga dapat disimpulkan bahwa model *fixed effect* lebih baik dibandingkan dengan *random effect*. Setelah uji chow dan uji hausman yang kedua-duanya menunjukkan bahwa model yang paling tepat adalah *Fixed Effect* sehingga uji LM tidak lagi diperlukan. Selanjutnya adalah analisis untuk menguji keseluruhan variabel independen dan pengujian koefisien determinasi (adjusted R^2).

b) Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R Square)

Koefisien determinasi (R^2) untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model untuk menjelaskan variasi dalam variabel dependen. Kelemahan mendasar menggunakan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Setiap tambahan satu variabel independen maka R^2 akan naik terlepas dari apakah variabel tersebut secara signifikan mempengaruhi variabel dependen (memiliki

nilai t signifikan atau tidak). Oleh karena itu, banyak peneliti merekomendasikan menggunakan nilai *adjusted R-squared* ketika mengevaluasi model regresi apa yang terbaik.

Tabel 5 Hasil Estimasi *Fixed Effect*

R-squared	0.393284	Mean dependent var	0.271250
Adjusted R-squared	0.268829	S.D. dependent var	0.151824
S.E. of regression	0.129823	Akaike info criterion	-1.077937
Sum squared resid	0.657301	Schwarz criterion	-0.727086
Log likelihood	34.87048	Hannan-Quinn criter.	-0.945350
F-statistic	3.160055	Durbin-Watson stat	1.307712
Prob(F-statistic)	0.007431		

Sumber : data diolah *reviews 10*

Model regresi penelitian ini menggunakan lebih dari satu variabel independen, maka penelitian ini menggunakan *adjusted R Square* untuk mengetahui persentase kontribusi variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. Kemampuan prediksi rasio tercermin melalui jumlah penduduk, tingkat pengangguran dan indeks pembangunan manusia menunjukkan dampak yang cukup kecil, hal ini berdasarkan tabel 5, menunjukkan nilai *adjusted R-squared* hanya sebesar 0.268829. Nilai ini berarti bahwa 26,88 % perubahan dalam variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel penentu dalam model, sedangkan 72,13 % dipengaruhi oleh variabel lain di luar model

c) Uji F

Statistik uji F menunjukkan apakah semua variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen dengan menggunakan tingkat signifikansi pada α (5%). dalam penelitian ini uji F digambarkan melalui tabel berikut:

Tabel 6 Hasil Uji F

F-statistic	3.160055
Prob(F-statistic)	0.007431

Sumber : data diolah evIEWS 10

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan nilai F-statistik sebesar 3.160055 dengan probabilitas 0.007431. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen yakni jumlah penduduk, tingkat pengangguran dan indeks pembangunan manusia secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel ketimpangan pendapatan.

Hasil persamaan yang terbentuk dari perhitungan regresi bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Setelah mengetahui hasil uji koefisien determinasi (R^2) yang digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model untuk menjelaskan variasi dalam variabel dependen dan Uji F yang menjelaskan bahwa variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Masih diperlukan analisis lebih lanjut yaitu dengan menguji masing-masing koefisien parsial dan signifikansi masing-masing variabel. Hasil estimasi menggunakan model *Fixed Effect* dengan bantuan program komputer EvIEWS versi 10 pada Tabel 7 dapat dibentuk persamaan berikut:

$$KP = -14.11276 + 1.133306 \text{ LOGJP} + 0.006060 \text{ TP} + 0.008700 \text{ IPM} + \text{eit}$$

Tabel 7 Hasil Uji T

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-14.11276	3.970757	-3.554174	0.0010
LOGJP	1.133306	0.321068	3.529806	0.0011

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
TP	0.006060	0.015131	0.400521	0.6910
IPM	0.008700	0.002359	3.688103	0.0007

Sumber : data diolah eviews 10

Uji T-statistik (Parsial)

Uji T-statistik digunakan untuk menunjukkan seberapa besar variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Nilai probabilitas lebih kecil dari α maka menerima H_a dan jika nilai probabilitas lebih besar dari α maka menolak H_a . Adapun hasil pembahasan dan diskusi berdasarkan hasil uji t pada tingkat signifikan 5% dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Ketimpangan Pendapatan

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa koefisien regresi sebesar 1.133306 dengan nilai signifikansi 0.0010 (kurang dari 0.05), yang berarti bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan di Sulawesi Barat. Todaro dan Smith (2006) menjelaskan bahwa ada tujuh konsekuensi dari jumlah penduduk yakni berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan ketimpangan pendapatan, pendidikan, kesehatan, ketersediaan bahan pangan, lingkungan hidup, serta migrasi internasional. Jumlah penduduk yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dapat menyebabkan peningkatan ketimpangan pendapatan apabila penyebaran jumlah penduduknya tidak merata. Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ani Nurlaili, yenni dan Ingra (2016) dan Zulaikha (2018) yang menemukan bahwa jumlah penduduk berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan.

b. Pengaruh Tingkat Pengangguran terhadap Ketimpangan Pendapatan

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa koefisien regresi sebesar 0.006060 dengan nilai signifikansi 0.6910 (lebih besar dari 0.05), yang berarti bahwa tingkat pengangguran tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Sulawesi Barat. Hasil ini mendukung penelitian Hindun dkk (2019) bahwa pengangguran tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. Artinya berapapun angka pengangguran tidak akan berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Sulawesi Barat. Tidak berpengaruhnya pengangguran terhadap ketimpangan pendapatan di Sulawesi Barat dapat disebabkan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah seperti Bantuan sosial dari pemerintah yaitu berbentuk Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Beras Sejahtera (Rastra), Dana Desa, Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Adanya bantuan tersebut dapat meringankan beban masyarakat karena kebutuhan hidup dapat terpenuhi, meskipun masih belum merata di seluruh wilayah Sulawesi Barat. Penelitian ini juga sesuai dengan penelitian Nielson & Alderson (2015) dan Istikharoh, Whinarko & Rian yang menyatakan bahwa pada tahun 1970 dan 1990, pengangguran tidak mempunyai pengaruh terhadap ketimpangan pendapatan.

c. Pengaruh IPM terhadap Ketimpangan Pendapatan

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa koefisien regresi sebesar 0.008700 dengan nilai signifikansi 0.0007 (kurang dari 0.05), yang berarti bahwa IPM berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan

di Sulawesi Barat. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Riska (2015) bahwa IPM berpengaruh signifikan dan positif, dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa salah satu instrumen dari IPM yakni tingkat harapan hidup merupakan faktor kunci dalam penciptaan tenaga kerja yang produktif, tingkat harapan hidup di provinsi Jawa Timur tergolong cukup tinggi sehingga dapat membentuk dan menciptakan tenaga kerja yang produktif dan pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat, namun sayangnya hal tersebut mengelompok hanya di daerah-daerah pusat aktivitas ekonomi, terutama pada daerah sentra/pusat industri atau daerah yang berpendapatan tinggi saja sehingga menyebabkan pertumbuhan yang tidak merata dan memicu terjadinya kesenjangan ekonomi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pemaparan diatas maka dapat disimpulkan bahwa secara simultan jumlah penduduk, tingkat pengangguran dan indeks pembangunan manusia memiliki kemampuan untuk memprediksi ketimpangan pendapatan di Provinsi Sulawesi Barat. Sedangkan secara parsial jumlah penduduk dan indeks pembangunan manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Sulawesi Barat. Sementara tingkat pengangguran tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Sulawesi Barat.

Selanjutnya dari kesimpulan yang telah diberikan, maka dapat diberikan beberapa saran, yaitu hasil penelitian ini menjadi salah satu pertimbangan pemangku kebijakan untuk mengurangi ketimpangan pendapatan melalui indeks pembangunan manusia dengan didukung oleh empat pilar

pokok yaitu produktivitas, pemerataan, kesinambungan, dan pemberdayaan serta perbaikan model untuk penelitian di masa mendatang dengan menambahkan variabel baru serta menambah series datanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, M., & Wicaksani, R. A. (2017). Ketimpangan Pendapatan Provinsi Jawa Timur dan Faktor- faktor yang Mempengaruhinya. *University Research Colloquium*, 323–328.
- Amalia, Euis. (2008). “Potensi dan Persoalan LKMS/ BMT bagi Penguatan UKM dalam Kerangka Keadilan Distributif Ekonomi Islam: Studi LKMS/ BMT di 6 Kota Pulau Jawa”, Makalah disajikan dalam *International Seminar and Symposium on Implementations of Islamic Economics to Positive Economics in the World*, Universitas Airlangga, Surabaya, 1-3 Agustus 2008.
- Baldwin, R. E. (1986). Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi (S. Dianjung, ed.). Jakarta: PT Bina Aksara Jakarta.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Barat.
- Dewi, Lusinda. (2013). Pengaruh Ketimpangan Distribusi Pendapatan, Jumlah Penduduk, Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Jambi. [http://repository.uinjambi.ac.id/1365/1/Lusinda Dewi SES130293](http://repository.uinjambi.ac.id/1365/1/Lusinda%20Dewi%20SES130293)
- Efriza, U. (2014). *Analisis Kesenjangan Pendapatan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur di Era Desentralisasi Fiskal*. <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/107321>

- Hindun, Soejoto, A., & Hariyati. (2019). Pengaruh pendidikan, pengangguran, dan kemiskinan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia, *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan* 8(3), 250-265. <https://doi.org/10.26418/jebik.v8i3.3471>.
- Huda, Nurul. (2015). *Ekonomi Pembangunan Islam*. Kencana: Jakarta.
- Holifah. (2017). *Faktor-Faktor Ketimpangan Pendapatan Antar Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2012-2015* (Skripsi sarjana, Universitas Sunan Kalijaga, 2017). Diambil dari http://digilib.uin-suka.ac.id/26605/1/13810069_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf
- Istikharoh, Prijanto, W. J., & Destiningsih, R. (2018). Analisis Pengaruh Tingkat Pendidikan, Upah Minimum Dan Tingkat Pengangguran Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 -. *Directory Journal of Economic*, 2(1).
- Jhingan, M. . (1999). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Khoirudin, R., & Musta'in, J. L. (2020). Analisis Determinan Ketimpangan Pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Tirtayasa Ekonomika*, 15(1), 17–30. <http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/epb/article/view/8871>
- Kuncoro, Mudrajad. (2003). *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan*. Yogyakarta. UPP AMP YKPN.
- Lestari, S. (2016). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan di Jawa Timur Tahun 2008-2012*. 1–7. <http://repository.unej>.

ac.id/bitstream/handle/123456789/73804/SUSI
LESTARI.pdf?sequence=1

- Matondang, Z. (2018). Pengaruh jumlah penduduk, jumlah pengangguran dan tingkat pendidikan terhadap ketimpangan pendapatan di desa palopat maria kecamatan padangsidimpuan hutaimbaru. *Ihtiyath*, 2(2), 255–270.
- Mankiw, N. G., Quah, E., & Wilson, P. (2014). Pengantar Ekonomi Makro: Principles of Economics an Asian (2nd ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Misanam, Munrokhim, dkk. (2008). Ekonomi Islam. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Nurnasihin, Jafar. (2019). Alokasi Pendapatan Dalam Perspektif Ekonomi Islam. Skripsi. IAIN Bengkulu.
- Nielson, F., & Alderson, A. S. (2015). The Kuznets Curve and The Great U-Turn: Income Inequality in U.S. Counties, 1970 To 1990. *American Sociological Review*, 62(1), 12–33
- Rahmawaty, A. (n.d.). *Upaya Pemerataan Kesejahteraan Melalui Keadilan Distributif*. 1(1), 1–17.
- Saputri, Adelia. (2019). Pengaruh Jumlah Penduduk, Pertumbuhan Ekonomi Dan Upah Minimum Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Provinsi Lampung). Skripsi, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.
- Sadono Sukirno. (1994). Pengantar Teori Ekonomi. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sukirno, S. (2011). Makroekonomi Teori Pengantar. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

- Simon, K. (1955). Economic Growth and Income Inequality. The American Economic Review, XLV March.
- Todaro, Michael P. dan Stephen C. Smith. (2006). Pembangunan Ekonomi. Jilid 1. Edisi 9. Jakarta: Erlangga.
- Todaro, Michael P. (2000). Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga Edisi 7. Jakarta: Erlangga.
- UNDP, (1990). Global Human Development Report. New York: Oxford University Press: Human Resources Department.

PENGARUH PRODUKTIVITAS DAN LUAS PANEN PADI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI SULAWESI TENGGARA

Dr. Abdul Haris

(abdul.haris@uin-suka.ac.id)

Mohammat Saiful Imam

(saifulimammuhammad@gmail.com)

Nasrullah

(naasrulo70@gmail.com)

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara pertanian, dimana pertanian merupakan sektor yang memiliki peranan penting dari keseluruhan perekonomian nasional. Hal ini menunjukkan bahwa banyaknya penduduk atau tenaga kerja yang bekerja pada sektor pertanian dan bagaimana sektor pertanian tersebut mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kemampuan sektor pertanian dalam memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat yang cenderung meningkat dikaitkan dengan sistem produktivitas yang dilakukan.

Sektor ini juga menjadi salah satu komponen utama dalam program dan strategi pemerintah untuk

mengentaskan kemiskinan (Wirawan et al., 2014). Sektor pertanian di Indonesia di masa lampau telah memberikan hasil yang baik dan telah memberikan kontribusi pada perekonomian di Indonesia.

Tanaman padi merupakan tanaman yang penting bagi konsumsi masyarakat Indonesia, karena dari padi menghasilkan nasi yang merupakan makanan pokok sebagian besar penduduk Indonesia. Tanaman padi merupakan tanaman pangan yang banyak dibudidayakan oleh petani di Indonesia. Salah satu faktor yang menentukan tinggi rendahnya produktivitas pertanian dapat dilihat dari tingkat produksi hasil pertanian. Antara lain dapat ditentukan berdasarkan tingkat produksi masing-masing sektor dalam pertanian itu sendiri.

Menurut Adam Smith pertumbuhan ekonomi yaitu proses pertumbuhan dalam jangka panjang secara sistematis serta aspek utama pertumbuhan ekonomi yaitu pertumbuhan output total dan pertumbuhan penduduk, yang di tulis dalam bukunya "*Pertanyaan Tentang Alam dan Penyebab Kekayaan Bangsa*". Menurut Kuznets pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari suatu negara untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Islam mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai perkembangan yang terus-menerus dari faktor produksi secara benar yang mampu memberikan kontribusi bagi kesejahteraan manusia (Muttaqin, 2018).

Standar hidup suatu bangsa dalam jangka panjang tergantung pada kemampuan bangsa tersebut untuk menggapai tingkat produktivitas yang tinggi dan berkesinambungan, hal tersebut digunakan untuk mencapai kualitas produk yang lebih baik dan efisien yang lebih tinggi

dalam proses produksi. Perekonomian yang mengalami perkembangan produktivitas akan cenderung memiliki kemampuan yang tinggi dalam persaingan, baik dalam bentuk harga maupun kualitas dari produk yang dihasilkan (Pasay, 1995). Luas panen adalah luasan tanaman yang dipungut hasilnya setelah tanaman tersebut cukup umur (Badan Pusat Statistik).

Penelitian yang di lakukan oleh (Cahyo, 2020), Pengaruh Tenaga Kerja, Modal, Dan Luas Lahan Terhadap Produktivitas Usaha Tani Padi Sawah Di Tinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam, Penelitian ini memberikan penjelasan bahwa tenaga kerja modal dan luas lahan secara simultan memiliki keterkaitan dan pengaruh terhadap produktivitas petani padi sawah untuk mewujudkan kesejahteraan yang hakiki merupakan dasar sekaligus tujuan utama dari syariat Islam dan merupakan tujuan ekonomi Islam dengan mencapai tujuan didunia dan diakhirat.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh (Gunawan, 2017), Pengaruh Luas Panen, Produktivitas, Konsumsi Beras, Dan Nilai Tukar Petani Terhadap Ketahanan Pangan Di Kabupaten Brebes, Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan analisis regresi diperoleh hasil t_{hitung} untuk luas panen 9.339, produktivitas t_{hitung} sebesar 2.521, padi konsumsi t_{count} sama dengan (-2,110), dan (NTP) t_{count} sama dengan (-3,119). Uji variabel bebas luas panen, produktivitas, konsumsi beras, dan Nilai tukar petani (NTP) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat ketersediaan beras. Upaya meningkatkan ketahanan di Brebes pemerintah di Kabupaten diharapkan lebih memperhatikan kebijakan yang dilakukan, selain itu perlu memperhatikan kesejahteraan petani untuk ketahanan pangan di Kabupaten Brebes tanpa pengorbanan apapun.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh (Wirawan, 2014) Analisis Produktivitas Tanaman Padi di Kabupaten Badung Provinsi Bali, Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel-variabel yang berhubungan positif dengan yield Variabel adalah jumlah rumpun padi, benih, dan pupuk. Sedangkan variabel itu memiliki hubungan negatif adalah ada tidaknya pestisida, serangan hama tanaman. Itu Koefisien determinasi kelima variabel bebas pada hasil genteng beras adalah sebesar 82,1%, dan 17,9% dijelaskan oleh variabel lain. Dengan tingkat kepercayaan 95% lima variabel independen dalam persamaan regresi secara simultan dapat digunakan untuk menjelaskan variabel hasil ubin beras. Semua variabel independen termasuk (1) Jumlah rumpun, (2) jumlah benih; (3) jumlah pupuk; (4) jumlah pestisida, dan (5) apakah ada tanaman Serangan hama berpengaruh nyata terhadap hasil genteng padi. Berdasarkan data primer diperoleh dari 41 sampel petani padi, terdapat selisih yang diperkirakan produksi yang dihasilkan oleh genteng padi sampai ke hasil nyata petani. Rata-rata perkiraannya nilai hasil genteng sebesar 81,66 kg / ha sedangkan produksi riilnya sebesar 69,10 kg / hektar. Hasil estimasi produksi beras lebih tinggi 18,18% dibandingkan produksi sebenarnya. Estimasi ini memberikan estimasi yang lebih tinggi dari dampaknya terhadap beras lokal produksi dan pendapatan petani diperkirakan melebihi Rp 48.500 per are.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Produktivitas dan Luas Panen Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sulawesi Tenggara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah produktivitas dan luas panen padi dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi khususnya

di daerah Sulawesi Tenggara. penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pemerintah dan dapat menjadi literatur review bagi akademisi yang akan melakukan penelitian selanjutnya.

KERANGKA TEORITIS

Produktivitas

Menurut Handoko (2003), “Produktivitas dapat didefinisikan sebagai hubungan masukan-masukan dan keluaran-keluaran suatu sistem produksi”. Pertumbuhan produktivitas relatif stabil sehingga untuk meningkatkan produktivitas diperlukan gairah petani dalam membudidayakan usahatannya (Aldillah, 2015).

Menurut Koirala (2016), yang menguji faktor-faktor yang mempengaruhi luas lahan dimana hasil uji membuktikan bahwa luas tanah, irigasi, dan upah tenaga kerja merupakan faktor yang signifikan mempengaruhi produksi. Faktor yang dapat mempengaruhi luas lahan dapat dilihat dari luas tanah, irigasi dan berapa upa yang diberikan faktor tersebut yang dapat mempengaruhi nilai produksi yang dilakukan.

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi yaitu proses perubahan perekonomian dalam suatu negara yang berkesinambungan atau proses berubahnya keadaan perekonomian mejadi lebih baik dalam periode tertentu.

Menurut Sukirno (2002), dalam penelitian Binti (2016), pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah

dan kemakmuran masyarakat meningkat. Sehingga pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi.

Secara umum teori pertumbuhan ekonomi menurut para ahli dapat dibagi menjadi dua, yaitu: Teori pertumbuhan ekonomi historis dan teori pertumbuhan ekonomi klasik dan neoklasik. Aliran historis berkembang di Jerman dan kemunculannya merupakan reaksi terhadap pandangan kaum klasik yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dipercepat dengan revolusi industri, sedangkan aliran historis menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dilakukan secara bertahap. Pelopor aliran historis antara lain, Frederich List, Karl Bucher, Bruno Hildebrand, Wegner Sombart, dan W.W. Rostow.

Sedangkan menurut Teori pertumbuhan Ekonomi klasik (Adam Smith, David Ricardo dan T.R.Malthus) ada 4 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu: jumlah penduduk, jumlah stok barang-barang modal, luas tanah dan kekayaan alam, serta tingkat teknologi yang digunakan. Dalam teori pertumbuhan mereka, dimisalkan luas tanah dan kekayaan alam adalah tetap jumlahnya dan tingkat teknologi tidak mengalami perubahan. Berdasarkan kepada teori pertumbuhan ekonomi neo klasik menjelaskan bahwa ada perkaitan di antara pendapatan per kapita dan jumlah penduduk. Teori tersebut dinamakan teori penduduk optimum. Teori pertumbuhan klasik dapat dilihat bahwa apabila terdapat kekurangan penduduk, produksi marjinal adalah lebih tinggi daripada pendapatan per kapita. Akan tetapi apabila penduduk semakin banyak, hukum hasil

tambahan yang semakin berkurang akan mempengaruhi fungsi produksi yaitu produksi marginal akan mulai mengalami penurunan (Binti, 2016).

Produksi

Konsep produksi dalam terminologi ekonomi, memiliki beberapa perbedaan. Dalam istilah konvensional, produksi didefinisikan sebagai proses mengolah sumber daya menjadi produk/barang jadi (Hakim, 2012). Sedangkan menurut Joesron dan Fathorozi produksi merupakan hasil akhir dari pemanfaatan input dalam proses produksi (Setiawan & Prajanti, 2011).

Jadi, menurut sudut pandang ekonomi konvensional, orientasi produksi merupakan pengubahan input menjadi output, sehingga memiliki nilai guna dalam kehidupan. Berbeda dengan ekonomi konvensional, dalam literatur ekonomi Islam, istilah produksi berasal dari bahasa Arab “al-intaj” yang secara harfiah berarti “ijadul silatin” (menciptakan atau mengadakan sesuatu) (Sumar'in, 2013). Secara terminologi, produksi berarti aktivitas manusia dalam memanfaatkan sumber-sumber ekonomi yang disediakan oleh Sang Khaliq guna menciptakan atau menambah manfaat yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia (Adesy, 2016).

Fungsi Produksi

Fungsi produksi (production function) adalah suatu fungsi yang menggambarkan hubungan fisik atau teknis antara jumlah penggunaan input dan jumlah output yang dihasilkan. Fungsi produksi menunjukkan hubungan teknis yang merubah faktor produksi (sumberdaya) menjadi produk (komoditi). Fungsi produksi merupakan suatu

persamaan matematik yang menggambarkan berbagai kemungkinan produksi yang dapat dihasilkan dari satu set faktor produksi tertentu pada suatu waktu tertentu dan pada tingkat teknologi tertentu pula (Karmini, 2018).

Produksi dalam Perpektif Ekonomi Islam

Definisi produksi dalam perspektif Ekonomi Islam menurut tokoh Islam sebagai berikut :

- a. Kahf mendefinisikan kegiatan produksi dalam perspektif Islam sebagai usaha manusia untuk memperbaiki tidak hanya kondisi fisik materialnya, tetapi juga moralitas, sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup sebagaimana digariskan dalam agama Islam, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat (Ali, 2013).
- b. Mannan menekankan pentingnya motif altruisme (altruism) bagi produsen yang Islami sehingga ia menyikapi dengan hati-hati konsep Pareto Optimality dan Given Demand Hypothesis yang banyak dijadikan sebagai konsep dasar produksi dalam ekonomi konvensional.
- c. Rahman menekankan pentingnya keadilan dan pemerataan produksi (distribusi produksi secara merata).
- d. Al-Haq menyatakan bahwa tujuan dari produksi adalah memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang merupakan fardlu kifayah yaitu kebutuhan yang bagi banyak orang pemenuhannya bersifat wajib.
- e. Siddiqi mendefinisikan kegiatan produksi sebagai penyediaan barang dan jasa dengan memperhatikan nilai keadilan dan kebajikan/kemanfaatan (mashlahah) bagi masyarakat. Dalam pandangannya sebagai produsen telah bertindak adil dan membawa kebajikan bagi masyarakat maka ia telah bertindak Islami.

Faktor Produksi dalam Islam

Faktor produksi dalam Islam secara teori terbagi menjadi empat, yaitu sebagai berikut:

a. Sumber Daya Alam

Allah Swt menciptakan alam yang di dalamnya mengandung banyak sekali kekayaan yang bisa dimanfaatkan manusia. Manusia sebagai makhluk Allah hanya bisa mengubah kekayaan tersebut menjadi barang kapital atau pemenuhan yang lain. Menurut ekonomi Islam jika alam dikembangkan dengan kemampuan dan teknologi yang baik, maka Alam dan kekayaan yang terkandung di dalamnya tidak akan terbatas. Berbeda dengan pandangan ilmu ekonomi konvensional, yang menyatakan kekayaan alam terbatas karena kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Islam memandang kebutuhan manusialah yang terbatas dan hawa nafsu yang tidak terbatas.

b. Tenaga Kerja

Tenaga kerja menentukan kualitas dan kuantitas suatu produksi. Dalam Islam tenaga kerja tidak terlepas dari moral dan etika dalam melakukan produksi agar tidak merugikan orang lain. Dan sebagai tenaga kerja mereka memiliki hak untuk mendapatkan gaji atas kerja yang telah mereka lakukan. Bahkan Allah Swt mengancam tidak akan memberikan perlindungan di hari kiamat pada orang yang tidak memberikan upah pada pekerjanya. Memberikan upah yang layak dalam syariat Islam tidaklah mudah, para ahli memiliki perbedaan pendapat mengenai upah ini, ada yang berpendapat penentuan upah adalah standart cukup, maksudnya sebatas dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ada

juga yang berpendapat penentuan upah bergantung pada kontribusi mereka pada produksi. Sebagian berpendapat penentuan upah dengan melihat manfaat yang diberikan dan tidak menzalimi pekerja. Menurut al-Nabani berpendapat penentuan upah berdasarkan keahliannya.

c. Modal

Modal adalah segala kekayaan baik yang berwujud uang maupun bukan uang (gedung, mesin, perabotan dan kekayaan fisik lainnya) yang dapat digunakan dalam menghasilkan output. Pemilik modal harus berupaya memproduktifkan modalnya dan bagi yang tidak mampu menjalankan usaha, Islam menyediakan bisnis alternatif seperti Mudhārabah, Musyārakah, dan lain-lain.

d. Produksi

Dalam sebuah produksi hendaknya terdapat sebuah organisasi untuk mengatur kegiatan dalam perusahaan. Dengan adanya organisasi setiap kegiatan produksi memiliki penanggung jawab untuk mencapai suatu tujuan perusahaan. Diharapkan semua individu dalam sebuah organisasi melakukan tugasnya dengan baik sesuai dengan tugas yang diberikan (Diana, 2008).

e. Luas Lahan

Faktor produksi tanah dalam pertanian di Indonesia memiliki kedudukan yang paling penting. Mubyarto (1985) menyatakan, tanah sebagai salah satu faktor produksi yang merupakan pabrik dari hasil – hasil pertanian yaitu tempat dimana produksi terjadi dan darimana hasil produksi dihasilkan. Luas tidaknya lahan pertanian mempengaruhi besarnya tingkat hasil

produksi pertanian. Sebagai faktor produksi, tanah mendapat bagian dari hasil produksi karena jasanya dalam produksi itu.

METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Pengumpulan Data

Data yang digunakan merupakan data panel dengan periode tahunan mulai dari tahun 2019-2020. Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah keseluruhan data pertumbuhan ekonomi yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Dalam penelitian ini juga mengambil variabel produktivitas dan luas panen padi.

2. Populasi dan Sampel

Populasi dan sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah provinsi Sulawesi Tenggara yang meliputi 15 Kabupaten dan 2 Kota, Kabupaten Bombana, Kabupaten Buton, Kabupaten Buton Selatan, Kabupaten Buton Tengah, Kabupaten Buton Utara, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Kolaka Timur, Kabupaten Kolaka Utara, Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Kepulauan, Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Konawe Utara, Kabupaten Muna, Kabupaten Muna Barat, Kabupaten Wakatobi, Kota Baubau dan Kota Kendari.

3. Definisi Operasional Variabel

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel dependen (Y), sedangkan untuk variabel independen adalah Produktivitas (X1) dan Luas Panen Padi (X2).

a. Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Tadoro Pertumbuhan ekonomi suatu bangsa terdapat tiga komponen penentu utama yaitu: (i) akumulasi modal yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik, dan sumber daya manusia; (ii) pertumbuhan penduduk yang meningkatkan jumlah angkatan kerja di tahun-tahun mendatang; (iii) kemajuan teknologi. Menurut Kuznets pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari suatu negara untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas itu sendiri terjadi oleh adanya kemajuan atau penyesuaian-penyesuaian teknologi, kelembagaan dan ideologis terhadap berbagai tuntutan keadaan yang ada (Ma'ruf & Wihastuti, 2008). Pertumbuhan ekonomi merupakan proses atau keadaan yang terjadi dikarenakan naiknya tingkat produksi dan pendapatan negara.

b. Produktivitas

Secara umum yang dimaksud dengan produktivitas kerja adalah perbandingan antara hasil yang di capai (output) dengan keseluruhan sumber daya yang digunakan (input). Konsep produktivitas dikembangkan untuk mengukur besarnya kemampuan menghasilkan nilai tambah atas komponen masukan yang digunakan. Produktivitas ini adalah salah satu alat ukur untuk menilai suatu usaha atau perusahaan dalam menilai hasil pekerjaan yang telah dicapai.

c. Luas Panen Padi

Berdasarkan BPS (2016) luas panen adalah luas tanaman pangan yang dapat dipanen selama beberapa

tahun. Luas panen merupakan faktor produksi kedua yang sangat berperan penting karena jika luas tanaman yang dapat dipanen tinggi maka semakin tinggi pula produksi padi yang diperoleh (Ekaputri, 2015). Luas panen adalah salah satu pendukung tingginya tingkat produksi yang dihasilkan sehingga apabila luas lahan yang dikelola sangat luas maka akan menghasilkan hasil produksi yang tinggi.

4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis yang digunakan untuk analisis data adalah data panel. Data panel adalah gabungan antara data *cross section* dan *time series*, kemudian regresi yang dilakukan dengan data panel disebut model regresi data panel.

Metode estimasi akan dilakukan dengan data panel menggunakan pendekatan common effect, random effect dan atau fixed effect, tergantung model mana yang terbaik. Untuk menentukan model regresi terbaik, maka dilakukan pemilihan data. Widarjono (2007) menyatakan bahwa pemilihan teknik estimasi regresi data panel terdapat tiga pengujian, yaitu uji F statistik, uji hausman, dan uji lagrange multiplier (LM).

1) Uji F Statistik

Uji F statistik digunakan untuk memilih model apa yang terbaik antara model Common Effect dan Fixed Effect. Uji F statistik disini merupakan uji perbedaan dua regresi menggunakan uji chow. Hipotesis yang dirumuskan dalam pengujian ini sebagai berikut:

Ho: Model Common Effect

Ha: Model Fixed Effect

Jika nilai probabilitas F hitung lebih kecil dari α (0.05), maka menolak H_0 dan berarti model Fixed Effect lebih baik. Sebaliknya jika nilai probabilitas F lebih besar dari α (0.05), maka gagal menolak H_0 dan berarti model Common Effect lebih baik.

2) Uji Hausman

Uji hausman digunakan untuk memilih model apa yang terbaik antara model Fixed Effect dan Random Effect. Uji hausman ini mengikuti distribusi chi-square dengan degree of freedom sebanyak k, dimana k adalah jumlah variabel independen. Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H_0 : Model Fixed Effect lebih baik

H_a : Model Random Effect lebih baik

Jika pada pengujian menunjukkan hasil signifikan (Prob. Chi-Square $< \alpha$ 0,05), artinya menolak H_0 maka yang dipilih adalah Fixed Effect. Sebaliknya, jika tidak signifikan (Prob. Chi-Square $> \alpha$ 0,05), artinya gagal menolak H_0 maka model yang terbaik adalah Random Effect. Jika model yang dipilih pada uji hausman adalah model Random Effect, maka dilakukan uji pemilihan yang ketiga, yaitu uji LM. Namun jika model yang dipilih adalah model Fixed Effect, maka dilanjutkan pada interpretasi model regresi, yaitu uji hipotesis dan koefisien determinasi.

3) Uji Lagrange Multiplier (LM)

Uji lagrange multiplier digunakan untuk memilih antara model Common Effect dan Random Effect. Uji LM ini didasarkan pada distribusi chi-square dengan degree of freedom sebesar jumlah variabel independen. Pengujian ini dilakukan dengan hipotesis sebagai berikut:

Ho: Model Common Effect

Ha: Model Random Effect

Jika pada pengujian menunjukka signifikan (Prob. Chi-Square < α 0,05), artinya menolak Ho maka model yang dipilih adalah Random Effect. Sebaliknya, jika pada pengujian menunjukkan hasil tidak signifikan (Prob. Chi-Square > α 0,05), artinya gagal menolak Ho maka model yang dipilih adalah Common Effect.

Setelah diperoleh model yang terbaik, dilanjutkan pada pengujian hipotesis, yaitu uji simultan (uji F) dan uji parsial (uji t). Jika signifikansi t atau F < 0,05, maka variabel Human Development Index, Investasi, Pertumbuhan Penduduk Dan Inflasi berpengaruh Terhadap Kemiskinan secara simultan atau parsial. Selain uji hipotesis, model regresi baik atau tidak dapat dilihat dari koefisien determinasi. Semakin mendekati angka 1, semakin baik model regresi, karena dapat menjelaskan pengaruh variabel bebas terhadap varibel terikat.

Adpun model regresi data penel yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam peneltian ini yaitu sebagai berikut.

$$\text{PDRBit} = \alpha + \beta_1\text{Pit} + \beta_2\text{LPPit} + e$$

Dimana:

PDRB = Pertumbuhan Ekonomi

i = Kabupaten Kota

t = Waktu (2019-2020)

α = Konstanta

LPP = Luas Panen Padi

P = Produktivitas

e = error

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Uji statistik Deskriptif

Pada tahap ini dilakukan untuk memberikan gambaran terkait data yang digunakan pada penelitian ini. Adapun hasil uji statistik deskriptif dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel Hasil Uji Statistik Deskriptif

	PDRB	X1_P_	X2_LP_
Mean	45.84412	32.38500	7803.853
Median	40.40000	36.25500	1596.885
Maximum	128.1100	45.12000	50586.12
Minimum	16.82000	0.000000	0.000000
Std. Dev.	23.60686	13.53583	12834.99

Sumber Data: *Eviews* (Data diolah)

Hasil uji statistik deskriptif menunjukkan bahwa dalam 3 tahun, mean (nilai rata-rata) sebesar 45.84 dengan nilai minimum sebesar 16.82, dan nilai maximum sebesar 128.11 serta nilai Standar Deviasiasi sebesar 23.6

2. Uji Model

Uji model dilakukan untuk memilih salah satu model (Common Effect, Fixed Effect, dan Random Effect) yang kemudian akan digunakan dalam penelitian ini. Adapun hasil uji model disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel Hasil Uji Model

Uji Model	Nilai Prob.	Keterangan
Uji Chow	(0.0000)	Fixed (Terbaik)
Uji Hausmant	(0.2077)	Random (Terbaik)
Uji Lagrange Multiplier (LM)	(0.0000)	Random (Terbaik)

Sumber Data: *Eviews* (Data diolah)

Pada uji model dilakukan perbandingan antara Common Effect dan Fixed Effect melalui uji Chow. Adapun hasilnya yaitu nilai prob $< 5\%$, maka model fixed effect lebih baik daripada common effect. Kemudian model fixed effect dibandingkan dengan random effect melalui uji Hausman. Hasil yang didapatkan yaitu nilai prob $> 5\%$, maka model random effect lebih jika dibandingkan dengan model fixed effect. Sehingga dilakukan uji Lagrange Multiplier (LM) untuk membandingkan model random effect dengan common effect. Adapun hasilnya yaitu, nilai prob $< 5\%$, maka model random effect lebih baik daripada common effect. Jadi dapat disimpulkan bahwa pada penelitian ini menggunakan pendekatan model random effect sebagai model terbaik.

3. Regresi Random Effect

Setelah dilakukan pengujian model, maka pada penelitian ini menggunakan pendekatan model random effect sebagai model terbaik. Adapun hasil regresi model random effect disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel Hasil Regresi Random Effect Model

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	37.66718	6.627690	5.683304	0.0000
X1_P__	0.144022	0.094336	1.526687	0.1370
X2_LP__	0.000450	0.000220	2.049634	0.0489
R-squared	0.212849	Mean dependent var		1.030816
Adjusted R-squared	0.162065	S.D. dependent var		0.854481
S.E. of regression	0.782181	Sum squared resid		18.96603
F-statistic	4.191266	Durbin-Watson stat		1.822986
Prob(F-statistic)	0.024485			

Sumber data: *Eviews* (Data diolah)

a. Pengaruh Produktivitas Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, produktivitas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Tenggara, hal ini bisa dilihat dari hasil regresi bahwa hasil koefisien 0.144022 memiliki hubungan positif, kemudian tidak berpengaruh signifikan dilihat dari nilai prob sebesar 0.1370 lebih kecil dari tingkat alfa 5%.

Pengaruh produktivitas terhadap pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan yang positif. Hal ini bisa dilihat bahwa produktivitas memiliki dampak bagi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Teori produksi dalam ilmu ekonomi membedakan analisisnya kepada dua pendekatan berikut (Sukirno, 2013):

1. Teori produksi dengan satu faktor berubah

Teori produksi yang sederhana menggambarkan tentang hubungan di antara tingkat produksi suatu barang dengan jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk menghasilkan berbagai tingkat produksi barang tersebut. Dalam analisis ini faktor faktor produksi lain dianggap tetap jumlahnya yaitu modal, tanah dan teknologi.

2. Teori produksi dengan dua faktor berubah

Dalam analisis ini dimisalkan terdapat dua jenis faktor produksi yang dapat diubah jumlahnya yaitu tenaga kerja dan modal dimana kedua faktor produksi tersebut dapat dipertukarkan tukarkan penggunaannya.

Secara umum yang dimaksud dengan produktivitas kerja adalah perbandingan antara hasil yang di capai

(output) dengan keseluruhan sumber daya yang digunakan (input). Konsep produktivitas dikembangkan untuk mengukur besarnya kemampuan menghasilkan nilai tambah atas komponen masukan yang digunakan. Pada dasarnya produktivitas mencakup sikap mental patriotik yang memandang hari depan secara optimis dengan berakhir pada keyakinan diri. Dalam doktrin pada konferensi Oslo 1984, definisi umum produktivitas adalah suatu konsep yang bersifat universal yang bertujuan untuk menyediakan lebih banyak manusia dengan menggunakan sumber sumber riil yang makin sedikit. (Sinungan, 2009)

b. Pengaruh Luas Panen Padi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, luas panen padi berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Tenggara. Hal tersebut didapatkan dari hasil regresi bahwa luas lahan padi dengan koefisien 0.000450 dan nilai prob 0.0489 dimana lebih kecil dari tingkat alfa.

Hasil ini menunjukkan bahwa pengaruh luas panen padi memiliki hubungan positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Temuan ini sejalan dengan teori yang digunakan bahwa luas lahan merupakan salah satu faktor utama dalam peningkatan produksi padi yang pada gilirannya juga bisa meningkatkan kesejahteraan petani padi. Akan tetapi saat ini peranannya semakin berkurang disebabkan karena menyusutnya lahan pertanian, Transformasi lahan ini berdampak pada perubahan tingkat kesejahteraan petani yang juga ikut menurun (Wahed, 2015).

Menurut Gopinath et al. (1996) disebutkan bahwa produksi padi pada dasarnya tergantung pada dua variabel

yaitu luas panen dan hasil per hektar, disamping itu, produsen selalu berusaha untuk mencapai keuntungan yang maksimum yang pada gilirannya secara otomatis akan meningkatkan kesejahteraan petani (Budiono, 1998).

Luas lahan sangat mempengaruhi hasil produksi, karena apabila lahan semakin luas maka penawaran beras akan semakin besar, sebaliknya apabila luas lahan semakin sempit maka produksi padi akan semakin sedikit. Jadi hubungan luas lahan dengan produksi padi adalah positif.

KESIMPULAN

Berdasarkan estimasi regresi random effect model yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa secara simultan variabel produktivitas tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Tenggara, kemudian secara persial variabel luas panen padi berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Dari hasil penelitian ini bisa memberikan pertimbangan kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara bahwa perlu meningkatkan kembali produktivitas pertanian utamanya pada konsumsi pangan padi dan dilakukan pengelolaan dengan **baik** sehingga dapat menampah pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Adanya keterbatasan dalam penelitian ini, adanya pertimbangan dan perbaikan untuk penelitian selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan tema yang serupa. Penelitian selanjutnya bisa mengambil di provinsi lain ataukah lebih luas lagi sehingga nantinya ada perbandingan yang dapat dikaitkan dengan penelitian sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aldillah, R. (2015). Proyeksi produksi dan konsumsi kedelai Indonesia. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*.
- Ali, M. (2013). "Volume 7, No. 1, Juni 2013." *Prinsip Dasar Produksi Dalam Ekonomi Islam*, 7(1), 19–35.
- Binti, M. T. (2016). Analisa Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penurunan Tingkat Kemiskinan Di Kalimantan Tengah. *Jurnal Komunikasi, Bisnis, Manajemen*, 69–78.
- Cahyono. (2020). *Pengaruh Tenaga Kerja, Modal, Dan Luas Lahan Terhadap Produktivitas Usaha Tani Padi Sawah Di Tinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam*.
- Gunawan, C. I. (2017). Pengaruh Luas Lahan, Produktivitas Konsumsi Beras, dan Nilai Tukar Petani Terhadap Ketahanan Pangan di Kabupaten Brebes. *Universitas Negeri Semarang*, 1–97.
- Handoko, T. H. (2003). Manajemen edisi 2. *Yogyakarta: BPFE*.
- Karmini. (n.d.). *Ekonomi Produksi Pertanian*.
- Koirala, K. H., Mishra, A., & Mohanty, S. (2016). Impact of land ownership on productivity and efficiency of rice farmers: The case of the Philippines. *Land Use Policy*, 50, 371–378.
- Ma'ruf, A., & Wihastuti, L. (2008). Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: Determinan dan Prospeknya. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 9(1), 44–55. <https://doi.org/10.18196/jesp.9.1.1526>
- Muttaqin, R. (2018). Pertumbuhan Ekonomi dalam Perspektif Islam. *MARO: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 1(2), 117–122. <https://doi.org/10.31949/mr.v1i2.1134>

- Pasay, H. A. (1995). Produktivitas, Sumber Daya, dan Teknologi. *Dalam Anwar M. Arsyad, Dkk., Prospek Ekonomi Indonesia Jangka Pendek: Sumber Daya, Teknologi, Dan Pembangunan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.*
- Sinungan, M. (2009). Produktivitas apa & Bagaimana. *Jakarta. Bumi Aksara.*
- Sukirno, S. (2002). Pengantar Teori Makro Ekonomi Edisi Kedua. *Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.*
- Wahed, M. (2015). Pengaruh luas lahan, produksi, ketahanan pangan dan harga gabah terhadap kesejahteraan petani padi di Kabupaten Pasuruan. *Jesp*, 7(1), 68–74.
- Wirawan, K. A., Susrusa, I. K. B., & Ambarawati, I. (2014). *Analisis Produktivitas Tanaman Padi di Kabupaten Badung Provinsi Bali Rice Productivity Analysis in Badung Bali Province Pendahuluan*. 2(1), 76–90.

DETERMINASI VARIABEL-VARIABEL TATA KELOLA PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH DI KAWASAN INDONESIA TIMUR

Dr. M. Yazid Afandi

(mukhamad.afandi@uin-suka.ac.id)

Ahmad Kholid Ubaidillah

(19208012028@student-uin.suka.ac.id)

Muhammad Al Faridho Awwal

(19208012029@student-uin.suka.ac.id)

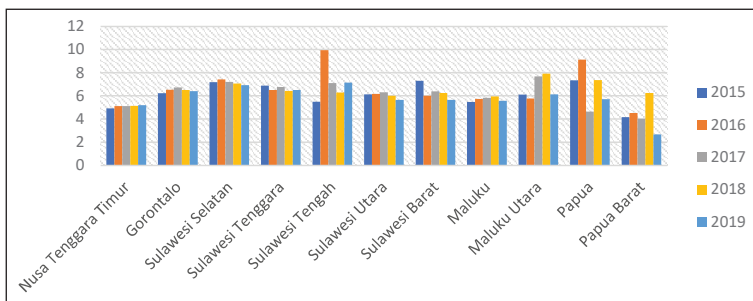
PENDAHULUAN

Pemerintah Daerah adalah kepanjangan tangan dari Pemerintah Pusat dalam mengelola administrasi di sebuah kawasan atau daerah. Pemerintah Daerah dapat menetapkan berbagai kebijakan untuk mengatur daerahnya agar dapat mencapai kesejahteraan bagi masyarakat di daerah tersebut. Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan berpengaruh terhadap kemajuan suatu daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif atau memenuhi prinsip *value for money* serta partisipasi, trans-

Determinasi Variabel-Variabel Tata Kelola Pemerintah dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Kawasan Indonesia Timur

paransi, akuntabilitas, dan keadilan akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi (Arsa, 2015). Kinerja ekonomi suatu daerah dapat diukur dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang merupakan proses peningkatan dalam kapasitas suatu bangsa dalam jangka panjang untuk memproduksi aneka barang dan jasa bagi rakyatnya. Setiap daerah memiliki tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi biasanya diikuti dengan kesejahteraan rakyat yang semakin tinggi pula.

Gambar 1. Grafik Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kawasan Indonesia Timur



Sumber: Bappenas, data diolah.

Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi daerah di kawasan Indonesia Timur mengalami perubahan yang fluktuatif yang cenderung konstan pada lima tahun terakhir. Namun pada Provinsi Papua mengalami pergolakan yang cukup signifikan. Hal ini karena masih belum konsistennya pemerintah dalam mengelola sumber daya untuk memaksimalkan pendapatan daerah.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak bisa didapat begitu saja, terdapat peran pemerintah sangat vital.

Tata kelola pemerintah yang baik akan mengarah pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi, karena pemerintah dianggap telah mampu memaksimalkan sumber daya juga telah mampu menerapkan sistem pemerintahan yang baik. Terdapat banyak variabel yang dapat memproyeksikan tata kelola pemerintah, di antaranya adalah demokrasi.

Kelembagaan yang baik tercermin dari demokrasi yang berjalan dengan seutuhnya. Demokrasi sebagai satu perangkat dari kelembagaan formal, redistribusi kekuasaan dan pegangan hidup. Demokrasi merupakan hal yang didambakan masyarakat karena mendorong pembangunan, tata kelola yang baik dan sejalan dengan hak asasi manusia. Demokrasi dan tata kelola keuangan memiliki peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi (Kaldor dan Vejvoda, 2002). Demokrasi memberikan hak kepada masyarakat untuk melakukan kritik kepada pemerintah yang tidak kompeten, tidak efisien dan korup dalam menjalankan tata kelola pemerintahan khususnya yang terkait dengan pengelolaan keuangan negara. Rivera-Batiz (2002) mendefinisikan demokrasi sebagai “apakah suatu negara memiliki *checks and balances* pada kekuasaan eksekutif, proses konstitusional dan jaminan, kebebasan pers dan tidak adanya sensor, peradilan dan hukum yang jelas dan efektif struktur, batasan masa jabatan, dan transparansi, keterbukaan dan masukan warga dalam pembuatan kebijakan”. Demokrasi adalah faktor non ekonomi atau faktor internal pemerintah yang dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah.

Faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi pada proksi tata kelola pemerintah adalah pengeluaran pemerintah (*government expenditure*). Namun besar dan kecilnya pengeluaran pemerintah sangat bergantung

pada pendapatan daerah yang terdiri atas pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK) dan Pengeluaran Pemerintah (Arina, Koleangan, & Engka, 2019). Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan asli dari daerah itu sendiri baik dari pajak, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan alam, dan pendapatan lain (Suparmoko, 2002). Pendapatan asli daerah yang tinggi merupakan cerminan dari *good governance* pada pemerintahan suatu daerah. Hal tersebut dapat dikatakan karena pemerintahan telah mampu mengoptimalkan segala sumber daya yang ada untuk memperoleh hasil yang maksimal. Sehingga semakin tinggi pendapatan asli daerah juga akan menaikkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Di samping pendapatan asli daerah, aliran dana dari pemerintah pusat juga turut andil dalam upaya menaikkan laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Melalui UU No. 32 tahun 2004, pemerintah telah mengalokasikan dana yang bersumber dari APBN kepada pemerintah daerah dalam bentuk dana alokasi umum (DAU). Penyaluran DAU oleh pemerintah pusat dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan pada setiap daerah. Selain itu, melalui UU No. 33 tahun 2004 pemerintah pusat juga mengalokasi dana dalam bentuk dana alokasi khusus (DAK) yang dimaksudkan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Namun besarnya dana yang telah dialokasikan oleh pemerintah pusat seharusnya berada pada pemerintahan yang baik. Sehingga harapannya dapat menunjang laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

Pada penelitian sebelumnya, Yolanda (2019), dan L.M. Putriet.al. (2020) mendapatkan hasil bahwa demokrasi

berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang artinya, setiap terjadi peningkatan nilai Indeks Demokrasi maka pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat. Sedangkan pada penelitian Salahodjaev (2015) demokrasi di berbagai negara cenderung menghasilkan hasil yang beragam.

Penelitian yang dilakukan oleh Arina (2019) menyatakan bahwa PAD berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil ini menjadi dasar bahwa PAD mampu menjadi penopang dalam memicu pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Anwar (2018). Namun hasil penelitian tersebut bertolak belakang pada penelitian yang dilakukan Dewi (2017) dan Faradisi (2015) yang menyatakan bahwa PAD berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun untuk DAU dan DAK tidak berpengaruh secara signifikan. Hasil tersebut berbeda dengan penelitian Dewi (2017) dan Faradisi (2015) yang menyatakan bahwa DAK berpengaruh negatif.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Determinasi Variabel-variabel Tata Kelola Pemerintah dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kawasan Indonesia Timur”. Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah tata kelola pemerintah yang baik mampu memicu dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam menambah literatur review bagi akademisi dan juga dapat berkontribusi dalam upaya pembangunan berkelanjutan.

TINJAUAN TEORITIS

Teori Institusional (*Institutional Theory*)

Scot dalam Hessels dan Terjesen (2008) menyatakan bahwa kelembagaan merupakan struktur sosial yang telah mencapai ketahanan tertinggi dan terdiri dari budaya kognitif, normatif, dan regulatif yang sarat dengan perubahan. Elemen-elemen ini secara bersama-sama mempengaruhi kegiatan dan sumber daya untuk memberikan stabilitas dan makna bagi kehidupan sosial. Dalam upaya memberikan stabilitas ini maka sebuah lembaga perlu memperhatikan unsur-unsur seperti *rules*, *norms*, *cultural benefit*, peran dan sumber daya material. Hal inilah yang dapat membentuk komitmen organisasi dalam memberikan stabilitas melalui berbagai kebijakan dan program yang ada.

Teori kelembagaan menggambarkan hubungan antara organisasi dengan lingkungannya, tentang bagaimana dan mengapa organisasi menjalankan sebuah struktur dan proses serta bagaimana konsekuensi dari proses kelembagaan yang dijalankan tersebut (Meyer dan Rowan, 1977). Scott dalam Villadsen (2011) menyatakan bahwa teori ini dapat digunakan untuk menjelaskan peran dan pengambilan keputusan dalam organisasi bahwa struktur, proses dan peran organisasi sering kali dipengaruhi oleh keyakinan dan aturan yang dianut oleh lingkungan organisasi. Misalnya organisasi yang berorientasi pada layanan publik, dalam pengambilan keputusan sudah tentu dipengaruhi oleh keyakinan dan aturan yang berlaku di pemerintah pusat, pemerintah daerah dan lingkungan masyarakat. Berangkat dari hal ini, maka dapat dijelaskan bahwa organisasi atau pemerintah sebagai pihak yang menerapkan kebijakan harus memiliki komitmen yang

kuat dalam menjalankan tugasnya agar tujuan akhir seperti kesejahteraan masyarakat dari sebuah kebijakan dapat tercapai.

Good Governance

United Nations Development Programme (UNDP) (1999) mengartikan pemerintahan sebagai pelaksanaan ekonomi politik, dan otoritas administratif untuk mengatur urusan negara di semua tingkatan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemerintahan memiliki tiga pokok penting yaitu ekonomi, politik, dan administrasi. Ekonomi meliputi proses pembuatan keputusan dalam pelaksanaan aktivitas ekonomi suatu negara dan interaksi antar pelaku ekonomi. Politik berkaitan dengan proses formulasi kebijakan. Sedangkan administratif berkaitan dengan implementasi kebijakan. Sehingga dari situ dapat diketahui terdapat tiga komponen institusi yang saling berkaitan yaitu pemerintahan (*state*), dunia usaha (*private sector*), dan masyarakat (*society*). Ketiga komponen tersebut harus berkerja secara berdampingan tanpa ada upaya untuk mendominasi satu sama lain (Rasul, 2009).

Sementara arti *good* dalam *good governance* sendiri mengandung makna nilai yang menjunjung tinggi keinginan dan kehendak rakyat sehingga dapat mencapai tujuan dalam pembangunan yang berkelanjutan dan keadilan (Rasul, 2009). Selain itu, dari aspek fungsional pemerintahan yang baik dapat dikatakan sebagai pemerintahan yang efektif dan efisien dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan (LAN & BPKP, 2000). Sedangkan UNDP sendiri mengartikan *good governance* sebagai suatu hubungan yang sinergis dan konstruktif di antara pemerintahan dan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 101 tahun 2000

tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil, pemerintah yang baik yang menerapkan prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisien, efektivitas, supremasi hukum, dan dapat diterima seluruh masyarakat.

Good governance merupakan paradigma dan sistem peradabanyang luhur dalam penyelenggaraan negara. Untuk mewujudkan *good governance* dalam tata kelola keuangan, pemerintah harus berkomitmen untuk menjalankan pemerintah yang baik dengan menjalankan prinsip *good governane* secara konsisten. Ketika pemerintah mampu melaksanakan prinsip *good governance* maka di situ dapat memicu pada pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

Teori Keagenan

Teori keagenan menyatakan bahwa hubungan keagenan diikat pada sebuah kontrak persetujuan antara prinsipal dan agen, di mana prinsipal memberikan wewenang kepada agen dalam menentukan kebijakan atas nama prinsipal (Jensen & Meckling, 1976). Dalam teori keagenan memungkinkan terdapat perbedaan kepentingan antara agen dan prinsipal, di mana pihak agen bisa saja lebih mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan prinsipal. Biaya pengawasan yang mahal menyebabkan agen memiliki kebebasan dalam menjalankan fungsinya sehingga cenderung akan lebih mengedepankan kepentingan pribadi dari pada kepentingan prinsipal (Hopkin, 1997).

Pendekatan keagenan dapat dilihat pada hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, maupun hubungan pemerintah daerah dengan masyarakat. Pemerintah pusat telah mempunyai menjalankan peran sebagai agen dengan melimpahkan dana perimbangan berupa

Dana Akasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) kepada daerah akibat dari pelimpahan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya sendiri. Tanpa adanya transparansi maka akan menimbulkan asimetri informasi pada pemerintah daerah dan masyarakat atas pelimpahan dana dari pemerintah pusat. Asimetri informasi akan mendorong *moral hazard* pada agen atau pemerintah daerah untuk melakukan tindakan yang berlawanan dengan kepentingan prinsipal atau masyarakat (Rahayuningtias & Setyaningrum, 2017). Masyarakat telah memberikan sumber daya kepada pemerintah daerah berupa pajak, retribusi, dan sebagainya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga pemerintah daerah seharusnya memberikan pelayanan publik yang memadai kepada masyarakat seperti dengan penanggulangan kemiskinan dengan peningkatan lapangan kerja, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Teori *Fiscal Federalism*

Teori *fiscal federalism* menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dicapai dengan cara pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal (Hayek, 1945; Musgrave, 1959; Oates, 1972). Desentralisasi fiskal merupakan pelimpahan kewenangan terkait dengan pengambilan keputusan kepada pemerintah daerah. Melalui otonomi daerah, pemerintah pusat menyalurkan dana perimbangan dalam bentuk DAU dan DAK sebagai konsekuensi dari pelimpahan wewenang kepada pemerintah daerah. Pemerintah pusat menganggap pemerintah daerah lebih mengerti tentang karakteristik dan potensi dari daerahnya sendiri sehingga akan lebih fokus dalam upaya pengelolaan

daerah, sehingga dapat pada akhirnya dapat dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut.

Pentingnya Tata Kelola Pemerintahan dalam Islam

Secaraetimologi, pemerintahan berasal dari kata dasar “pemerintah” berarti melakukan pekerjaan menyeluruh. Penambahan awalan “pe” menjadi “pemerintah” berarti badan yang melakukan kekuasaan memerintah. Penambahan akhiran “an” menjadi “pemerintahan” berarti perbuatan, cara, hal atau urusan badan yang memerintah tersebut (Sirajuddin, 2007). Pemerintahan memang tidak identik dengan negara, karena negara bersifat statis, sedangkan pemerintahan bersifat dinamis. Namun antara negara dengan pemerintahan tidak dapat dipisah karena pemerintahlah yang berfungsi melaksanakan urusan-urusan kenegaraan. Suatu pemerintahan menentukan corak sistem yang dianut oleh negara, apakah teokrasi, nomokrasi dan sebagainya. Corak pemerintahan melahirkan bentuk sebuah negara. Bentuk negara menjadi penting bila pemerintah suatu negara menjadi mesin kekuasaan yang dijalankan oleh seorang pemimpin.

Paikah (2019) menyatakan bahwa sistem pemerintahan yang dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW dan *khulafau rasidin* menjadi panutan dan teladan dalam pengelolaan negara. Hukum Islam telah memberikan konsep tata negara dengan profesional dan berkeadilan. Pemerintah Islam harus mampu memberikan pemahaman agama dan sekaligus memberikan keamanan dan pelayanan yang terbaik untuk rakyatnya. Menurut Zayyadi (2017) kajian *good governance* menjadi kontribusi tersendiri bagi pengembangan tata kelola birokrasi pemerintahan yang lebih baik sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai dalam hukum Islam seperti nilai kesetaraan, tasâmuh (toleransi),

keadilan (*justice*), kemaslahatan, musyawarah (*syûrâ*), kejujuran (*honesty*), objektif (*comprehensiveness*) dan seterusnya menjadi indikasi terbentuknya pemerintahan yang bersih dan baik (*good and clean governance*).

Zuhdi dan Afdhilla (2020) menyatakan keefisienan dan keefektivitasan penerapan *good governance* dalam pelaksanaan administrasi negara yang ditinjau dengan perspektif Islam. Karena dapat membantu memberikan kontribusi bagi pengembangan tata kelola administrasi negara dan birokrasi pemerintahan yang lebih baik sesuai dengan perspektif Islam. Ghofur (2020) dalam penelitiannya menyatakan bahwa terdapat banyak kecocokan antara indeks tata kelola yang diterbitkan oleh Bank Dunia dan ajaran Islam.

Fungsi pemerintahan dalam Islam, yaitu menegakkan perintah Allah SWT. Menegakkan Islam, Alquran telah menugaskan kepada pemerintahan Islam supaya memusnahkan syirik dan menguatkan Islam. Mendirikan salat dan mengambil zakat, menyuruh *ma'ruf* dan melarang yang *munkar*, mengurus kepentingan-kepentingan manusia dalam batas hukum-hukum Allah SWT (Hasjm, 1984). Menurut Al-Mawardi dalam Al-Ahkam Al-Shulthaniyah ketaatan di dalam sebuah negara kepada pemerintah adalah hal mutlak, selagi perintahnya tidak bertentangan dengan syariat Islam.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Pengumpulan Data

Data yang digunakan merupakan data panel dengan periode tahunan dari tahun 2011-2019. Data yang digunakan adalah keseluruhan data pertumbuhan ekonomi Provinsi di wilayah Indonesia Timur yang diperoleh dari

Badan Pusat Statistik (BPS). Peneliti menggunakan variabel tata kelola pemerintah yang diproyeksikan pada Indeks Demokrasi Indonesia yang juga diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), selain itu juga diproyeksikan pertumbuhan ekonomi, PAD, DAU, DAK dan pengeluaran pemerintah yang diperoleh dari Kementerian Keuangan, Bappenas, dan juga BPS.

Populasi dan Sampel

Populasi dan sampel dalam penelitian adalah seluruh provinsi yang berada pada wilayah Indonesia Timur yaitu Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat dan Papua.

Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel berupa sampel jenuh dikarenakan sampel sama dengan populasi Data yang digunakan sebagai sampel berupa data pertumbuhan ekonomi provinsi yang berada pada wilayah Indonesia Timur, IDI, DAU, DAK, PAD dan pengeluaran pemerintah. Semua data dalam bentuk tahunan dengan 9 data per provinsi meliputi 11 provinsi pengamatan dengan total data sebanyak 99 data penelitian.

Definisi Operasional Variabel

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi sebagai variabel dependen (Y), sedangkan untuk variabel independen adalah IDI (X₁), DAU (X₂), DAK (X₂), PAD (X₄), dan pengeluaran pemerintah (X₅).

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi menerangkan atau mengukur dari perkembangan suatu perekonomian. Dalam

kegiatan perekonomian yang sebenarnya pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan fiskal produksi barang dan jasa yang berlaku di suatu negara, seperti pertambahan dan jumlah produksi barang dan industri, perkembangan infrastruktur, pertambahan produksi sektor jasa dan pertambahan produksi barang modal (Sukirno, 2004). Rumus PDB adalah sebagai berikut:

$$PDB = C + G + I + (X-M)$$

PDB adalah produk domestik bruto, C adalah konsumsi rumah tangga, G adalah konsumsi pemerintah, I adalah investasi, X adalah ekspor, dan M adalah impor. Pada penelitian ini pertumbuhan ekonomi diproyeksikan dengan pertumbuhan PDRB. Data yang digunakan diperoleh dari BPS. Satuan yang digunakan adalah persen.

b. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan alat untuk menakar perkembangan demokrasi di tingkat provinsi. IDI digunakan untuk memperoleh dasar terukur untuk penyusunan program pembangunan politik untuk pemerintah pusat maupun daerah. Perhitungan IDI dapat dilakukan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$IDI = \sum_{i=1}^3 P_i I(A_i)$$

IDI adalah indeks demokrasi Indonesia, P_i adalah nilai penimbang dari aspek ke i , $I(A_i)$ adalah indeks aspek ke i , i adalah 1=aspek kebebasan sipil, 2=aspek hak-hak politik, 3=aspek lembaga demokrasi. IDI yang digunakan penelitian ini adalah IDI provinsi di Indonesia Timur. Satuan yang digunakan adalah satuan indeks.

c. Dana Alokasi Umum (DAU)

Menurut UU No. 32 tahun 2004, DAU adalah dana yang bersumber dari APBN yang bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. DAU ditetapkan minimal 25% dari penerimaan Dalam Negeri. 10% untuk DAU daerah provinsi, 90% untuk DAU daerah kabupaten/kota. DAU yang digunakan dalam penelitian adalah DAU provinsi pada Indonesia Timur. Satuan yang digunakan adalah milyar rupiah.

d. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Pengertian DAK diatur dalam Undang-undang Nomor 33 Pasal 1 ayat 23 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Keuangan Pusat dan Keuangan Daerah, yang menyebutkan bahwa Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK yang digunakan pada penelitian adalah DAK provinsi di Indonesia Timur. Satuan yang digunakan adalah milyar rupiah.

e. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat berasal dari pendapatan asli daerah itu sendiri, pendapatan asli daerah yang berasal dari pembagian pendapatan asli daerah, dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, pinjaman daerah, dan pendapatan daerah yang lainnya yang sah. Selanjutnya pendapatan

asli daerah terdiri dari pajak dan retribusi daerah, keuntungan perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah (Suparmoko, 2002, p. 55). PAD yang digunakan dalam penelitian adalah PAD provinsi pada Indonesia Timur. Satuan yang digunakan adalah milyar rupiah.

f. Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah di mana jika pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Semakin besar dan banyak kegiatan pemerintah maka pengeluaran pemerintah juga akan semakin besar. Pengeluaran pemerintah dalam penelitian ini adalah pengeluaran pemerintah provinsi di Indonesia Timur. Satuan yang digunakan adalah milyar rupiah.

Teknis Analisis Data

Pengujian statistik penelitian ini menggunakan metode estimasi data panel. Model regresi data panel umumnya dapat dirumuskan dalam bentuk persamaan sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \dots + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

$i = 1, 2, 3, \dots, N$ (dimensi *cross section*)

$t = 1, 2, 3, \dots, T$ (dimensi *time series*)

Y_{it} = variabel dependen pada unit i dan waktu t

α = konstanta

β = konstanta dari variabel bebas pada unit i dan waktu t

ε_{it} = *error*

Jika setiap *cross section* unit memiliki jumlah observasi *time series* yang sama maka disebut sebagai *balanced panel*. Sebaliknya, jika jumlah observasi berbeda untuk setiap *cross section* unit disebut *unbalanced panel*.

Kesulitan yang mungkin ditemukan dalam mengestimasi data panel ialah dalam mengidentifikasi *t – rations* atau *f – stat* dari model regresinya yang dapat terjadi saat hanya sedikit jumlah observasi *cross section* dengan banyak data *time series*. Maka dapat dilakukan beberapa pendekatan dalam mengefisiensi perhitungan model regresi data panel (Gujarati, 2003).

Penelitian ini menggunakan enam variabel. Adapun variabel tersebut adalah pertumbuhan PDRB sebagai variabel dependen (Y), sedangkan untuk variabel independen adalah IDI (X_1), DAU (X_2), DAK (X_3), PAD (X_4), dan pengeluaran pemerintah (X_5). Model persamaan metode estimasi data panel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$\text{LnPDRB}_{it} = \alpha + \beta_1 \text{IDI}_{it} + \beta_2 \text{LnDAU}_{2it} + \beta_3 \text{LnDAK}_{3it} + \beta_4 \text{LnPAD}_{4it} + \beta_5 \text{LnPengeluaran}_{6it} + \varepsilon_{it}$$

Beberapa model yang dapat digunakan untuk estimasi data panel adalah *Common Effect Model*, *Fixed Effect Model*, dan *Random Effect Model* (Gujarati, 2003; Widarjono, 2013). Pengujian akan dilakukan menggunakan *software* evIEWS. Untuk melakukan pemilihan model terbaik akan dilakukan tiga pengujian yaitu *Chow Test*, *Hausman Test*, dan *LM Test*.

a. Common Effect Model

Model *common effect* merupakan model sederhana dengan menggabungkan seluruh data *time series* dan

cross section, selanjutnya dilakukan estimasi model dengan menggunakan OLS (*Ordinary Least Square*). Model ini menganggap bahwa *intercept* dan *slope* dari setiap variabel sama untuk setiap obyek observasi . Dengan kata lain, hasil regresi ini dianggap berlaku untuk semua kabupaten/kota pada semua waktu. Kelemahan model ini adalah ketidaksesuaian model dengan keadaan sebenarnya. Kondisi setiap obyek dapat berbeda dan kondisi suatu objek satu waktu dengan waktu yang lain dapat berbeda (Ghozali & Ratmono, 2013). Model *common effect* dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \varepsilon_{it}$$

b. Fixed Effect Model

Pendekatan efek tetap (*Fixed effect*). Salah satu kesulitan prosedur panel data adalah bahwa asumsi *intercept* dan *slope* yang konsisten sulit untuk dipenuhi. Dalam mengatasi hal tersebut pada panel data, menggunakan variabel boneka (*dummy variable*) untuk menerangkan terjadinya perbedaan nilai parameter yang berbeda-beda baik lintas unit maupun antar waktu (Ghozali & Ratmono, 2013). Pendekatan dengan memasukkan variabel *dummy* ini dikenal dengan sebutan *fixed effect* atau dikenal sebagai *Least Square Dummy Variabel* (LSDV). Model *fixed effect* dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 D_{3i} + \varepsilon_{it}$$

c. Random Effect Model

Model efek tetap atau *fixed effect* model membedakan perbedaan individu dan waktu ditunjukkan lewat *intercept*, maka pada model *random* perbedaan tersebut

diakomodasi melalui *error*. Model *random effect* menggunakan *error* yang diduga memiliki hubungan antar waktu dan antar individu. Maka dari itu, *random effect* mengasumsikan bahwa setiap individu memiliki perbedaan *intercept* yang merupakan variabel *random* (Ghozali & Ratmono, 2013). Model *random effect* secara umum dituliskan sebagai berikut:

$$Y^{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + U_{it}$$

d. Pemilihan Model

Pemilihan model terbaik dilakukan melalui beberapa kali pengujian yaitu menggunakan uji chow dan uji hausman, selain itu juga menggunakan *LM-test* jika diperlukan. Uji chow adalah pengujian *F Statistics* untuk memilih apakah model yang digunakan *Pooled Least Square* (PLS) atau *fixed effect*. Sedangkan untuk memilih model *fixed effect* atau *random effect* digunakan uji hausman (Ghozali & Ratmono, 2013). Berikut ini penjelasan mengenai uji-uji tersebut:

1) Uji Chow

Uji chow dilakukan untuk menentukan metode *fixed effect* atau *common effect* yang digunakan pada penelitian dengan melihat probabilitas dari *F-statistic* (Gujarati, 2003). Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut:

H_0 = Metode *common effect*

H_1 = Metode *fixed effect*

2) Uji Hausman

The Hausman Specification Test digunakan untuk membandingkan pemilihan metode *fixed effect* dengan metode *random effect* dengan melihat probabilitas *F-statistic* (Gujarati, 2003). Hipotesis yang

digunakan adalah sebagai berikut:

H_0 = Metode *random effect*

H_1 = Metode *fixed effect*

3) *LM-test*

Lagrange Multiplier Test digunakan untuk membandingkan metode yang dipilih adalah *random effect* atau *common effect* dengan melihat probabilitas *cross section*. Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut:

H_0 = Metode *random effect*

H_1 = Metode *common effect*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif

Analisis statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan dalam menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul. Menurut Ghazali (2009) analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran atau mendeskripsikan data dalam variabel yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), minimum, maksimum dan standar deviasi. Statistik deskriptif adalah statistika yang digunakan dalam mendeskripsikan data menjadi informasi yang lebih jelas serta mudah dipahami yang memberikan gambaran mengenai penelitian berupa hubungan dari variabel-variabel independen dan dependen. Hasil penelitian analisis statistik deskriptif dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1. Analisis Deskriptif

Variabel	N	Min	Max	Mean	Std. Dev
Pertumbuhan PDRB (Persen)	99	1,72	11,65	6,541515	1,652523

**Determinasi Variabel-Variabel Tata Kelola Pemerintah dalam Meningkatkan
Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Kawasan Indonesia Timur**

Variabel	N	Min	Max	Mean	Std. Dev
IDI (Indeks)	99	52,61	83,94	69,04263	6,787833
DAU (Milyar)	99	441578,8	2616545	1230560	502227,9
DAK (Milyar)	99	24008,33	2816520	480802,5	620690,2
PAD (Milyar)	99	84811,59	4133011	790664,7	830642,1
Pengeluaran (Milyar)	99	744622,5	14134106	4077514	3245729
Valid N	99				

Sumber: Badan Pusat Statistik dan Bappenas, data diolah

Pertumbuhan PDRB dari 99 buah sampel diketahui bahwa nilai minimum sebesar 1,72, nilai maksimum sebesar 11,65, nilai *mean* dari periode 2011-2019 sebesar 6,54, serta nilai standar deviasi sebesar 1,65 artinya nilai *mean* pertumbuhan PDRB periode 2011-2019 lebih besar dari nilai standar deviasi sehingga penyimpangan data yang terjadi rendah maka penyebaran nilainya merata

IDI dari 99 buah sampel diketahui bahwa nilai minimum sebesar 52,61, nilai maksimum sebesar 83,94, nilai *mean* dari periode 2011-2019 sebesar 69, serta nilai standar deviasi sebesar 6,78 artinya nilai *mean* IDI periode 2011-2019 lebih besar dari nilai standar deviasi sehingga penyimpangan data yang terjadi rendah maka penyebaran nilainya merata

DAU dari 99 buah sampel diketahui bahwa nilai minimum sebesar 441578,8 nilai maksimum sebesar 2616545, nilai *mean* dari periode 2011-2019 sebesar 1230560, serta nilai standar deviasi sebesar 502227,9 artinya nilai *mean* DAU periode 2011-2019 lebih besar dari nilai standar deviasi sehingga penyimpangan data yang terjadi rendah maka penyebaran nilainya merata

DAK dari 99 buah sampel diketahui bahwa nilai minimum sebesar 24008,33 nilai maksimum sebesar 2816520, nilai *mean* dari periode 2011-2019 sebesar

480802,5, serta nilai standar deviasi sebesar 620690,2 artinya nilai standar deviasi DAK periode 2011-2019 lebih besar dari nilai *mean* sehingga penyimpangan data yang terjadi cukup tinggi.

PAD dari 99 buah sampel diketahui bahwa nilai minimum sebesar 84811,59 nilai maksimum sebesar 4133011, nilai *mean* dari periode 2011-2019 sebesar 790664,7, serta nilai standar deviasi sebesar 830642,1 artinya nilai standar deviasi periode 2011-2019 lebih besar dari nilai *mean* sehingga penyimpangan data yang terjadi cukup tinggi.

Pengeluaran pemerintah dari 99 buah sampel diketahui bahwa nilai minimum sebesar 744622,5 nilai maksimum sebesar 14134106, nilai *mean* dari periode 2011-2019 sebesar 4077514, serta nilai standar deviasi sebesar 3245729 artinya nilai standar deviasi pengeluaran pemerintah periode 2011-2019 lebih besar dari nilai *mean* sehingga penyimpangan data yang terjadi cukup tinggi.

Analisis Data Panel

a. Uji Chow

Uji chow dilakukan untuk menentukan metode *fixed effect* atau *common effect* yang digunakan pada penelitian dengan melihat probabilitas dari *F-statistic* (Gujarati, 2003). Hasil uji chow adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Uji Chow

<i>Effects Test</i>	<i>Statistic</i>	<i>Prob.</i>
<i>Cross-section F</i>	1,724342	0,0887
<i>Cross-section Chi-square</i>	18,687319	0,0444
*p<0.10, **p<0.05, ***p<0.01		

Sumber: *Eviews*, data diolah

Jika nilai probabilitas statistik $>$ dari *alpha* 5%, maka menerima H_0 , sehingga model terbaik adalah *command effect model*, sedangkan jika nilai probabilitas statistik $<$ dari *alpha* 5%, maka menolak H_0 , sehingga model terbaik adalah *fixed effect model*. Tabel di atas menjelaskan bahwa nilai probabilitas statistik adalah $0,0887 >$ dari *alpha* 5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa *command effect model* adalah model terbaik.

b. Uji Hausman

The Hausman Specification Test digunakan untuk membandingkan pemilihan metode fixed effect dengan metode random effect dengan melihat probabilitas *F-statistic* (Gujarati, 2003). Hasil uji hausman adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Uji Hausman

Test Summary	Shi-Sq. Statistic	Prob.
<i>Cross-section Random</i>	5,231589	0,3883
*p<0.10, **p<0.05, ***p<0.01		

Sumber: *Eviews*, data diolah

Jika nilai probabilitas statistik $>$ dari *alpha* 5%, maka menerima H_0 , sehingga model terbaik adalah *random effect model*, sedangkan jika nilai probabilitas statistik $<$ dari *alpha* 5%, maka menolak H_0 , sehingga model terbaik adalah *fixed effect model*. Tabel diatas menjelaskan bahwa nilai probabilitas statistik adalah $0,3883 >$ dari *alpha* 5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa *random effect model* adalah model terbaik.

c. Uji Lagrange Multiplier (LM-test)

Lagrange Multiplier Test digunakan untuk membandingkan metode yang dipilih adalah *random effect*

atau *common effect* dengan melihat probabilitas *cross section*. *LM test* digunakan jika uji chow dan uji hasuman tidak menunjukkan hasil yang sama. Hasil *LM test* adalah sebagai berikut:

Tabel 4. *LM-test*

	<i>Test Hypothesis</i>		
	<i>Cross-section</i>	<i>Time</i>	<i>Both</i>
<i>Breusch-Pagan</i>	0,351718 (0,5531)	1,090227 (0,2964)	1,441944 (0,2298)
*p<0.10, **p<0.05, ***p<0.01			

Sumber: *Eviews*, data diolah

Jika nilai probabilitas statistik > dari *alpha* 5%, maka menerima H_0 , sehingga model terbaik adalah *random effect model*, sedangkan jika nilai probabilitas statistik < dari *alpha* 5%, maka menolak H_0 , sehingga model terbaik adalah *command effect model*. Tabel di atas menjelaskan bahwa nilai probabilitas statistik adalah 0,5531 > dari *alpha* 5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa *random effect model* adalah model terbaik.

d. Estimasi *Random Effect Model*

Berdasarkan uji chow, uji hasuman, dan *LM test* menunjukkan bahwa model terbaik yang digunakan dalam penelitian ini adalah *random effect model*. Model *random effect* adalah model statistik data panel yang menggunakan *error* sebagai penduga penelitian memiliki hubungan antar waktu dan antar individu. Maka dari itu, *random effect* mengasumsikan bahwa setiap individu memiliki perbedaan *intercept* yang merupakan variabel *random* (Ghozali & Ratmono, 2013). Hasil estimasi *random effect model* adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Estimasi *Random Effect Model*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	19,27562	9,258647	2,081905	0,0401**
IDI	-0,109403	0,028007	-3,906232	0,0002***
LnDAU	0,892743	1,187587	0,751729	0,4541
LnDAK	-0,022319	0,186173	-0,119884	0,9048
LnPAD	1,300906	0,318374	4,086097	0,0001***
LnPengeluaran	-2,309949	0,576179	-4,009078	0,0001***
<i>Number of Observation</i>	99			
<i>F-Statistic</i>	7,599714			
<i>F-Prob</i>	0,000005			
<i>Adjusted R-squared</i>	0,251900			
*p<0.10, **p<0.05, ***p<0.01				

Sumber: *Eviews*, data diolah

Berdasarkan tabel di atas dapat diperoleh beberapa hasil pengujian sebagai berikut:

- 1) R^2 (Koefisien Determinasi) menunjukkan seberapa besar variabel-variabel independen berupa IDI, DAU, DAK, PAD, pengeluaran pemerintah mampu menjelaskan variabel dependen berupa pertumbuhan ekonomi. Hasil *adjusted R-squared* sebesar 0,25 yang artinya bahwa 25% variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen dan sisanya sebesar 75% dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar penelitian yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.
- 2) Uji statistik F dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen secara simultan atau bersama-sama mempengaruhi variabel dependen atau tidak. Hasil uji F menunjukkan nilai 7,599714 dengan probabilitas 0,00005. berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- 3) Uji-t atau hipotesis untuk mengetahui pengaruh varia-

bel independen secara individu terhadap variabel dependen.

- a) Konstanta memiliki nilai koefisien sebesar 19,27562 dan probabilitas $0,0401 < \alpha 5\%$, sehingga dapat disimpulkan bahwa konstanta berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Koefisien 19,27562 menunjukkan bahwa jika besaran setiap variabel independen adalah sama maka nilai dari pertumbuhan ekonomi adalah 19,27562 persen.
- b) IDI memiliki nilai koefisien sebesar -0,109403 dan probabilitas $0,0002 < \alpha 5\%$, sehingga dapat disimpulkan bahwa IDI berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Koefisien -0,109403 menunjukkan bahwa jika IDI naik satu indeks, maka pertumbuhan ekonomi akan turun sebesar 0,109403 persen.
- c) DAU memiliki nilai koefisien sebesar 0,892743 dan probabilitas $0,4541 > \alpha 5\%$, sehingga dapat disimpulkan bahwa DAU tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
- d) DAK memiliki nilai koefisien sebesar -0,022319 dan probabilitas $0,9048 > \alpha 5\%$, sehingga dapat disimpulkan bahwa DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
- e) PAD memiliki nilai koefisien sebesar 1,300906 dan probabilitas $0,0001 < \alpha 5\%$, sehingga dapat disimpulkan bahwa PAD berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Koefisien 1,300906 menunjukkan bahwa jika PAD naik satu milyar, maka pertumbuhan ekonomi akan naik sebesar 1,300906 persen.

- f) Pengeluaran pemerintah memiliki nilai koefisien sebesar -2,309949 dan probabilitas $0,0001 < \alpha$ 5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Koefisien -2,309949 menunjukkan bahwa jika pengeluaran pemerintah naik satu milyar, maka pertumbuhan ekonomi akan turun sebesar 2,309949 persen.

PEMBAHASAN

Pengaruh Indeks Demokrasi Indonesia terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hipotesis pertama (H_1) menyatakan bahwa indeks demokrasi berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi indeks demokrasi menunjukkan keadaan demokrasi pada wilayah tersebut semakin membaik. Hal ini tentunya sejalan dengan pengelolaan pemerintah yang baik akan membuat masyarakat lebih mudah melakukan kegiatan ekonomi. Pemerintah yang baik dan demokratis dapat menyalurkan program-program yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Hasil uji-t menunjukkan bahwa indeks demokrasi berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa H_1 ditolak.

Indeks demokrasi merupakan sebuah indikator untuk menunjukkan keberhasilan pada suatu wilayah. Semakin tinggi indeks demokrasi menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam mengayomi masyarakat. Rendahnya indeks demokrasi menunjukkan bahwa pemerintah dapat dikatakan gagal dalam menjalankan tugasnya sebagai

perwakilan rakyat. Hasil penelitian menunjukkan perbedaan antara hipotesis dan hasil. Hipotesis menghendaki indeks demokrasi mampu menaikkan pertumbuhan ekonomi, namun hasil menunjukkan sebaliknya. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa kenaikan indeks demokrasi belum mampu menaikkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia Timur. Hal ini terjadi karena indeks demokrasi pada Indonesia Timur masih tergolong rendah.

Tabel 6. Indeks Demokrasi Indonesia Menurut Aspek Tahun 2019

Provinsi	Kebebasan Sipil	Provinsi	Hak Politik	Provinsi	Lembaga Demokrasi
Sumatera Barat	56.58	Papua Barat	50.31	Papua	52.61
Jawa Barat	65.16	Papua	51.16	Papua Barat	53.23
Kalimantan Selatan	68.01	Sulawesi Tenggara	52.18	Maluku Utara	58.11
Sulawesi Selatan	68.32	Maluku	53.21	Maluku	64.55
Papua Barat	70.35	Banten	55.62	Sulawesi Tenggara	66.90

Sumber: Badan Pusat Statistik, data diolah

Berdasarkan data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa beberapa provinsi di Indonesia Timur berada pada indeks paling rendah dari semua provinsi di Indonesia dalam beberapa aspek indeks demokrasi seperti aspek kebebasan sipil, aspek hak-hak politik, dan aspek lembaga demokrasi. Aspek hak-hak sipil tahun 2019 Provinsi Papua Barat memiliki nilai terendah yaitu 50,31, aspek lembaga demokrasi tahun 2019 Provinsi Papua memiliki nilai terendah yaitu 52,61, namun pada aspek kebebasan sipil tahun 2019 beberapa provinsi di Indonesia Timur memiliki nilai yang cukup baik di mana Provinsi Papua Barat berada pada posisi lima dengan

nilai 70,35. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa beberapa pemerintahan di Indonesia Timur belum mampu memberikan hak demokrasi kepada masyarakat, hal tersebut akan berakibat pada elektabilitas pemerintah. Jika tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah kurang, maka kegiatan ekonomi tidak akan berjalan secara sempurna yang berakibat pada PDRB yang rendah.

Hasil ini sejalan dengan penelitian Putri & Triani (2020) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan satu arah indeks demokrasi terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hipotesis kedua (H_2) menyatakan bahwa DAU berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Semakin besar DAU maka pemerintah daerah memiliki dana yang besar untuk menopang pertumbuhan ekonomi. Hasil uji-t menunjukkan bahwa DAU tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa H_2 ditolak.

Hasil ini mengindikasikan bahwa setiap perubahan nilai pada DAU tidak akan memiliki dampak terhadap pertumbuhan ekonomi. DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. DAU merupakan salah satu dana perimbangan atau pendapatan transfer yang ditujukan untuk pemerintah daerah guna mencapai pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dalam pelaksanaan desentralisasi dan memenuhi kebutuhan daerah masing-masing.

Keberadaan DAU dipandang sebagai sesuatu yang secara langsung lamban dirasakan masyarakat untuk menambah nilai ekonomi yang ada. Keberadaan DAU kebanyakan terfokus pada pembangunan di daerah perkotaan sehingga pedesaan masih mengalami roda perekonomian yang cenderung melamban. Sehingga penyerapan DAU pada provinsi di Indonesia Timur masih belum efektif. Hal ini ditandai dengan masih minimnya prioritas pemerintah daerah dalam mengelola DAU, selain itu juga minimnya pengalokasian pada belanja modal yang bersentuhan langsung dengan kepentingan publik seperti infrastruktur atau fasilitas yang mendorong perekonomian.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hipotesis ketiga (H_3) menyatakan bahwa DAK berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Semakin besar DAK maka pemerintah daerah memiliki dana yang besar untuk menopang pertumbuhan ekonomi. Hasil uji-t menunjukkan bahwa DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa H_3 ditolak.

Hasil ini mengindikasikan bahwa setiap perubahan nilai pada DAK tidak akan memiliki dampak terhadap pertumbuhan ekonomi. DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. DAK dialokasikan dalam APBN untuk daerah tertentu dalam rangka pendanaan desentralisasi untuk membiayai kegiatan khusus yang

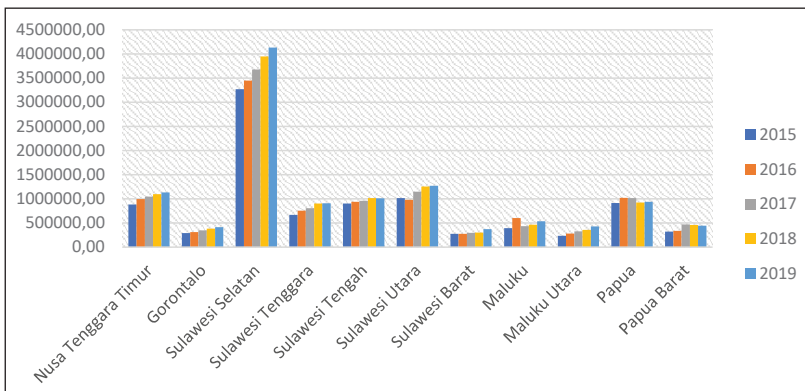
ditentukan Pemerintah Pusat atas dasar prioritas nasional dan membiayai kegiatan khusus yang diusulkan daerah tertentu. Fakta dari DAK tersebut yang menyebabkan DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. DAK memiliki sifat *specific grants*. Sehingga pengalokasian DAK terkadang tidak bersentuhan langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, seperti sektor kesehatan dan pendidikan.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hipotesis keempat (H_4) menyatakan bahwa PAD berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Semakin besar PAD menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah mampu mengoptimalkan potensi daerahnya. Hasil uji-t menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa H_4 diterima.

hasil ini mengindikasikan hasil pengelolaan daerah dalam bentuk PAD telah mempunyai meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. PAD dapat diperoleh melalui sumber-sumber dana yang di dapat dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Sumber-sumber pendapatan tersebut diharapkan menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan dan pembangunan untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan rakyat. Besarnya PAD suatu daerah mencerminkan bahwa pemerintah daerah telah sukses mengelola wilayahnya dengan mengoptimalkan segala potensi dan sumber daya sehingga mampu menghasilkan PAD yang tinggi. PAD yang tinggi memberikan modal yang cukup untuk daerah melakukan kegiatan ekonomi sehingga berakibat pada *output* daerah dalam bentuk PDRB.

Gambar 2. Grafik Pendapatan Asli Daerah Kawasan Indonesia Timur Tahun 2019



Sumber: Badan Pusat Statistik, data diolah

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa PAD tahun 2019 pada kawasan Indonesia Timur cenderung mengalami kenaikan di beberapa provinsi. Namun berbeda pada Provinsi Papua yang mengalami perubahan yang cukup fluktuatif. Kondisi ini mengartikan bahwa pemerintah daerah di beberapa provinsi di kawasan Indonesia Timur memiliki tata kelola pemerintah yang cukup baik sehingga perhatian terhadap sumber daya dan beberapa kekayaan daerah mampu dikelola dengan cukup maksimal. Sehingga mampu menghasilkan PAD yang cukup konsisten meningkat.

Hasil ini sejalan dengan penelitian Anwar et.al. (2018) yang menyatakan bahwa PAD berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun hasil ini bertolak belakang dengan penelitian Dewi (2017) dan Faradisi (2015) yang menyatakan PAD berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hipotesis terakhir (H_5) menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Besaran pengeluaran pemerintah mencerminkan bagaimana pemerintah mengalokasikan dana. Pengeluaran pemerintah digunakan untuk menunjang perekonomian, sehingga akan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah. Hasil uji-t menunjukkan bahwa PAD berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa H_5 ditolak.

Kenaikan pengeluaran pemerintah seharusnya mampu meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah. Pengeluaran pemerintah memiliki peran yang penting dalam suatu negara. Peningkatan pengeluaran pemerintah dalam penyediaan dan perbaikan infrastruktur akan menyebabkan proses produksi barang dan jasa yang semakin lancar. Hal ini akan mendorong peningkatan dalam proses produksi yang menyebabkan peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah belum mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia Timur. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pengeluaran yang dilakukan pemerintah daerah masih belum mengarah pada upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pemerintah kebanyakan digunakan untuk keperluan belanja rutin yang kurang produktif seperti belanja pegawai, perjalanan dinas, dan belanja pemeliharaan, sehingga tidak mampu meningkatkan produktivitas perekonomian yang pada akhirnya tidak mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Hasil ini sejalan dengan penelitian Widiyanto et.al. (2016) yang menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun hasil ini tidak sejalan dengan penelitian Ichvani & Sasana (2019) yang menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

KESIMPULAN

Berdasarkan estimasi *random effect* model yang telah dilakukan. Maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Uji F menunjukkan bahwa secara simultan variabel IDI, DAU, DAK, PAD, dan pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Indonesia Timur.
2. Variabel Indeks Demokrasi Indonesia berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Indonesia Timur. Hasil ini menunjukkan bahwa besaran indeks demokrasi belum mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal ini terjadi karena dari beberapa aspek indeks demokrasi seperti aspek kebebasan sipil, aspek hak-hak politik, dan aspek lembaga demokrasi beberapa provinsi di Indonesia Timur memiliki nilai paling rendah dibanding dengan provinsi lain.
3. Variabel Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia Timur. Hal ini terjadi karena belanja modal pada provinsi di Indonesia Timur tidak bersinggungan langsung dengan kegiatan ekonomi seperti infrastruktur dan fasilitas penunjang perekonomian lain.

4. Variabel Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia Timur. Hal ini karena alokasi DAK bersifat spesifik yang telah ditentukan oleh pemerintah. Dimana terkadang tidak bersinggungan langsung dengan kegiatan ekonomi seperti pendidikan dan kesehatan.
5. Variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia Timur. Hasil ini menunjukkan bahwa kenaikan PAD mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. PAD yang tinggi memberikan modal yang cukup untuk daerah melakukan kegiatan ekonomi sehingga berakibat pada output daerah dalam bentuk PDRB.
6. Variabel Pengeluaran Pemerintah berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia Timur. Hasil ini menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah belum mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal ini terjadi karena Pengeluaran pemerintah kebanyakan digunakan untuk keperluan belanja rutin yang kurang produktif seperti belanja pegawai, perjalanan dinas, dan belanja pemeliharaan, sehingga tidak mampu meningkatkan produktivitas perekonomian yang pada akhirnya tidak mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, A. R. D., Abdullah, M. F., & Hadi, S. (2018). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Otonomi Khusus dan Belanja Modal terhadap PDRB di Kab/ Kota Provinsi Papua. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 2(1), 1–13.

- Arina, M. M., Koleangan, R. A. M., & Engka, D. S. M. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Manado. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 20(3), 26–35.
- Arsa, I. (2015) –*Pengaruh kinerja Keuangan terhadap alokasi belanja modal terhadap pertumbuhan Ekonomi pemerintah kab/kota provinsi bali 2006-2013*. Tesis
- Dewi, N. W. R., & Suputra, I. D. G. D. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Akuntansi*, 18(3), 1745–1773. <https://doi.org/10.24176/agj.vii1.3321>
- Faradisi, N. (2015). Determinan Pertumbuhan Ekonomi di Propinsi Aceh. *Signifikan*, 4(2), 151–172.
- Ghozali, I. (2009). *Aplikasi Multivariat dengan Program SPSS*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I., & Ratmono, D. (2013). *Analisis Multivariat dan Ekonometrika Teori, Konsep dan Aplikasi dengan EvIEWS 8 (I)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gujarati, D. N. (2003). *Ekonometrika Dasar* (S. Zain, ed.). Jakarta: Erlangga.
- Hayek, F. A. (1945). The Use of Knowledge in Society. *The American Review*, 35(4), 519–530.
- Hasjmy. (1984). *Di Mana Letaknya Negara Islam*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Hessels, J., & Terjesen, S. (2010). Resource dependency and institutional theory perspectives on direct and

- indirect export choices. *Small business economics*, 34(2), 203-220.
- Hopkin, J. (1997). Political Parties, Political Corruption, and the Economic Theory of Democracy. *Crime, Law and Social Change*, 27(3-4), 255-247.
- Ichvani, L. F., & Sasana, H. (2019). Pengaruh Korupsi, Konsumsi, Pengeluaran Pemerintah, dan Keterbukaan Perdagangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di ASEAN 5. *Jurnal Riset Ekonomi Pembangunan*, 4(1), 61-72.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305-360.
- LAN, & BPKP. (2000). Akuntabilitas dan Good Governance. In *Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Institusi Pemerintah* (1st ed.).
- Kaldor, M., & Vejvoda, I. (Eds.). (2002). Democratization in central and eastern Europe. *Bloomsbury Publishing*.
- Meyer, J. W., & Rowan, B. (1977). Institutionalized organizations: Formal structure as myth and ceremony. *American journal of sociology*, 83(2), 340-363.
- Musgrave, R. A. (1959). *Theory of Public Finance: A Study in Public Economy*. New York: McGraw-Hill.
- Oates, W. E. (1972). *Fiscal Federalism*. New York: Harcourt Brace Jovanovich.
- Paikah, N. (2019). Tata Kelola Pemerintahan dalam Hukum Islam. *Al-Bayyinah*, 3(1), 45-60.
- Putri, L. M., & Triani, M. (2020). Analisis Hubungan Korupsi, Demokrasi, dan Pertumbuhan Ekonomi

- di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan*, 2(4).
- Rahayuningtias, D. P. A., & Setyaningrum, D. (2017). Pengaruh Tata Kelola dan E-Government terhadap Korupsi. *Ekuitas: Jurna Ekonomi Dan Keuangan*, 1(4), 431–450. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2017.v1.i4.2597>
- Rasul, S. (2009). Penerapan Good Governance di Indonesia dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi. *Mimbar Hukum*, 21(3), 409–628.
- Rivera-Batiz, F. L. (2002). Democracy, governance, and economic growth: theory and evidence. *Review of Development Economics*, 6(2), 225-247.
- Salahodjaev, R. (2015). Democracy and economic growth: The role of intelligence in cross-country regressions. *Intelligence*, 50, 228-234.
- Sirajuddin. (2007). Politik Ketatanegaraan Islam Studi Pemikiran A. Hasjmy. Yogyakarta: *Pustaka Pelajar*.
- Sukirno, S. (2004). *Makro Ekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa.
- Suparmoko, M. (2002). *Ekonomi Publik untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah* (I). Yogyakarta: Andi.
- Villadsen, A. R. (2011). Structural embeddedness of political top executives as explanation of policy isomorphism. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 21(4), 573-599
- United Nations Development Programe. (1999). *Decentralization: A Sampling of Definitions: Joint UNDP-Government of Germany Evaluation of the UNDP Role in Decentralizzation and Local Governance*.

- Wibowo, M. G. (2020). Good Public Governance in Islamic Perspective: An Analysis on the World Governance Indicator in OIC Member Countries. *Ihtifaz: Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking*, 3(1), 51-66.
- Widarjono, A. (2013). *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya*. Yogyakarta: Ekonisia-FE UII.
- Widianto, A., Utami, E. U. S., & Nurmansyah, A. L. (2016). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus pada Kota Tegal). *Journal Research Accounting Politeknik Tegal*, 5(2), 170–176.
- Yolanda, Y. (2019). Pengaruh Korupsi, Demokrasi dan Politik Terhadap Kemiskinan di Delapan Negara ASEAN dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan*, 1(3), 845-854.
- Zayyadi, A. (2017). Good Governance dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer (Tinjauan Usul Fikih dari Teori Peningkatan Norma). *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 11(1), 13-34.
- Zuhri, S., & Afdhilla, A. B (2020). *Good Governance Dalam Pelaksanaan Administrasi Negara Berdasarkan Perspektif Islam*. Prosiding Konferensi Nasional Administrasi Negara Sinagara.

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMISKINAN DI PAPUA

Dr. Slamet Haryono

(slamet.haryono@uin-suka.ac.id)

Arif Muallim

(19208012019@student.uin-suka.ac.id)

Tegar Brian Kusuma

(19208012009@student.uin-suka.ac.id)

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan isu sentral bagi setiap Negara di dunia, khususnya bagi Negara berkembang, pengentasan kemiskinan dan menciptakan kesejahteraan bagi rakyat merupakan tujuan akhir satu Negara. Isu-isu mengenai kemiskinan merupakan fokus pembangunan di setiap Negara di dunia. Perhatian terhadap kemiskinan bahkan menjadi isu global yang terungkap secara tegas dalam sasaran-sasaran pembangunan Milenium (*Millenium Development Goals, MDGs*). Sekalipun sudah merupakan komitmen global, upaya penanggulangan kemiskinan bukan merupakan hal yang sederhana, karena kemiskinan bersifat kompleks.

Di Indonesia, kemiskinan merupakan masalah yang sangat krusial, tidak hanya karena tendensinya yang semakin meningkat, namun juga konsekuensinya yang tidak hanya meliputi ruang lingkup ekonomi semata namun juga masalah sosial dan instabilitas politik dalam negeri. Sejarah menunjukkan, sejak Indonesia merdeka konsep trilogy pembangunan dengan menggunakan teori *trickle down effect* dengan memfokuskan pembangunan baik ekonomi dan sosial politik terpusat di Jakarta sebagai ibu kota Negara. Strategi ini diharapkan bisa meneteskan kesejahteraan pembangunan ke daerah-daerah. Namun yang terjadi adalah pertumbuhan ekonomi yang semu dan menghasilkan disparitas yang tinggi antara golongan kaya dan miskin. Hal ini ditunjukkan dengan tingginya angka kemiskinan di daerah Indonesia timur yang masih kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah. Berdasarkan data presentase kemiskinan yang diambil dari Badan Pusat Statistik tahun 2021.

Tabel 1. Presentase Penduduk Miskin di provinsi Indonesia Timur

Provinsi	2018		2019		2020	
	Sem. 1	Sem. 2	Sem. 1	Sem. 2	Sem. 1	Sem. 2
Sulawesi Utara	7.8	7.59	7.66	7.51	7.62	7.78
Sulawesi Tengah	14.01	13.69	13.48	13.18	12.92	13.06
Sulawesi Selatan	9.06	8.87	8.69	8.56	8.72	8.99
Sulawesi Tenggara	11.63	11.32	11.24	11.04	11	11.69
Gorontalo	16.81	15.83	15.52	15.31	15.22	15.59
Sulawesi Barat	11.25	11.22	11.02	10.95	10.87	11.5
Maluku	18.12	17.85	17.69	17.65	17.44	17.99
Maluku Utara	6.64	6.62	6.77	6.91	6.78	6.97

Provinsi	2018		2019		2020	
	Sem. 1	Sem. 2	Sem. 1	Sem. 2	Sem. 1	Sem. 2
Nusa Tenggara Barat	14.75	14.63	14.56	13.88	13.97	14.23
Nusa Tenggara Timur	21.35	21.03	21.09	20.62	20.9	21.21
Papua Barat	23.01	22.66	22.17	21.51	21.37	21.7
Papua	27,74	27,43	27,53	26,55	26,64	26,8

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2021

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan presentase tingkat kemiskinan di provinsi Indonesia timur. Provinsi di Indonesia timur yang memiliki presentase kemiskinan terendah adalah Maluku Utara. Dalam 3 tahun terakhir dapat dilihat ada 3 provinsi yang selalu memiliki presentase kemiskinan paling tinggi, yaitu Nusa Tenggara Timur, Papua Barat dan Papua. Papua selalu menjadi provinsi dengan presentase penduduk miskin paling tinggi dalam 3 tahun terakhir. Hal ini menjadi tanda tanya besar karena masyarakat Papua memiliki sumber daya alam yang melimpah diantaranya hasil perikanan, perkebunan, kehutanan dan lain-lain serta memiliki potensi yang besar untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat namun kenyataannya hal tersebut belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.

Suparlan (2000) mendefinisikan bahwa kemiskinan adalah keadaan serba kekurangan harta dan benda berharga yang di derita oleh seseorang atau sekelompok orang yang hidup dalam lingkaran serba miskin atau kekurangan modal, baik dalam pengertian uang, pengetahuan, kekuatan sosial, politik, hukum, maupun akses terhadap fasilitas pelayanan umum, kesempatan berusaha dan bekerja. Lebih jauh, kemiskinan juga suatu kondisi dimana orang

atau kelompok orang tidak mempunyai kemampuan, kebebasan, asset dan aksesibilitas untuk kebutuhan mereka di waktu yang akan datang, serta sangat rentan (*vulnerable*) terhadap resiko dan tekanan yang disebabkan oleh penyakit dan peningkatan secara tiba-tiba atas harga-harga bahan makanan dan uang sekolah (UNCHS, 1996; Pratama, 2014)

Kartasasmita dalam Sangadji (2014) mengatakan kemiskinan juga di pandang dari rendahnya derajat kesehatan karena akan menentukan gizi seseorang dengan demikian jika miskin maka gizi juga rendah menyebabkan rendahnya ketahanan fisik, daya pikir dan prakarsa yang akan mempengaruhi produktivitas dan pendapatan. Derajat kesehatan dapat di ukur dengan melihat angka harapan hidup dalam suatu wilayah tersebut. Tingkat pendapatan yang rendah akan mengurangi kesempatan masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang memadai dan tinggi dikarenakan masih mahalnya biaya pendidikan jika di ukur dari rata-rata pendapatan masyarakat. Untuk mengukur kemajuan pendidikan di suatu wilayah di lihat dari rata-rata lama sekolah masyarakat di wilayah tersebut.

Analisis faktor-faktor kemiskinan juga pernah dilakukan oleh Wahyuni dan Damayanti (2014) menyebutkan bahwa Faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan di provinsi papua adalah hubungan antara luas lahan pertanian yang diusahakan, tingkat pendidikan, penggunaan irigasi teknis, sumber air minum, tenaga medis, dan penggunaan listrik. Hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Wiguna (2012) dan Mahsunah (2013).

Penelitian lain yang dilakukan oleh Pratama (2014) menggunakan variabel pendapatan, pendidikan, inflasi, konsumsi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk mengukur kemiskinan di Indonesia. Hasil penelitian ini

menunjukkan bahwa tingkat pendapatan perkapita, pendidikan dan inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan sedangkan konsumsi dan IPM memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan. Hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Purba dan Soleman (2021).

Dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa terdapat banyak variabel yang digunakan untuk mengukur kemiskinan, dan juga terdapat hasil yang berbeda-beda disetiap wilayahnya. Sehingga penelitian ini menarik untuk dikaji lebih jauh dalam rangka memberikan gambaran mengenai fenomena kemiskinan yang terjadi di Papua. Adapun faktor-faktor yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendidikan, pendapatan, dan kesehatan.

KERANGKA TEORITIS

Kemiskinan

World Bank mengidentifikasikan penyebab kemiskinan dari perspektif akses dari individu terhadap sejumlah aset yang penting dalam menunjang kehidupan, yakni aset dasar kehidupan (misalnya kesehatan dan ketrampilan/ pengetahuan), aset alam (misalnya tanah pertanian atau lahan olahan), aset fisik (misalnya modal, sarana produksi dan infrastruktur), aset keuangan (misalnya kredit bank dan pinjaman lainnya), dan aset sosial (misalnya jaminan sosial dan hak-hak politik). Ketiadaan akses dari satu atau lebih dari asset-aset di atas merupakan penyebab seseorang masuk ke dalam kemiskinan. Menurut Todaro dan Smith (2006), kemiskinan yang terjadi di Negara-negara berkembang akibat dari interaksi antara 6 karakteristik berikut:

- a. Tingkat pendapatan nasional negara-negara berkembang terbilang rendah, dan laju pertumbuhan ekonominya tergolong lambat.
- b. Pendapatan perkapita negara-negara berkembang juga masih rendah dan pertumbuhannya sangat lambat, bahkan ada beberapa yang mengalami stagnasi.
- c. Distribusi pendapatan sangat timpang atau sangat tidak merata.
- d. Mayoritas penduduk di negara-negara berkembang harus hidup di bawah tekanan kemiskinan absolut.
- e. Fasilitas dan pelayanan kesehatan buruk dan sangat terbatas, kekurangan gizi dan banyaknya wabah penyakit sehingga tingkat kematian bayi di negara-negara berkembang sepuluh kali lebih tinggi dibandingkan dengan yang ada di negara maju.
- f. Fasilitas pendidikan di kebanyakan negara-negara berkembang maupun isi kurikulumnya relatif masih kurang relevan maupun kurang memadai.

Menurut Samuelson dan Nordhaus (1997), penyebab dan terjadinya penduduk miskin di negara yang berpenghasilan rendah adalah karena dua hal pokok, yaitu rendahnya tingkat kesehatan dan gizi, dan lambatnya perbaikan mutu pendidikan. Oleh karena itu, upaya yang harus dilakukan pemerintah adalah melakukan pemberantasan penyakit, perbaikan kesehatan dan gizi, perbaikan mutu pendidikan, pemberantasan buta huruf, dan peningkatan keterampilan penduduknya. Kelima hal itu adalah upaya untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia.

Kemiskinan dalam Islam

Islam melalui kitab suci Al-Qur'an menggunakan beberapa kata dalam menggambarkan kemiskinan, yaitu *faqiir*, *miskiin*, *al-sa'iil*, dan *al-mahruum* (Iqbal, 2017). Tetapi kata fakir dan miskin yang paling banyak disebutkan dalam Al-Qur'an. Menurut Ridwan (2011) kata *faqiir* dan *miskiin* disebutkan dalam Al-Qur'an berjumlah 36 ayat, kata *faqiir* dijumpai sebanyak 12 kali dan kata *miskiin* disebut sebanyak 25 kali. Pendapat berbeda dijelaskan oleh Iqbal (2017) yang menyebutkan bahwa kata *miskiin* dalam konteks kemiskinan hanya disebut pada 24 ayat, karena pada ayat 72 surat At-Taubah kata *masaakin* merupakan kata yang bermakna tempat bukan merupakan jamak dari kata *miskiin*, pada ayat tersebut konteksnya adalah janji allah kepada orang-orang yang beriman bahwa mereka akan mendapatkan surge dan tempat yang baik di dalamnya. Dan ada tambahan pada kata *faqiir* menjadi 13 ayat yaitu pada surat An-Nur ayat 32.

Lafadz *faqiir* berasal dari kata *faqura-yafquru-faqarah* yang maknanya lawan dari kaya. Dan secara istilah *al-fuqara*, mufrad kata *faqiir*, menunjukkan kepada seseorang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai usaha tetap untuk mencukupi kebutuhannya, seolah-olah ia adalah orang yang sangat menderita karena kefakiran hidupnya (Qurtubi, 2008). Lafadz *miskiin* merupakan *isim masdar* yang berasal dari *sakana-yaskunu-sukun/miskiin* yang memiliki arti diam, tetap atau reda. Jika dilihat dari makna diam, maka secara istilah *miskiin* yaitu orang yang tidak dapat memperoleh sesuatu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan diamnya itulah yang menyebabkan kemiskinan (Ilmi, 2017).

Iqbal (2017) menyatakan bahwa fakir dan miskin mempunyai persamaan dan perbedaan. Persamaannya keduanya sama-sama sebagai pihak yang memerlukan bantuan untuk mengentaskan diri dari kepapaan. Perbedaannya adalah orang fakir memiliki potensi untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, sedangkan orang miskin tidak memiliki potensi tersebut, atau jika memiliki, potensinya sangat rendah, sehingga tidak memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, hal ini sejalan dengan pendapat dari Ibrahim (2007) dan Qardhawi (2009). Korayem dan Mashhour (2014) menambahkan golongan *gharim* dan *ibn sabil* ke dalam golongan yang membutuhkan bantuan secara temporer untuk dapat lepas dari kepapaan.

Guner (2005) membedakan kemiskinan dalam Al-Qur'an menjadi dua yaitu kemiskinan spiritual dan kemiskinan material. Kemiskinan spiritual sebagaimana dijelaskan pada surat Fatir 35:15, Muhammad 47:38, dan Al-hasr 59:8 yang menunjukkan kebutuhan manusia yang fakir akan karunia dari Allah. Sedangkan pada selain ayat tersebut Al-Qur'an lebih banyak menunjukkan kemiskinan material. Sejalan dengan hal tersebut, Ridwan (2011) menyebutkan bahwa kemiskinan dalam islam mencakup ranah mental/psikis sebagaimana keadaan miskin yang kebanyakan malah membuat orang-orang miskin menikmati bantuan dari orang lain, bukan malah membuat mereka bangkit dan berubah untuk menjadi orang yang membantu daripada orang yang menerima bantuan.

Korayem dan Mashhour (2014) menjelaskan lebih jauh lagi mengenai kebutuhan hidup manusia di dunia dan hubungannya dengan kemiskinan. Mereka menyatakan bahwa dalam mengestimasi kemiskinan ilmu ekonomi

sekuler (konvensional) dan ilmu ekonomi Islam berbeda, meskipun menurut Rasool et al. (2012) hampir mirip. Kemiskinan dalam ekonomi konvensional diestimasi dengan melihat siapa yang hidupnya berada di bawah garis kemiskinan, sedangkan kemiskinan dalam ekonomi Islam diestimasi dengan tingkat kecukupan (*sufficiency level*), dan barang siapa yang hidup di bawah tingkat kecukupan itu tergolong miskin. Hasan (2010) menjelaskan bahwa tingkat kecukupan di sini dapat dilihat dari terpenuhinya tujuan-tujuan syariah (*maqashid al-syariah*), yaitu terlindunginya agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Kemiskinan maupun kekayaan pada dasarnya merupakan ujian bagi seorang muslim di dunia. Miskin dan kaya bukan ukuran seorang hina atau mulia. Kemiskinan dan kekayaan keduanya sama-sama merupakan ujian dan cobaan bagi seorang hamba. Orang yang miskin diuji dengan kafakirannya, apakah ia dapat bersabar atau tidak. Sementara orang kaya diuji dengan kekayaannya, apakah ia dapat bersyukur ataukah kufur terhadap nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT.

Pendapatan

Pratama (2014) tingkat pendapatan secara riil akan menurun manakala terjadi inflasi dan akibatnya adalah penurunan tingkat konsumsi secara agregat yang pada akhirnya akan menambah tingkat kemiskinan. Tingkat pendapatan yang rendah akan mengurangi kesempatan masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang memadai dan tinggi dikarenakan masih mahal biaya pendidikan di Indonesia jika diukur dari rata-rata penghasilan masyarakat Indonesia. Sukirno (2006) menjelaskan bahwa untuk menghitung besar-kecilnya pendapatan dapat dilakukan dengan tiga pendekatan, yaitu:

- a. Pendekatan produksi (*Production approach*) yaitu menghitung semua nilai produksi barang dan jasa akhir yang dapat dihasilkan dalam periode tertentu.
- b. Pendekatan pendapatan (*Income approach*) yaitu dengan menghitung nilai keseluruhan balas jasa yang dapat diterima oleh pemilik faktor produksi dalam suatu periode tertentu.
- c. Pendekatan pengeluaran (*Expenditure approach*) yaitu pendapatan yang diperoleh dengan menghitung pengeluaran konsumsi masyarakat.

Pratama (2014) mengatakan bahwa pendapatan berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fadillah, Sukiman dan Dewi (2016) dan penelitian Arif dan Fadillah (2019). Jadi secara teori semakin tinggi pendapatan penduduk suatu daerah maka kemiskinan di daerah tersebut semakin berkurang, dengan ketentuan bahwa adanya pemerataan pendapatan sehingga tidak terjadi ketimpangan pendapatan yang dapat mengakibatkan orang kaya menjadi semakin kaya dan orang miskin menjadi semakin miskin.

H1 = Pendapatan berpengaruh negatif terhadap kemiskinan

Pendidikan

Teori pertumbuhan baru menekankan pentingnya peranan pemerintah terutama dalam meningkatkan pembangunan modal manusia (*human capital*) dan mendorong penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan produktivitas manusia. Kenyataannya dapat dilihat dengan melakukan investasi pendidikan akan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang

diperlihatkan dengan meningkatnya pengetahuan dan keterampilan seseorang. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka pengetahuan dan keahlian juga akan meningkat sehingga akan mendorong peningkatan produktivitas kerjanya. Rendahnya produktivitas kaum miskin dapat disebabkan oleh rendahnya akses mereka untuk memperoleh pendidikan (Sitepu, Sinaga dan Oktaviani, 2009).

Pendidikan yang rendah akan mengakibatkan tidak adanya skill dan kompensasi masyarakat untuk bisa lebih berdaya, yang mengakibatkan rendahnya produktivitas dari masyarakat tersebut dan pada akhirnya menghasilkan pendapatan yang minim, hal ini akan mengakibatkan terjadinya lingkaran kemiskinan (Pratama, 2014). Penelitian ini sejalan dengan Ikhsan (1999). Permana (2012) mengatakan bahwa pendidikan berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Jadi, secara umum semakin tinggi pendidikan anggota keluarga maka akan semakin tinggi kemungkinan keluarga tersebut bekerja di sektor formal dengan pendapatan yang lebih tinggi.

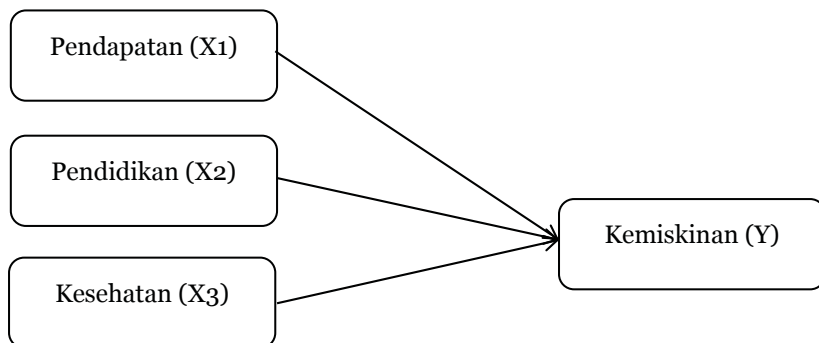
H2 = Pendidikan berpengaruh negatif terhadap kemiskinan

Kesehatan

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Dalam membandingkan tingkat kesejahteraan antar kelompok masyarakat sangatlah penting untuk melihat angka harapan hidup. Di negara-negara yang tingkat kesehatannya lebih baik, setiap individu memiliki rata-rata hidup lebih lama,

dengan demikian secara ekonomis mempunyai peluang untuk memperoleh pendapatan lebih tinggi. Selanjutnya, Lincoln (1999) menjelaskan intervensi untuk memperbaiki kesehatan dari pemerintah juga merupakan suatu alat kebijakan penting untuk mengurangi kemiskinan. Salah satu faktor yang mendasari kebijakan ini adalah perbaikan kesehatan akan meningkatkan produktivitas golongan miskin. Permana (2012) mengatakan bahwa kesehatan berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Jadi, secara umum kesehatan yang lebih baik akan meningkatkan daya kerja, mengurangi hari tidak bekerja dan menaikkan output energi, sehingga akan mendapatkan penghasilan yang lebih baik.

H3 = Kesehatan berpengaruh negatif terhadap kemiskinan



METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode penelitian deskriptif kuantitatif. Metode deskriptif pada penelitian ini digunakan untuk menggambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Papua. Metode kuantitatif digunakan untuk menguji hipotesis-hipotesis yang telah ditetapkan. Metode yang digunakan yaitu metode kuantitatif dengan analisis

data panel. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data gabungan antara data *cross section* dan *time series*, data *cross section* yaitu data 29 kabupaten di provinsi Papua dan *data time series* tahun 2017-2019. Data yang digunakan bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) provinsi Papua, jurnal, buku serta sumber-sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu kemiskinan dan variabel independen dalam penelitian ini yaitu pendapatan, pendidikan dan kesehatan.

Analisis regresi data panel merupakan analisis yang mengkombinasikan data *time series* dan *cross section*. Model persamaannya adalah sebagai berikut:

$$TK_{it} = \beta_0 + \beta_1 P_{it} + \beta_2 Ks_{it} + \beta_3 Pd_{it} + e_{it}$$

Keterangan:

TK = Tingkat kemiskinan (variabel terikat)

β_0 = Konstanta

P = Pendapatan (variabel bebas 1)

Ks = Kesehatan (variabel bebas 2)

Pd = Pendidikan (variabel bebas 3)

e = parameter pengganggu (*term of error*)

Metode estimasi akan dilakukan dengan menggunakan pendekatan *common effect*, *random effect* dan *fixed effect* tergantung pada model mana yang terbaik. Untuk menentukan model regresi terbaik maka terdapat tiga pengujian, yaitu sebagai berikut:

1. Uji F Statistik

Uji F Statistik digunakan untuk memilih model terbaik antara *Common Effect* dan *Fixed Effect*. Uji F statistik disini menggunakan Uji Chow. Uji ini dilakukan untuk

menguji apakah ada perbedaan antar perusahaan. Perbedaan antar perusahaan ditunjukkan oleh variabel dummy. Sehingga dalam uji ini kita menguji secara bersama-sama variabel dummy tersebut.

2. Uji Hausman

Uji Hausman digunakan untuk memilih model terbaik antara *fixed effect* (OLS) dan *random effect* (GLS). Uji hausman ini mengikuti distribusi *chi-square* dengan *degree of freedom* sebanyak *k*, dimana *k* adalah jumlah variabel independen.

3. Uji Lagrange Multiplier (LM)

Uji *Lagrange Multiplier* dari Breusch-Pagan digunakan untuk memilih model terbaik antara *common effect* dan *random effect*. Uji LM ini didasarkan pada distribusi *chi-square* dengan *degree of freedom* sebesar jumlah variabel independen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan tampilan atau gambaran data yang terdiri dari nilai rata-rata (mean), minimum, maksimum dan standar deviasi dari setiap variabel penelitian. Hasil analisis tabel deskriptif ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 2. Hasil Analisis Deskriptif

	TINGKAT KEMISKINAN	PENDAPATAN	PENDIDIKAN	KESEHATAN
Mean	29.27230	48.35276	5.884023	64.71207
Median	30.60000	26.85000	5.170000	65.51000
Maximum	43.65000	395.9900	11.55000	72.27000

	TINGKAT KEMISKINAN	PENDAPATAN	PENDIDIKAN	KESEHATAN
Minimum	10.35000	8.660000	0.710000	54.60000
Std. Dev.	9.869899	61.77334	3.006136	3.843255
Observations	87	87	87	87

Sumber: Olah data Eviews, 2021

Berdasarkan data diatas hasilnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Variabel tingkat kemiskinan memiliki nilai rata-rata sebesar 29,27 dengan standar deviasi sebesar 9,86. Adapun nilai tingkat kemiskinan tertinggi sebesar 43,65 dan nilai minimumnya sebesar 10,35.
- Variabel pendapatan memiliki nilai rata-rata sebesar 48,35 dengan standar deviasi sebesar 61,77. Adapun nilai pendapatan tertinggi adalah sebesar 395,99 dan nilai minimumnya sebesar 8,66.
- Variabel pendidikan memiliki nilai rata-rata sebesar 5,88 dengan standar deviasi sebesar 3,00. Adapun nilai pendidikan tertinggi sebesar 11,55 dan nilai minimumnya sebesar 0,71.
- Variabel kesehatan memiliki nilai rata-rata sebesar 64,71 dengan standar deviasi sebesar 3,84. Adapun nilai kesehatan tertinggi adalah sebesar 72,27 dan nilai minimumnya adala sebesar 54,60.

Analisis Model Regresi Panel

Uji Chow

Uji ini digunakan untuk menentukan model terbaik antara model *fixed effect* dan *common effect*. Hipotesis dalam uji chow adalah sebagai berikut:

H_0 : Menggunakan *Common Effect*

H_a : Menggunakan *Fixed Effect*

Ketentuan yang digunakan adalah jika F-hitung $>$ F-kritis atau nilai prob $< \alpha$ maka menolak H_0 artinya menggunakan model *fixed effect* dan sebaliknya jika F-hitung $<$ F-kritis atau nilai prob $> \alpha$ maka gagal menolak H_0 berarti menggunakan model *common effect*. Berdasarkan hasil uji sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Uji Chow/F

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: FEM

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	886.742551	(28,55)	0.0000
Cross-section Chi-square	531.973570	28	0.0000

Sumber: Olah data Eviews, 2021

Berdasarkan hasil uji, didapatkan nilai prob sebesar $0,00 < 0,05$ artinya menolak H_0 atau menggunakan model *fixed effect*.

Uji Hausman

Uji ini digunakan untuk menentukan model terbaik antara model *fixed effect* dan *random effect*. Hipotesis dalam uji Hausman adalah sebagai berikut:

H_0 : Menggunakan model *Random Effect*

H_a : Menggunakan model *Fixed Effect*

Jika nilai prob $< \alpha$ maka menolak H_0 berarti menggunakan model *fixed effect* dan sebaliknya jika nilai prob $> \alpha$ maka gagal menolak H_0 berarti menggunakan model *random effect*. Hasil uji Hausman adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: REM

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	30.714739	3	0.0000

Sumber: Olah Data Eviews, 2021

Berdasarkan hasil uji Hausman nilai prob sebesar $0,00 < 0,05$ maka menolak H_0 berarti menggunakan model *fixed effect*. Dengan hasil ini tidak perlu lagi melakukan uji *Lagrange Multiplier* (LM) karena dari dua uji sebelumnya menghasilkan model *fixed effect*. Jadi dalam mengestimasi data panel penelitian ini yang terbaik adalah menggunakan model *fixed effect*.

Model Regresi Data Panel

Berdasarkan hasil uji pemilihan model terbaik maka model *fixed effect* yang digunakan. Maka model persamaan regresi adalah sebagai berikut:

$$TK_{it} = \beta_0 + \beta_1 P_{it} + \beta_2 Ks_{it} + \beta_3 Pd_{it} + e_{it}$$

$$TK_{it} = 42,42 + 0,0005 P_{it} + 0,48 Ks_{it} - 0,24 Pd_{it} + e_{it}$$

Tabel 5. Hasil Estimasi Data Panel

Dependent Variable: TINGKAT_KEMISKINAN

Method: Panel Least Squares

Date: 05/26/21 Time: 02:45

Sample: 2017 2019

Periods included: 3

Cross-sections included: 29

Total panel (balanced) observations: 87

Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Papua

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	42.42542	15.65810	2.709487	0.0090
PENDAPATAN	0.000589	0.003203	0.183967	0.8547
PENDIDIKAN	0.483901	0.490667	0.986212	0.3283
KESEHATAN	-0.247696	0.275519	-0.899015	0.3726

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0.999198	Mean dependent var	29.27230
Adjusted R-squared	0.998746	S.D. dependent var	9.869899
S.E. of regression	0.349515	Akaike info criterion	1.012517
Sum squared resid	6.718840	Schwarz criterion	1.919517
Log likelihood	-12.04448	Hannan-Quinn criter.	1.377738
F-statistic	2210.457	Durbin-Watson stat	2.719697
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Olah data Eviews, 2021

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Berdasarkan hasil estimasi regresi panel dengan model *fixed effect* diperoleh nilai *adjusted R-Squared* adalah sebesar 0,9987 atau 99,87%. Hasil ini menunjukkan berapa tingginya kontribusi yang diberikan oleh variabel independen terhadap variabel dependen tetapi terdapat juga kontribusi variabel independen lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

Uji F (Simultan)

Berdasarkan hasil estimasi besarnya F-hitung adalah 2210,45 dan besarnya F-kritis adalah 2,48. Hasil ini menunjukkan bahwa $F\text{-hitung} > F\text{-kritis}$ sehingga berada pada daerah Menolak H_0 sehingga model penelitian ini layak digunakan. Dan berdasarkan nilai prob $0,00 < 0,05$ artinya variabel independen dalam penelitian ini secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap variabel dependen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Pendapatan terhadap Tingkat Kemiskinan

Variabel pendapatan memiliki hubungan negatif dengan kemiskinan, hal ini sesuai dengan teori bahwa semakin tinggi pendapatan akan menurunkan kemiskinan, tetapi berdasarkan hasil penelitian ini, nilai prob variabel pendapatan adalah sebesar 0,85 (lebih besar dari α 0,10) dan nilai t-statistik sebesar 0,18 dan t-kritis dengan tingkat error 10% adalah 1,29 maka garis t-hitung berada pada daerah gagal menolak H_0 sehingga menolak hipotesis awal artinya variabel pendapatan tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Papua. Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Pratama (2014) yang juga menyebutkan bahwa pendapatan tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini dikarenakan variabel pendapatan tidak mempresentasikan secara riil pendapatan di masyarakat dan juga menunjukkan bahwa distribusi pendapatan tidak berjalan secara optimal sehingga terjadinya disparitas pendapatan antara penduduk. Hasil yang berbeda ditunjukkan dari penelitian yang dilakukan oleh Arif dan Fadhilah (2017) dan Ariyati (2019) yang menyebutkan bahwa pendapatan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan dan menemukan kesesuaian yang sejalan dengan teori yang ada bahwa semakin tinggi pendapatan akan menurunkan kemiskinan, dengan ketentuan bahwa adanya pemerataan pendapatan sehingga tidak terjadi ketimpangan pendapatan yang dapat mengakibatkan orang kaya menjadi semakin kaya dan orang miskin menjadi semakin miskin.

Pengaruh Pendidikan terhadap Tingkat Kemiskinan

Hasil pengujian untuk variabel pendidikan menunjukkan nilai prob sebesar 0,32 (lebih besar dari α 0,10) dan nilai t-statistik sebesar 0,98 dan t-kritis dengan tingkat error 10% adalah 1,29 maka garis t-hitung berada pada daerah gagal menolak H_0 . Hal ini berarti variabel pendidikan tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Papua. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratama (2014) yang mengemukakan bahwa pendidikan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan, hal ini dikarenakan sektor pendidikan akan memberikan kontribusi jangka panjang terhadap tingkat kemiskinan, sehingga dalam jangka pendek pengaruhnya belum terlihat. Namun hasil ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Munawaroh dan Puruwita (2012) dan Ariyati (2019) menyebutkan bahwa pendidikan berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini dikarenakan melalui pendidikan akan memberikan perbaikan produktivitas dan efisiensi secara umum, serta secara langsung melalui pelatihan golongan miskin dengan bekal keterampilan yang dibutuhkan sehingga akan memberikan peluang untuk mendapatkan pekerjaan di sektor formal yang akan memberikan peningkatan pendapatannya.

Pengaruh Kesehatan terhadap Tingkat Kemiskinan

Hasil pengujian untuk variabel kesehatan menunjukkan nilai prob sebesar 0,37 (lebih besar dari α 0,10) dan nilai t-statistik sebesar -0,89 dan t-kritis dengan tingkat error 10% adalah 1,29 maka garis t-hitung berada pada daerah gagal menolak H_0 . Hal ini berarti variabel kesehatan

tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Papua. Hasil penelitian ini berbeda yang dikemukakan oleh Sangadji (2014) dan Permana (2012) bahwa kesehatan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini dikarenakan baiknya kesehatan, maka setiap individu memiliki rata-rata hidup yang lebih lama dengan demikian secara ekonomis memiliki peluang untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi dan akan meningkatkan kesejahteraan serta menurunkan tingkat kemiskinan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dipaparkan diatas dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel-variabel independen dalam penelitian ini yaitu pendapatan, pendidikan dan kesehatan menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen yaitu tingkat kemiskinan di provinsi Papua. Namun secara parsial variabel-variabel tersebut tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Papua.

Adapun saran untuk penelitian selanjutnya adalah penambahan variabel yang berkaitan dengan tingkat kemiskinan seperti pengangguran, pertumbuhan ekonomi daerah dan pengeluaran pemerintah. Selain itu juga bisa dengan memperluas atau mempersempit lokasi penelitian serta menambah waktu yang digunakan untuk pengamatan.

DAFTAR PUSTAKA

Arief, M., & Fadhilah, D. (2019). Pengaruh Pendapatan terhadap Kemiskinan dan Pengangguran dengan Inflasi sebagai Pemoderasi di Sumatera Utara. *Jurnal Ilman: Jurnal Ilmu Manajemen*, 5(2).

- Ariyanti, L. D. (2019). Pengaruh Pendidikan, Pengangguran, Dan Pendapatan Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten Madiun. In *SIMBA: Seminar Inovasi Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi* (Vol. 1).
- Badan Pusat Statistik. (2020). Profil Kemiskinan di Provinsi Papua. <https://papua.bps.go.id/pressrelease/2020/07/15/482/profil-kemiskinan-di-privinsi-papua-maret-2020.html>
- Fadillah, N., Sukirman, S., & Dewi, A. S. (2016). Analisis Pengaruh Pendapatan Per Kapita, Tingkat Pengangguran, IPM dan Pertumbuhan Penduduk Terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2009-2013. *Eko-Regional: Jurnal Pembangunan Wilayah*, 11 (1).
- Ibrahim, M. (2007). *Kemiskinan dalam perspektif al-Qur'an*. UIN-Maliki Press.
- Ilmi, S. (2017). Konsep Pengentasan Kemiskinan Perspektif Islam. *Al-Maslahah*, 13(1), 67-84.
- Iqbal, M. (2017). *Konsep Pengentasan Kemiskinan Dalam Ekonomi Islam* (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).
- Korayem, K., & Mashhour, N. (2014). Poverty in Secular and Islamic Economics; Conceptualization and Poverty Alleviation Policy, with Reference to Egypt. *Topics in Middle Eastern and African Economies*, 16(1), 1-16.
- Mahsunah, D. (2013). Analisis pengaruh jumlah penduduk, pendidikan dan pengangguran terhadap kemiskinan di Jawa Timur. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, 1(3).
- Munawaroh, M., & Puruwita, D. (2012). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pendapatan per Kapita dan

Pengangguran Terhadap Kemiskinan di DKI Jakarta. *Econosains Jurnal Online Ekonomi dan Pendidikan*, 10(2), 144-157.

- Permana, A. Y., & Arianti, F. (2012). *Analisis Pengaruh PDRB, Pengangguran, Pendidikan, dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2004-2009* (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomika dan Bisnis).
- Pratama, Y. C. (2014). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Indonesia. *Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 4(2).
- Purba, N. S., & Soleman, L. A. (2021, January). Analisis Spasial Mengenai Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kemiskinan Di Provinsi Papua Tahun 2019. In *Prosiding Senantias: Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* (Vol. 1, No. 1, pp. 71-80).
- Ridwan, A. M. (2011). *Geliat ekonomi Islam: Memangkas kemiskinan, mendorong perubahan*. UIN-Maliki Press.
- Sangadji, M. (2014). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Provinsi Maluku. *Media Trend*, 9(2).
- Sitepu, R. K. K., Sinaga, B. M., Oktaviani, R. S. & Tambunan, M., (2009). Dampak Investasi Sumber Daya Manusia Terhadap Distribusi Pendapatan dan Kemiskinan Di Indonesia. In *Forum Pascasarjana Institut Pertanian Bogor* (Vol. 32, No. 2, pp. 117-118).
- Sukirno, S. (2006). *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan*. Kencana: Jakarta.

- Todaro, M. P. (2006). stephen C. Smith. *Economic development, 10*.
- Wahyuni, R. N. T., & Damayanti, A. (2014). Faktor-Faktor yang Menyebabkan Kemiskinan di Provinsi Papua: Analisis Spatial Heterogeneity. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia, 14*(2), 128-144.
- Wiguna, V. I., & Sakti, R. K. (2012). Analisis Pengaruh PDRB, Pendidikan, dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2010. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB, 1*(2).

PENGARUH PENDIDIKAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

Dr. Taosige Wau

(taosige.wau@uin-suka.ac.id)

Andi Ajeng Tenri Lala

(andiajengtenrilala@gmail.com)

Badi'ah

(Ismybadiah94a@gmail.com)

PENDAHULUAN

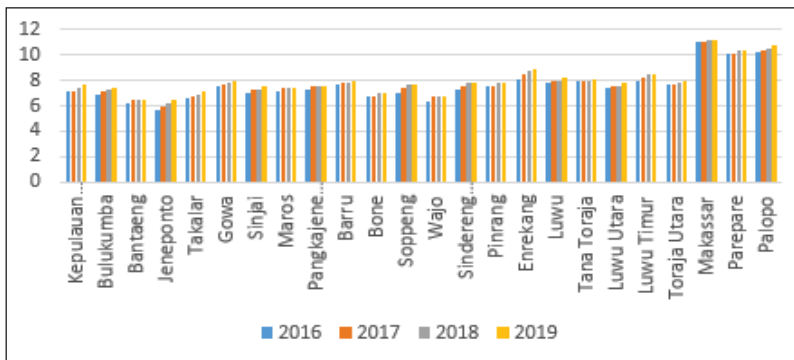
Teorii pertumbuhan ekonomi yang berkembang saat ini didasari kepada kapasitas produksi tenaga manusia didalam proses pembangunan atau disebut juga *investment in human capital*. Pada kawasan ASEAN Indonesia pada level *Human Capital Index* (HCI) masih harus tertinggal oleh negara lain seperti Vietnam mencapai peringkat ke 48 dengan angka 0,67, Malaysia peringkat 57 serta Thailand peringkat 68 namun Indonesia sendiri baru mencapai angka 0,53 dan berada pada peringkat ke 87 dari 157 negara yang disurvei. Skor *Human Capital Index* (HCI) diukur berdasarkan angka harapan hidup dan harapan menerima pendidikan yang memadai secara kualitas dan

Pengaruh Pendidikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan

kuantitas (*World Bank*, 2018). Kualitas sumber daya manusia ditentukan oleh tingkat pendidikannya, dimana pendidikan sebagai sebuah investasi (*education as investment*) diyakini dapat memberikan sebuah kontribusi yang besar bagi pembangunan maupun pertumbuhan ekonomi (Jamal et al., 2019).

Investasi pendidikan merupakan semua bentuk pengeluaran dalam rangka meningkatkan pendidikan (*education*) masyarakat. Pendidikan masyarakat diukur dari rata-rata lama sekolah penduduk dalam suatu wilayah (Sulistiyowati et al., 2010) industry and service of districts and municipalities in Central Java, (2. Berikut merupakan data Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Provinsi Sulawesi Selatan.

**Gambar 1 Rata-rata Lama Sekolah Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2016-2019**



Sumber: BPS Sulawesi Selatan, 2020

Berdasarkan gambar di atas rata-rata lama sekolah di Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Kab/Kota mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kontribusi peningkatan rata-rata lama sekolah di Sulawesi Selatan ditujukan pada Kab. Gowa yang mengalami peningkatan sebesar 0,44 tahun

dari 7,75 tahun pada 2018 meningkat menjadi 8,19 tahun di 2019, namun Kab/Kota lainnya tetap memberikan kontribusi meski hanya mengalami peningkatan rata-rata 0,15 per tahun (Badan Pusat Statistik, 2019).

Selain itu besarnya pengeluaran pemerintah menjadi ukuran tentang seberapa besar perhatian pemerintah pada usaha pengembangan kualitas sumber daya manusia salah satunya dengan pengeluaran pada bidang pendidikan. Menurut Nugroho (2016) semakin tinggi pendidikan, maka hidup manusia akan menjadi semakin berkualitas dalam kaitannya dengan perekonomian secara nasional, semakin tinggi kualitas hidup suatu bangsa, maka akan semakin tinggi tingkat pertumbuhan dan kesejahteraan bangsa tersebut. Makin tinggi tingkat pendidikan tenaga kerja maka akan semakin tinggi produktivitasnya dan dengan demikian juga akan semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Beberapa literatur terdahulu menunjukkan tingkat pendidikan yang diproksi dengan pengeluaran untuk pendidikan memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi Mduduzi & Kristen (2018) Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Gheraia et al. (2021) menghasilkan pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan di kerajaan Arab Saudi memberikan pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi periode 1990 hingga 2017. Selain itu Wardhana et al. (2020) juga melakukan penelitian terkait pendidikan yang penelitiannya memberikan hasil dimana rata-rata lama sekolah merupakan variabel yang paling signifikan secara statistik terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang mengkaji terkait pendidikan, dengan tujuan untuk menguji bagaimana pendidikan yang

diukur dengan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Angka Partisipasi Sekolah (APS) dapat memicu perkembangan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah.

KERANGKA TEORI

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses kenaikan jumlah produksi pada perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk pendapatan nasional yang diukur dengan besarnya pertumbuhan domestik regional bruto (PDRB). Produk Domestik Regional Bruto adalah total nilai pasar semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu wilayah regional atau provinsi dalam kurun waktu satu tahun tertentu dan dalam pengukurannya dapat menggunakan tiga jenis pendekatan yaitu pendekatan pendapatan, pendekatan produksi dan pendekatan pengeluaran.

Pendekatan produksi adalah penghitungan nilai tambah barang dan jasa yang diproduksi oleh sektor ekonomi dengan cara mengurangi biaya antara dari total nilai produksi bruto sektor atau subsektor tersebut. Kegunaan pendekatan ini adalah untuk memperkirakan nilai tambah dari sektor yang produksinya berbentuk fisik, seperti pertanian, pertambangan, dan industri lainnya. Nilai tambah diperoleh dari selisih antara nilai produksi dan nilai biaya antara di mana biaya antara yaitu biaya bahan baku/ penolong yang berasal dari luar sektor ekonomi dan dipakai dalam proses produksi.

Menurut teori pertumbuhan Neo Klasik laju tingkat pertumbuhan yang dapat dicapai suatu negara tergantung

kepada perkembangan faktor-faktor produksi seperti penduduk, tenaga kerja, dan akumulasi modal di mana tingkat kemajuan teknologi tingkat perkembangan teknologi, peranan modal dalam menciptakan pendapatan negara (produksi marjinal modal) dikalikan dengan tingkat perkembangan stok modal, serta peranan tenaga kerja dalam menciptakan pendapatan negara (produktivitas marginal tenaga kerja) dikalikan dengan tingkat pertambahan tenaga kerja. Pertumbuhan output selalu bersumber dari satu atau lebih dari tiga faktor yakni kenaikan kualitas dan kuantitas tenaga kerja, penambahan modal (tabungan dan investasi) dan penyempurnaan teknologi (Lincoln, 2010).

Teori ekonomi modern yaitu model pertumbuhan endogen (*endogenous growth model*) yang fokus membahas peran modal manusia dengan penambahan modal fisik dan tenaga kerja serta adanya modal manusia sebagai input dalam fungsi produksi (Anwar, 2013).

Pendidikan

Teori modal manusia adalah upaya untuk mengukur nilai sebenarnya dari suatu investasi dalam modal manusia dan berkaitan erat dengan bidang sumber daya manusia. Pendidikan dan kesehatan adalah kualitas utama yang meningkatkan sumber daya manusia dan juga berkontribusi langsung pada pertumbuhan ekonomi. konsep modal manusia pada dasarnya adalah pendidikan atau intelektual, keterampilan dan pengalaman kerja. Istilah modal manusia selanjutnya pada umumnya didefinisikan sebagai akumulasi pendidikan, termasuk pengetahuan dan keterampilan pada usia kerja yang terkumpul melalui pendidikan formal, pelatihan dan pengalaman.

Pendidikan merupakan salah satu unsur dalam ilmu pengetahuan dan keterampilan sikap. Perilaku pada umumnya dapat diperoleh di lingkungan sekolah atau pendidikan formal, tidak hanya itu pendidikan individu juga dapat memiliki kemampuan untuk mengembangkan diri guna mencapai kehidupan yang lebih baik. Jika melihat tingkat pendidikan formal maupun non formal dapat diketahui salah satunya dari tingkat pendidikannya (Dores et al., 2015).

Pendidikan dipandang sebagai investasi jangka panjang dimana pendidikan merupakan bentuk investasi sumber daya manusia yang harus lebih diprioritaskan sejajar dengan investasi modal fisik (Aidar & Muhajir, 2014). Pendidikan memiliki peranan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam upaya menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas (Budiarti & Seosaty, 2014). Kontribusi pendidikan terhadap pertumbuhan menjadi semakin kuat setelah memperhitungkan efek interaksi antara pendidikan dan investasi fisik lainnya, artinya investasi modal fisik akan berlipat ganda nilai tambahnya di kemudian hari jika pada saat yang sama dilakukan juga investasi SDM, yang secara langsung akan menjadi pelaku dan pengguna dalam investasi fisik tersebut (Widiansyah, 2017).

Peningkatan taraf pendidikan memberi manfaat yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan sumbangsi yang diberikan berupa: 1) manajemen perusahaan yang dikembangkan lebih efisien, 2) menggunakan teknologi modern dalam kegiatan ekonomi dapat lebih cepat berkembang, 3) pendidikan yang tinggi dapat meningkatkan daya pemikiran masyarakat, dan 4) berbagai pakar dan tenaga ahli yang diperlukan dapat tersedia (Sukirno, 2016).

Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling*) menggambarkan jumlah yang digunakan untuk penduduk usia 15 ke atas dalam menjalani pendidikan formal. RLS dapat digunakan untuk mengetahui kualitas pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah. Perhitungan rata-rata lama sekolah menggunakan dua batasan yang dipakai sesuai kesepakatan beberapa negara. Rata-rata lama sekolah memiliki batas maksimumnya 15 tahun dan batas minimum sebesar 0 tahun. Menurut Yuhendri (2013) semakin tinggi pendidikan maka akan semakin tinggi pula peluang untuk memperoleh pekerjaan yang lebih layak dan penghasilan yang lebih tinggi. Rata-rata lama sekolah dapat dihitung dengan cara :

$$RLS = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

Dimana:

RLS : Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun keatas

x_i : Lama Sekolah Penduduk ke- i yang berusia 25 tahun

n : Jumlah Penduduk Usia 25 tahun ke atas

Harapan Lama Sekolah (HLS)

Harapan lama sekolah merupakan salah satu *output* yang dapat digunakan untuk memotret pemerataan pembangunan pendidikan di Indonesia. Karena harapan lama sekolah mengukur kesempatan pendidikan seseorang penduduk di mulai pada usia tujuh tahun. Menurut Kahar (2018) secara sederhana, harapan lama sekolah merupakan indikator yang menggambarkan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada

umur tertentu di masa mendatang. Harapan Lama Sekolah (HLS) dapat dihitung dengan cara:

$$HLS_a^t = \sum_{i=a}^t \frac{E_i^t}{P_i^t}$$

Dimana :

HLS_a^t : Harapan Lama Sekolah pada usia a dan pada tahun t

E_i^t : Partisipasi Sekolah Penduduk Usia i pada tahun t

P_i^t : Populasi penduduk usia i yang bersekolah pada tahun i

i : Usia ($a, a+1, \dots, n$)

Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Makin tinggi APS berarti makin banyak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah. Angka partisipasi sekolah (APS) digunakan sebagai standar ukuran kemajuan pendidikan. APS menunjukkan rasio masyarakat usia sekolah tertentu yang sedang menempuh sekolah terhadap masyarakat usia sekolah (16-18 tahun) secara keseluruhan.

Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan

Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu komponen kebijakan fiskal yang terutama bertujuan untuk mencapai kestabilan ekonomi dengan tetap mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pemerintah terhadap sektor pendidikan merupakan bagian

dari pengeluaran pemerintah yang memacu kesejahteraan masyarakat dan akhirnya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Intervensi pemerintah dalam bidang pendidikan juga dalam rangka penanaman nasionalisme dan nilai-nilai kebangsaan (Khairunnisa et al., 2015).

Teori Adolf Wagner menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah dan kegiatan pemerintah semakin lama semakin meningkat, dimana dalam suatu perekonomian apabila pendapatan per kapita meningkat maka secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat terutama disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan, rekreasi, kebudayaan dan sebagainya (Solikin, 2018).

Alokasi anggaran pengeluaran pemerintah terhadap pendidikan merupakan wujud nyata dari investasi untuk meningkatkan produktivitas masyarakat. Pengeluaran pembangunan pada sektor pembangunan dapat dialokasikan untuk penyediaan infrastruktur pendidikan dan menyelenggarakan pelayanan pendidikan kepada seluruh penduduk Indonesia secara merata.

Pendidikan Dalam Perspektif Islam

Pada dasarnya, Islam telah memberikan pijakan yang jelas tentang tujuan dan hakikat pendidikan, yakni memberdayakan potensi fitrah manusia yang condong kepada nilai-nilai kebenaran dan kebajikan agar dapat menjadikan dirinya sebagai hamba. Oleh karena itu, pendidikan berarti suatu proses membina seluruh potensi manusia sebagai makhluk yang beriman dan bertakwa, berfikir dan berkarya, untuk kemaslahatan diri dan lingkungannya (Noor, 2015).

Pendidikan dalam perspektif al-Qur'an adalah pendidikan yang memfokuskan diri pada pembinaan

manusia secara pribadi dan kelompok sehingga mampu menjalankan fungsinya sebagai hamba Allah dan khalifah-Nya guna membangun dunia ini sesuai dengan konsep yang ditetapkan Allah. Jika hal ini bisa terwujud maka umat Islam akan mampu mengaplikasikan ajaran Islam secara komprehensif (Daulay & Dalimunthe, 2004).

Pada hakikatnya pendidikan dalam Islam memiliki tujuan untuk mewujudkan perubahan menuju pada kebaikan, baik pada tingkah laku individu maupun pada kehidupan masyarakat di lingkungan sekitarnya. Proses pendidikan terkait dengan kebutuhan dan tabiat manusia. Sementara tabiat manusia tidak lepas dari tiga unsur yaitu jasad, ruh, dan akal. Karena itu tujuan pendidikan dalam Islam secara umum dibangun berdasarkan tiga komponen tersebut, yang masing-masing harus dijaga keseimbangannya (*tawazun*) (Aidar & Muhajir, 2014).

Menurut Hasan (2002) secara umum pendidikan dalam pandangan Islam yang termaktub dalam al-Quran bertujuan pembentukan insan saleh (manusia yang baik) dan beriman kepada-Nya serta pembentukan masyarakat yang saleh yang mengikuti petunjuk agama Islam dalam segala urusan nya. Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa tujuan pendidikan dalam Islam yang digariskan dalam al-Qur'an bersifat religius, tetapi agama yang dimaksudkan oleh Islam bukan hanya bersifat personal, melainkan juga secara inheren bersifat sosial dan kultural. Di samping itu, pendidikan dalam al-Qur'an memiliki tiga segi tujuan, yaitu tercapainya tujuan *hablum minallah* (hubungan dengan Allah), tercapai tujuan *hablum minannas* (hubungan dengan manusia), dan tercapai tujuan *hablum minal'alam* (hubungan dengan alam) (Firman, 2017).

Islam sangat menekankan umatnya untuk belajar dan berpendidikan. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan banyaknya seruan-seruan untuk belajar yang dapat ditemui baik di dalam al-Qur'an maupun hadist, beberapa di antaranya;

a. QS At – Taubah, 9:122

“Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi (ke medan perang). Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya”.

b. HR. Ibnu Majah

“Menuntut ilmu wajib atas tiap muslim (baik muslimin maupun muslimah)”

c. HR Tirmidzi

“Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia maka wajib baginya memiliki ilmu, dan barang siapa yang menghendaki kehidupan Akhirat, maka wajib baginya memiliki ilmu, dan barang siapa menghendaki keduanya maka wajib baginya memiliki ilmu”.

Kedudukan orang yang berpendidikan sangat dimuliakan dalam Islam, Allah Swt telah berfirman dalam al-Qur'an.

“... Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Mujadalah: 11)

Pendidikan tidak hanya menyangkut aspek materiil dan keduniawian saja, namun juga terkait dengan

aspek spiritual dan berorientasi pada akhirat. Sehingga, desain sistem pendidikan harus mampu mengakomodasi kedua aspek tersebut secara seimbang. Keseimbangan ini akan tercapai apabila sisi yang dibangun dalam dunia pendidikan ini bukan hanya dari aspek pengetahuan semata, melainkan juga aspek akhlak dan perilakunya (Almizan, 2016).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif yang menggunakan data numerik atau angka-angka. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dalam bentuk angka dan analisisnya menggunakan statistik, yang sumber data diperoleh dari instansi terkait permasalahan penelitian.

Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2010). Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu variabel Rata-Rata Lama Sekolah (X_1), Harapan Lama Sekolah (X_2), Angka Partisipasi Sekolah (X_3) dan Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan (X_4) sebagai variabel independen kemudian pertumbuhan ekonomi (Y) yang diproksikan dalam PDRB perkapita sebagai variabel dependen.

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel yang merupakan gabungan antara data *cross section* yaitu data dari 24 kabupaten/kota di Provinsi

Sulawesi Selatan dan data time series dari tahun 2017-2019. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data dapat diakses dari berbagai instansi yang terkait dengan permasalahan penelitian seperti BPS (Badan Pusat Statistik) dan Kemendikbud.

Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data panel yang merupakan alat analisis regresi dimana data dikumpulkan secara individu (*cross section*) dan diikuti pada waktu tertentu (*time series*) dengan melalui tiga pendekatan, yaitu *common effect*, *fixed effect*, dan *random effect*. Pendekatan tersebut selanjutnya akan dipilih model yang tepat untuk penelitian dengan melakukan uji chow dan uji hausman. Uji chow dilakukan untuk membandingkan model terbaik antara common dan fixed. Sedangkan uji hausman akan menentukan model yang tepat antara random dengan fixed.

Adapun model persamaan regresi data panel yang digunakan pada penelitian ini yaitu:

$$\text{LOG(PDRB)}_{it} = \alpha + \beta_1 \text{RLS}_{it} + \beta_2 \text{HLS}_{it} + \beta_3 \text{APS}_{it} + \beta_4 \text{LOG(PPSP)}_{it} + e_{it}$$

Dimana:

PDRB = Pertumbuhan Ekonomi

i = Kabupaten/Kota

t = waktu (2017-2019)

α = konstanta

$\beta_1 - \beta_5$ = Koefisien

RLS = Rata-Rata Lama Sekolah

HLS = Harapan Lama Sekolah

APS = Angka Partisipasi Sekolah

PPSP = Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan

e = error

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan tampilan atau deskriptif data yang terdiri dari nilai rata-rata (mean), minimum, maksimum, standar deviasi dari setiap variabel penelitian. Hasil analisis statistik deskriptif ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 1 Hasil Analisis Deskriptif

	PDRB	RLS	HLS	APS	PPSP
Mean	12948.27	7.893750	13.12056	71.01611	1407.323
Median	7085.725	7.680000	12.95000	70.95000	1261.850
Maximum	122465.8	11.20000	15.56000	89.04000	4262.950
Minimum	3147.390	5.980000	11.93000	56.52000	860.1100
Std. Dev.	21532.00	1.187903	0.860727	7.423690	632.9375
Observations	72	72	72	72	72

Sumber: *Olah Data Eviews, 2021*

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan hasil analisis sebagai berikut:

- Nilai rata-rata variabel produk domestik regional bruto sebesar 12948.27 dengan standar deviasi 21532.00. Adapun nilai produk domestik regional bruto (Y) tertinggi sebesar 122465.8 dan nilai minimum sebesar 3147.390.
- Nilai rata-rata variabel rata-rata lama sekolah (X₁) sebesar 7.89, dengan standar deviasi 1.18. Adapun nilai variabel rata-rata lama sekolah tertinggi sebesar 11.20 dan nilai minimum sebesar 5.98.
- Nilai rata-rata variabel angka harapan lama sekolah (X₂) sebesar 13.12, dengan standar deviasi 0.86. Adapun nilai nilai variabel harapan lama sekolah tertinggi sebesar 15.56 dan nilai minimum sebesar 11.93

- d. Nilai rata-rata variabel angka partisipasi sekolah (X_3) sebesar 71.01, dengan standar 7.42. Adapun nilai variabel angka partisipasi sekolah tertinggi sebesar 89.04 dan nilai minimum sebesar 56.52.
- e. Nilai rata-rata variabel pengeluaran pemerintah sektor pendidikan (X_4) sebesar 1407.323, dengan standar 632.9375. Adapun nilai variabel pengeluaran pemerintah sektor pendidikan tertinggi sebesar 4262.950 dan nilai minimum sebesar 860.1100.

Analisis Regresi Data Panel

1. Uji Spesifikasi Model

a. Uji *Likelihood* (*Chow-Test*)

Uji Chow digunakan untuk memilih antara *Common Effect Model* atau *Fixed Effect Model*.

H_0 : Memilih *Common Effect Model*, jika nilai prob *Cross-section F* besar dari 0,05 atau $> \alpha = 5\%$.

H_1 : Memilih *Fixed Effect Model*, jika nilai prob *Cross-section F* kecil dari 0,05 atau $< \alpha = 5\%$

Tabel 2 Hasil Uji *Likelihood* (*Chow-Test*)

Effect Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	198.180405	(23,44)	0.0000
Cross-section Chi-square	334.806414	23	0.0000

Sumber: *Olah Data Eviews, 2021*

Hasil uji chow di atas menunjukkan nilai prob *cross-section chi-square* sebesar 0,0000 yang berarti lebih kecil dari 0.05 maka H_0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa model *fixed effect* lebih baik dibandingkan model *common effect*.

b. Uji Hausman

Uji Chow digunakan untuk memilih antara *Fixed Effect Model* atau *Random Effect Model*.

H_0 : Memilih *Random Effect Model*, jika nilai prob *Cross-section F* besar dari 0,05 atau $> \alpha = 5\%$.

H_1 : Memilih *Fixed Effect Model*, jika nilai prob *Cross-section F* kecil dari 0,05 atau $< \alpha = 5\%$

Tabel 3 Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	98.628709	4	0.0000

Sumber: *Olah Data Eviews, 2021*

Berdasarkan hasil uji hausman menunjukkan nilai prob *cross-section random* sebesar 0,0000 lebih kecil dari 0,05 maka H_0 ditolak, yang berarti model *fixed effect* lebih baik dibandingkan model *random effect*. Setelah uji chow dan uji hausman yang keduanya menunjukkan bahwa model yang tepat adalah *Fixed Effect*. Selanjutnya adalah analisis untuk menguji keseluruhan variabel independen dan pengujian koefisien determinasi.

2. Model Estimasi Data Panel

Tabel 5 Hasil Estimasi Data Panel

R-squared	0.998740	Mean dependent var	9.044239
Adjusted R-squared	0.997967	S.D. dependent var	0.732039
S.E. of regression	0.033005	Akaike info criterion	-3.699009
Sum squared resid	0.047931	Schwarz criterion	-2.813639
Log likelihood	161.1643	Hannan-Quinn criter.	-3.346541
F-statistic	1291.975	Durbin-Watson stat	2.032887
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: *Olah Data Eviews, 2021*

a. Uji koefisien Determinasi

Koefisiensi determinasi (R^2) menunjukkan seberapa besar variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen. Hasil Adjusted R-squared sebesar 0.9987 yang artinya bahwa variabel Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Harapan Lama Sekolah (HLS), Angka Partisipasi Sekolah (APS). Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan (PPSP) dapat menjelaskan variabel pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 99.87% sedangkan sisanya sebesar 0,13% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

b. Uji F

Uji statistik F dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen secara simultan mempengaruhi variabel dependen atau tidak. Hasil uji F dapat dilihat bahwa nilai prob(F-statistic) sebesar $0.000000 < 0.05$. Maka dapat disimpulkan variabel RLS, HLS, APS, dan PSP secara simultan atau bersama-sama berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan.

c. Uji t

Tabel 5 Hasil Uji t

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3.542464	0.669552	5.290797	0.0000
RLS	0.242004	0.039580	6.114347	0.0000
HLS	0.177137	0.058461	3.030013	0.0041
APS	-0.001501	0.001417	-1.059266	0.2953
LOG(PPSP)	0.191120	0.078428	2.436885	0.0189

Sumber: *Olah Data Eviews, 2021*

Uji t digunakan untuk menunjukkan seberapa besar variabel dependen mempengaruhi variabel dependen. Berdasarkan model regresi di atas, dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pengaruh Rata-Rata Lama Sekolah terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dengan nilai prob sebesar 0,0000 (lebih kecil dari 0,05) yang berarti bahwa RLS berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan dengan nilai *coefficient* 0,242004 maka apabila RLS meningkat sebesar 1% maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,24%. Peningkatan pendidikan akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja, yang pada gilirannya merupakan motor penggerak bagi pertumbuhan ekonomi. Hasil ini berbeda dengan yang dikemukakan Mahrany (2012) bahwa rata-rata lama sekolah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, namun hasil penelitian ini didukung oleh Bado & Hasbiah (2017) yang menyatakan bahwa pertumbuhan kinerja pendidikan pada Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Sulawesi Selatan selama 10 tahun terus mengalami peningkatan. Begitupun dengan Handayani et al. (2016) dan Yuhendri (2013) yang mengatakan bahwa rata-rata lama sekolah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dimana tingkat pendidikan yang semakin tinggi juga akan menciptakan peluang yang tinggi untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan penghasilan yang lebih baik. Menurut Anwar (2013) pendidikan memiliki peranan penting

sebagai salah satu sumber utama untuk mencapai pembangunan ekonomi yang lebih baik.

b. Pengaruh Harapan Lama Sekolah terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Temuan dari penelitian ini menunjukkan nilai prob Harapan Lama Sekolah (HLS) sebesar 0,0041 (lebih kecil dari 0,05) yang berarti bahwa HLS berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan dengan nilai *coefficient* 0,177137 maka apabila RLS meningkat sebesar 1% maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,17%. Sektor pendidikan memainkan peran utama dalam membentuk kemampuan sebuah Negara berkembang untuk menyerap teknologi modern dan mengembangkan kapasitas produksi agar terciptanya pertumbuhan dan pembangunan yang berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan Hanusheka & Woessmannb (2020) dan Jamel et al. (2020) yang mengungkapkan bahwa peningkatan kualitas dan kuantitas dari pendidikan memberikan pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Menurut Chen & Feng (2000) pendidikan yang tinggi akan mengarah pada peningkatan pertumbuhan ekonomi.

c. Pengaruh Angka Partisipasi Sekolah terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hasil pengujian hipotesis variabel Angka Partisipasi Sekolah (APS) menunjukkan nilai prob sebesar 0,2953 (lebih besar dari 0,05) yang berarti bahwa APS tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan maka, tinggi rendahnya nilai APS tidak mempengaruhi pertumbuhan

ekonomi. Hasil penelitian ini berbeda dengan yang dikemukakan oleh Yuhendri (2013) bahwa semakin tinggi pendidikan, hidup manusia akan semakin berkualitas. Dalam kaitannya dengan perekonomian secara umum (nasional), semakin tinggi kualitas hidup suatu bangsa, semakin tinggi tingkat pertumbuhan dan kesejahteraan bangsa tersebut.

Hasil penelitian ini juga tidak sejalan dengan penelitian Fahlevi & Risma (2019) bahwa tingkat pendidikan yang diprosikan dengan angka partisipasi sekolah menunjukkan pengaruh terhadap nilai PDRB. Hal ini disebabkan karena masih rendahnya APS di Sulawesi Selatan khususnya pada usia 16-18 tahun yang mengisyaratkan perlunya peningkatan upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan pencapaian pendidikan setiap tahunnya (BPS, 2019).

d. **Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Hasil pengujian hipotesis variabel Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan (PPSP) menunjukkan nilai prob sebesar 0,0189 (lebih kecil dari 0,05) yang berarti bahwa PPSP berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan dengan nilai *coefficient* 0,191120 maka apabila PPSP meningkat sebesar 1 milyar maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,17%. Menurut Ladung (2018) pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan merupakan investasi tidak langsung yang diberikan pemerintah dalam meningkatkan modal manusia dengan menekankan pada pentingnya modal dalam produksi. Pengetahuan dan keterampilan teknologi merupakan peralatan

immaterial dimana tanpa keduanya modal manusia tidak dimanfaatkan secara produktif. Semakin besar pengeluaran pemerintah disektor pendidikan akan meningkatkan modal manusia yang nantinya akan meningkatkan produktivitas yang kemudian dapat memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil tersebut juga didukung oleh penelitian Althofia (2015), Lubis (2012), dan Mallick (2016) yang menyatakan bahwa variabel pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa secara simultan keempat variabel independen dalam penelitian ini yaitu rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, angka partisipasi sekolah, dan pengeluaran pemerintah sektor pendidikan menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen, pertumbuhan ekonomi. Namun secara parsial hanya variabel angka partisipasi sekolah yang tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi sementara variabel RLS, HLS dan pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Adapun saran yang diajukan oleh penelitian selanjutnya adalah penambahan variabel berkaitan dengan determinan pendidikan seperti jumlah guru, jumlah sekolah dan angka melek huruf. Selain itu juga memperluas lokasi penelitian ke tingkat nasional bahkan ke tingkat internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Aidar, N., & Muhajir. (2014). Analisis Pengaruh Belanja Pemerintah Sektor Kesehatan Dan Pendidikan Terhadap Pendapatan Per Kapita Di Provinsi Aceh. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik Indonesia*, 1(November 2014), 70–78.
- Almizan. (2016). Pembangunan Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Maqdis : Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 1(2), 203–222. <http://journal.febi.uinib.ac.id/index.php/maqdis/article/view/46>
- Althofia, N. Y. (2015). Pengaruh pengeluaran pemerintah untuk pendidikan, kesehatan dan infrastruktur terhadap pdrb dan penyerapan tenaga kerja di provinsi jawa barat tahun 2012. *Jurnal Aplikasi Statistika Dan Komputasi Statistik*, 7, 1–20.
- Anwar, A. (2013). *Peran Modal Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional Di Jawa*. 79–94.
- Bado, B., & Hasbiah, S. (2017). Analisis Pertumbuhan Belanja Sektor Pendidikan Terhadap Capaian Rata-Rata Lama Sekolah Di Sulawesi Selatan. *Jurnal Economic*, 5, 238–249.
- BPS. (2018). *Statistik Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan*. Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan.
- Budiarti, D., & Seosaty, Y. (2014). Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Mojokerto Tahun 2000-2011. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, 2, 1–19.
- Daulay, H. P., & Dalimunthe, I. S. (2004). *Dinamika Pendidikan Islam*. Citapustaka Media.
- Dores, E., Rosa, Y. Del, & Jolianis. (2015). *Pengaruh Angka Melek Huruf dan Angka Harapan Hidup Terhadap*

Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Sumatera Barat.

- Fahlevi, M., & Risma, O. R. (2019). *Analisis Tingkat Pendidikan Dan TPAK Terhadap PDRB Perkapita*. 46–55. [https://doi.org/10.34021/ve.2020.03.02\(3\)](https://doi.org/10.34021/ve.2020.03.02(3))
- Firman, A. J. (2017). Paradigma Hasan Langgulung tentang Konsep Fitrah dalam Pendidikan Islam. *Journal. Uhamka.Ac.Id*, 8(2), 1–21.
- Gheraia, Z., Abed, H., Saadaoui, S., Sciences, M., & Sciences, M. (2021). *The Effect Of Education Expenditure On Economic Growth : The Case Of The Kingdom Of Saudi Arabia*. 9(1), 14–23. <https://doi.org/10.18488/journal.73.2021.91.14.23>
- Handayani, N. S., IKG bendesa, & Yuliarmi, N. N. (2016). *Pengaruh Jumlah Penduduk, Angka Harapan Hidup, Rata-Rata Lama Sekolah dan PDRB Per Kapita Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Bali*. 10, 3449–3474.
- Hanusheka, E. A., & Woessmannb, L. (2020). *Education, knowledge capital, and economic growth*. 171–182.
- Jamel, L., Ltaifa, M. Ben, Elnagar, A. K., Derbali, A., & Lamouchi, A. (2020). *The Nexus Between Education And Economic Growth: Analysing Empirically A Case Of Middle-Income Countries*. 3(2), 43–60. [https://doi.org/10.34021/ve.2020.03.02\(3\)](https://doi.org/10.34021/ve.2020.03.02(3))
- Kahar, A. M. (2018). *Analisis Angka Harapan Lama Sekolah di Indonesia Timur Menggunakan Weighted Least Squares Regression*. 04(01), 32–41.
- Khairunnisa, K., Hartoyo, S., & Anggraeni, L. (2015). *Determinan Angka Partisipasi Sekolah SMP di Jawa Barat*. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*

- Indonesia*, 15(1), 91. <https://doi.org/10.21002/jepi.v15i1.444>
- Ladung, F. (2018). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Di Bidang Pendidikan, Kesehatan Dan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Parepare. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 1, 20–30.
- Lincoln, A. (2010). *Ekonomi Pembangunan* (Edisi 5). UPP STIM YKPN.
- Lubis, C. A. B. E. (2012). Pengaruh Jumlah Tenaga Kerja, Tingkat Pendidikan Pekerja Dan Pengeluaran Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Economia*, 10, 187–193.
- Mahrany, Y. (2012). *Pengaruh Indikator Komposit Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Sulawesi Selatan*.
- Mallick, L. (2016). Impact of educational expenditure on economic growth in major Asian countries : Evidence from econometric analysis. *Theoretical and Applied Economics*, XXIII(2), 173–186.
- Mduduzi, B., & Kristen, F. (2018). *Education and economic growth in Cape and Natal colonies : learning from history*. 84910. <https://mpra.ub.uni-muenchen.de/84910/>
- Noor, F. A. (2015). *Islam Dalam Perspektif Pendidikan*.
- Nugroho, S. B. M. (2016). Pengaruh Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *Media Ekonomi Dan Manajemen*, 29(2).
- Solikin, A. (2018). Pengeluaran Pemerintah Dan Perkembangan Perekonomian (Hukum Wagner) Di Negara Sedang Berkembang: Tinjauan Sistematis. *Info Artha*, 2(1), 65–89. <https://doi.org/10.31092/jia.v2i1.237>

- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sukirno, S. (2016). *Makro Ekonomi: Teori Pengantar*. Raja Grafindo Persada.
- Sulistyowati, N., Priyarsono, H. D. S., & Tambunan, M. (2010). Dampak Investasi Pendidikan Terhadap Perekonomian Dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Dan Kota Di Jawa Tengah. *Organisasi Dan Manajemen*, 6(2), 158–170.
- Wardhana, A., Kharisma, B., & Ikhlasni, Z. (2020). Pendidikan Dan Pertumbuhan Ekonomi Antar Kabupaten. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 9, 835–850.
- Widiansyah, A. (2017). *Peran Ekonomi dalam Pendidikan dan Pendidikan dalam Pembangunan Ekonomi*. XVII(2).
- Yuhendri. (2013). *Pengaruh Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat*.

**PENGARUH PDB, TINGKAT PENGANGGURAN,
TINGKAT KEMISKINAN DAN PERTUMBUHAN
EKONOMI TERHADAP INDEKS
PEMBANGUNAN MANUSIA:
Studi Kasus di Provinsi Indonesia Timur
Periode 2016-2020**

Dr. Darmawan

(darmawan@uin-suka.ac.id)

Erlin Socalina

(Erlinsocalina88@gmail.com)

Faizah Nabila Mubarak

(faizahnabila.fn@gmail.com)

PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan alat untuk mencapai tujuan nasional, dan pertumbuhan ekonomi merupakan indikator untuk menilai keberhasilan pembangunan suatu negara. Pembukaan UUD 1945 menguraikan tujuan bangsa Indonesia yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam pelaksanaan pembangunan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan tujuan utama negara berkembang. Hal ini

dikarenakan pertumbuhan ekonomi sangat erat kaitannya dengan pertumbuhan barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat. Meier dan Stiglitz juga menyatakan dalam Kuncoro (2010) bahwa pada generasi kedua, teori pembangunan menekankan pada akumulasi modal manusia yang menciptakan momentum pembangunan yang lebih produktif melalui pengetahuan, kesehatan, gizi yang lebih baik dan peningkatan keterampilan.

Pembangunan manusia merupakan salah satu indikator kemajuan suatu negara. Bisa dikatakan bahwa suatu negara tidak hanya maju dari segi pertumbuhan ekonominya yang pesat, tetapi yang terpenting adalah keberhasilan pembangunan manusianya. Pembangunan manusia diartikan sebagai proses pemberian lebih banyak pilihan kepada masyarakat melalui upaya pemberdayaan yang mengutamakan upaya peningkatan kemampuan dasar manusia agar dapat berpartisipasi penuh dalam semua bidang pembangunan (BPS, 2011). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah salah satu model untuk mengukur keberhasilan suatu negara atau wilayah dalam bidang pembangunan manusia (BPS, 2012). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya adalah Produk Domestik Bruto.

Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian suatu negara dalam periode tertentu. PDB merupakan penjumlahan nilai akhir barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Nilai PDB yang besar menunjukkan sumber daya ekonomi suatu negara besar begitupula sebaliknya (Badan Pusat Statistik, 2017). Teori ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Anita dan Dailami (2019), dimana hasil regresi data

panel menunjukkan bahwa PDB berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di Sumatera Utara, dengan nilai koefisien regresi 0,379 dan nilai signifikan 0,010. Dalam hal ini besarnya PDB suatu daerah akan berdampak pada peningkatan kualitas masyarakatnya. PDB yang besar tersebut tentunya akan membantu pemerintah dalam meningkatkan semua fasilitas umum di masyarakat, seperti pendidikan dan kesehatan.

Faktor lain yang mempengaruhi nilai IPM adalah tingkat Pengangguran. Secara internasional pengertian dari pengangguran ialah seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatab kerja aktif dan sedang mencari pekerjaan dengan tingkat upah tertentu namun belum memperoleh pekerjaan yang diinginkannya (Susanti, 2013). Dalam hasil penelitian Marsela Candrawati (2020) menunjukkan bahwa tingkat pengangguran memiliki pengaruh yang signifikan terhadap indeks pembangunan manusia, karena pengangguran merupakan masalah yang sangat kompleks, karena secara simultan dipengaruhi oleh berbagai faktor interaktif, sejauh menyangkut pengangguran, hal tersebut tidak dapat diperoleh dengan segera. Alamat, yang dapat menyebabkan kerentanan sosial dan kemungkinan kemiskinan (BPS, 2007).

Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi nilai IPM adalah Kemiskinan. Secara etimologis, kemiskinan berasal dari kata miskin yang artinya tidak memiliki harta benda dan serba kekurangan. Badan Pusat Statistik mendefinisikannya sebagai ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal dapat hidup dengan layak (Badan Pusat Statistik, 2017). Kemiskinan yang tinggi akan mempengaruhi tingkat keberhasilan pemerintah dalam menangani kesejahteraan masyarakat.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ningrum et al., (2020) dimana menunjukkan bahwa kemiskinan dan pengangguran memiliki pengaruh yang signifikan terhadap indeks pembangunan manusia, yang menunjukkan nilai probabilitasnya lebih kecil dari alpha (0,05) dikarenakan kemiskinan disebabkan oleh kondisi nasional atau permasalahan nasional dan global.

Selain PDB, Tingkat Pengangguran dan Kemiskinan, salah satu faktor terpenting yang mempengaruhi nilai IPM adalah Pertumbuhan Ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur prestasi ekonomi yang diterima suatu negara. Dalam arti ekonomi, pertumbuhan ekonomi berarti pertumbuhan fisik ekonomi (Dewi, 2017). Penelitian yang dilakukan oleh Syofya (2018) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap indeks pembangunan manusia Indonesia. Hal ini dikarenakan paradigma pembangunan saat ini adalah pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan pembangunan manusia yang dapat dilihat dari kualitas hidup masing-masing negara. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana kegiatan ekonomi akan memberikan pendapatan lebih bagi masyarakat dalam kurun waktu tertentu. Jika total kompensasi aktual yang menggunakan faktor-faktor produksi pada tahun tertentu lebih tinggi dari tahun sebelumnya, dianggap perekonomian sedang tumbuh.

Dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pemerintah sebagai badan pelaksana pembangunan nasional tentunya membutuhkan modal sebagai landasan pembangunan. Pemerintah menghabiskan atau berinvestasi dalam pembangunan manusia. Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan yang diambil oleh peme-

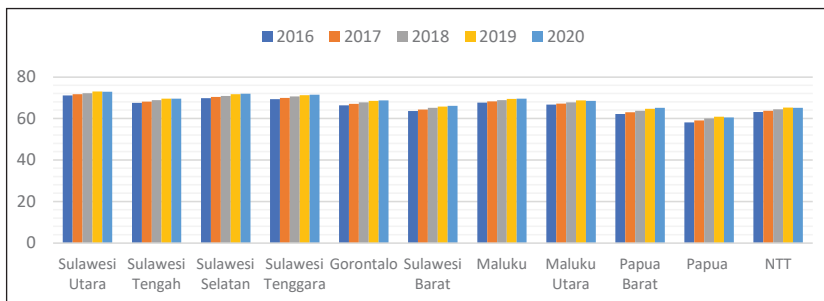
rintah. Dalam hal ini, pengeluaran pemerintah digunakan untuk menghimpun dana bagi sektor publik yang bahkan lebih penting dan menjadi prioritas untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia yang tercermin dalam *Human Development Index* (HDI) (Baeti, 2013). Laju pertumbuhan penduduk tahunan di kawasan Indonesia Timur sangat tinggi. Oleh karena itu, memiliki potensi sumber daya manusia yang siap untuk diberdayakan. Pelaksanaan otonomi daerah memberikan keleluasaan yang lebih besar kepada pemerintah daerah di Indonesia Timur, sehingga memungkinkan mereka untuk melaksanakan pembangunan daerah secara lebih mandiri. Perkembangan masyarakat miskin di kawasan timur Indonesia berfluktuasi setiap tahun, sehingga diperlukan beberapa solusi untuk meminimalkan tingkat fluktuasi tersebut agar pembangunan manusia lebih stabil.

Produk Domestik Bruto (PDB), tingkat pengangguran, kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi dapat menjadi pengaruh yang cukup serius bagi pembangunan manusia karena masing-masing faktor berperan penting dalam meningkatkan nilai IPM agar target capaian IPM menjadi terealisasi dengan baik. Peran pemerintah dalam meningkatkan IPM juga dapat berpengaruh melalui realisasi belanja negara dalam pelayanan publik. Peran pemerintah dalam kebijakan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal didasarkan pada pertimbangan bahwa daerahlah yang lebih mengetahui kebutuhan dan standar pelayanan bagi masyarakat di daerahnya, sehingga pemberian otonomi daerah diharapkan dapat memacu peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan paparan latar belakang diatas, maka tujuan dari penelitian ini

Pengaruh PDB, Tingkat Pengangguran, Tingkat Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia

adalah untuk mengetahui dan juga menganalisis apakah Pengaruh PDB, Tingkat Pengangguran, Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

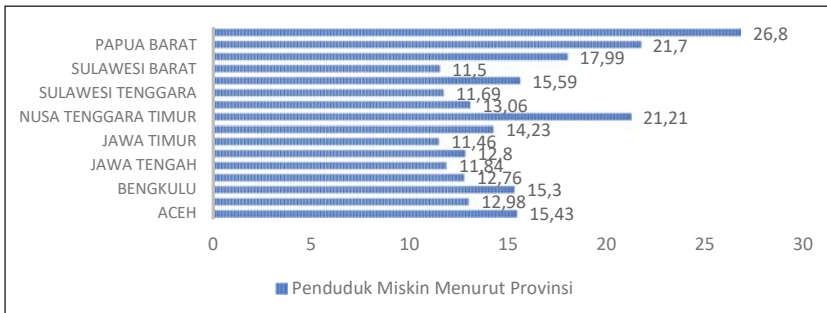
Gambar 1. Tingkat IPM Provinsi Indonesia Timur tahun 2016-2020



Sumber: data diolah (Badan Pusat Statistik, 2017)

Terlihat dari diagram diatas bahwa tingkat indeks pembangunan manusia selama periode 2016-2019 cenderung mengalami kenaikan, namun menuju periode 2020 terjadi fluktuatif pada masing-masing provinsi. Nilai Indeks Pembangunan Manusia Papua Barat dan Papua mendapati nilai yang cukup rendah dibandingkan dengan provinsi lainnya, hal ini juga dapat dilihat dari tingginya Penduduk Miskin di beberapa provinsi Indonesia Timur, dimana kemiskinan juga merupakan salah satu faktor terkuat untuk mempengaruhi indeks pembangunan manusia, berikut dapat dilihat pada tabel dibawah ini provinsi yang tingkat penduduk miskinannya tinggi.

Gambar 2. Penduduk Miskin Menurut Provinsi tahun 2020



Sumber: Data diolah (Badan Pusat Statistik, 2017)

Berdasarkan pemaparan diatas kami bermaksud melakukan penelitian untuk melihat bagaimanakah pengaruh Produk Dosmetik Bruto, Tingkat Pengangguran, Tingkat Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap perubahan Indeks Pembangunan Manusia di setiap provinsi Indonesia timur pada periode 2016-2020 baik secara parsial maupun secara simultan.

KERANGKA TEORITIS

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indeks yang menjelaskan cara untuk mengakses hasil pembangunan yang diperoleh dari pendapatan, kesehatan dan pendidikan. Belanja untuk mempertahankan kesejahteraan masyarakat merupakan modal yang cukup penting, namun belanja bukan akhir dari perkembangan manusia. Belanja modal digunakan untuk meningkatkan kemampuan manusia dan kemampuan setiap orang untuk menggunakannya (Rimawan et al., 2020). United Nations Development

Programme (UNDP) menyatakan bahwa IPM merupakan salah satu pendekatan yang digunakan untuk mengukur tingkat pembangunan manusia. Walaupun belum mampu untuk mengukur semua pengembangan manusia suatu negara, namun IPM cukup untuk mengukur aspek pokok dari pembangunan manusia yang dinilai mampu dalam penggambaran status kemampuan dasar penduduk.

IPM Merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan masyarakat dalam upaya untuk pembangunan kualitas hidup masyarakat. IPM juga merupakan data yang strategis selain dapat digunakan sebagai ukuran kinerja pemertintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (www.ipm.bps.go.id). IPM juga merupakan suatu ukuran dari dampak kinerja pembangunan wilayah dengan dimesensi yang sangat luas, karena memperlihatkan bagaimana kualitas penduduk suatu wilayah dalam hal harapan hidup, intelektualitas dan standar hidup layak (Susanti, 2013).

Produk Domestik Bruto

Produk Domestik Bruto menurut Sukirno (2013) dalam bukunya menyatakan bahwa PDB dapat diartikan sebagai nilai barang dan jasa yang di diproduksi oleh negara dalam satu tahun tertentu. PDB merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian suatu negara dalam periode tertentu. PDB merupakan penjumlahan nilai akhir barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Nilai PDB yang besar menunjukkan sumber daya ekonomi suatu negara besar begitupula sebaliknya.

Untuk menghitung angka-angka PDB terdapat tiga pendekatan yakni Pendekatan Produksi, Pendekatan

Pendapatan dan Pendekatan Pengeluaran. Secara konsep ketiga pendekatan tersebut akan memberikan hasil angka yang sama, dimana jumlah pengeluaran akan sama dengan jumlah akhir barang dan jasa yang dihasilkan dan akan sama pula dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksi (www.bps.go.id). Kuncoro (2001) dalam Susanti (2013) juga menyatakan bahwa pendekatan dengan pembangunan tradisional lebih dimaknai sebagai pembangunan yang lebih fokus terhadap peningkatan PDB suatu provinsi, kabupaten atau kota.

Dalam penelitian Sri et al (2010) menemukan bahwa variabel PDB berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Indeks pembangunan manusia juga dapat naik secara positif apabila terkenan guncangan Produk Domestik Bruto (Khan et al., 2018). Sedangkan dalam penelitian Dwi Wulandari (2019) variabel PDB memiliki korelasi negative secara jangka panjang terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Secara teoritis nilai PDB yang besar menunjukkan bahwa sumber ekonomi suatu negara cukup besar sehingga dapat menunjukkan bahwa kualitas hidup masyarakat cukup baik.

Tingkat Pengangguran

Secara internasional pengangguran merupakan arti dari keadaan seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja secara aktif sedang mencari pekerjaan (Susanti, 2013). Pengangguran berdasarkan keadaan yang menyebabkannya dibagi menjadi tiga jenis yakni, pengangguran friksional, pengangguran structural dan pengangguran konjungtur. Sedangkan bentuk pengangguran meliputi pengangguran terbuka, setengah pengangguran, tenaga kerja yang lemah dan tenaga kerja yang tidak produktif (Susanti, 2013).

Dalam hasil penelitian Marsela Candrawati (2020) menunjukkan bahwa tingkat pengangguran memiliki pengaruh yang signifikan terhadap indeks pembangunan manusia, karena pengangguran merupakan masalah yang sangat kompleks, karena secara simultan dipengaruhi oleh berbagai faktor interaktif, sejauh menyangkut pengangguran, hal tersebut tidak dapat diperoleh dengan segera. Sedangkan menurut hasil penelitian oleh Nurisqi Amalia (2018) pengangguran berpengaruh positif terhadap kemiskinan karena dengan tingginya pengangguran menyebabkan pengangguran juga meningkat. Pengangguran dikatakan juga dapat memediasi antara IPM dan kemiskinan dan juga memediasi antara pertumbuhan ekonomi dengan kemiskinan (Prasetyoningrum et al., 2018). Dengan meningkatnya pengangguran menunjukkan bahwa pemerintah dan masyarakat belum berhasil dalam pembangunan kualitas manusia dalam hal ketenagakerjaan.

Tingkat Kemiskinan

Secara etimologis, kemiskinan berasal dari kata miskin yang artinya tidak memiliki harta benda dan serba kekurangan. Supriatna (1997) menyatakan bahwa kemiskinan ialah situasi yang cukup terbatas dan terjadi bukan atas kehendak orang yang bersangkutan. Suatu penduduk dikatakan miskin ditandai dengan rendahnya tingkat pendidikan, produktivitas kerja, pendapatan, kesehatan dan gizi serta kesejahteraan hidupnya yang menunjukkan lingkaran ketidakberdayaannya. Kemiskinan merupakan suatu permasalahan yang terdapat dalam proses pembangunan yang bercirikan pengangguran dan keterbelakangan yang kemudian dapat meningkat menjadi ketidaksetaraan. Pada umumnya orang miskin memiliki

kemampuan bekerja yang lemah dan keterbatasan dalam mengakses ekonomi sehingga tertinggal oleh komunitas lain yang memiliki potensi lebih tinggi (Rimawan et al., 2020).

Untuk melihat tingkat kemiskinan dapat melalui pengukuran garis kemiskinan (GK). Garis Kemiskinan merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapitanya perbulan dibawah garis kemiskinan dapat diaktegorikan sebagai penduduk miskin. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang telah diukur dari sisi pengeluaran (www.bps.go.id). Dalam penelitian Regina et al., (2020) dan Dewi (2017) menyatakan bahwa tingkat kemiskinan berpengaruh negative signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Namun dalam penelitian Rimawan et al (2020) dinyatakan bahwa variabel indeks pembangunan manusia tidak berpengaruh terhadap kemiskinan. Pengaruh dari tingkat kemiskinan yang tinggi menunjukkan bahwa daerah tersebut belum meningkatkan kemampuan masyarakatnya dalam mengelola pembangunan hidup yang layak serta dapat menurunkan kualitas harapan hidup.

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur prestasi ekonomi yang diterima suatu negara. Dalam arti ekonomi, pertumbuhan ekonomi berarti pertumbuhan fisik ekonomi. Yakni dengan apa yang terjadi dalam pertambahan produksi

barang dan jasa serta perkembangan infrastruktur. Hal ini dapat diukur melalui perkembangan pendapatan riil nasional yang dicapai oleh negara pada periode tertentu (Dewi, 2017). Pertumbuhan ekonomi sejalan dengan pembangunan manusia yang perlu dibarengi dengan pemerataan pembangunan. Dengan pemerataan pembangunan maka terdapat jaminan bahwa warga akan merasakan hasil dari pembangunan ini.

Dalam hasil penelitian Regina et al (2020) dan Dewi (2017) menemukan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Sedangkan dalam penelitian Syofya (2018) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia. Hal ini dikarenakan paradigma pembangunan saat ini adalah pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan pembangunan manusia yang dapat dilihat dari kualitas hidup masing-masing negara. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana kegiatan ekonomi akan memberikan pendapatan lebih bagi masyarakat dalam kurun waktu tertentu.

Indeks Pembangunan Manusia dalam Perspektif Islam

Islam memandang bahwa manusia adalah makhluk yang Mulia dan telah ditinggikan derajatnya oleh Allah SWT dari makhluk-makhluk lainnya. Allah telah mengangkat harkat dan martabat manusia dengan memuliakan serta meninggikan derajatnya. Rafsajani (2014) dalam tulisannya menguraikan bahwa terdapat empat filosofis dasar-dasar pembangunan dalam pendekatan Islam, yakni Tauhid, Rububbiyyah, Khilafah dan Tazkiyah serta beberapa fitur penting dari konsep pembangunan Islam, sebagai berikut:

- a. Pembangunan ekonomi dalam Islam bersifat komprehensif, mengandung unsur spiritual, moral dan material. Pembangunan ini merupakan aktivitas yang berorientasi pada tujuan dan nilai. Aspek lainnya seperti moral, ekonomi, social spiritual dan fiscal tidak dapat terpisahkan. Pencapaian kebahagiaan tidak hanya dengan adanya kesejahteraan di dunia tetapi juga di akhirat.
- b. Fokus utama dalam pembangunannya adalah manusia dengan berbagai lingkungan kulturenya. Konsep ini berbeda dengan model pembangunan ekonomi modern dimanahanyamenegaskanpembangunanpembangunan melalui lingkungan fisik saja, namun dalam konsep Islam memperluas jangkauan pembangunan dari lingkungan fisik kepada manusianya.
- c. Pembangunanekonomiyakniaktivitasmultidimensional yang mana akan diserahkan pada keseimbangan faktor dan tidak menimbulkan ketimpangan.
- d. Pembangunan ekonomi ini juga melibatkan sejumlah perubahan baik secara kuantitatif maupun kualitatif dan juga selalu menyeimbangkan diantaranya.

Pilar pembangunan manusia adalah kebaikan atau kemaslahatan bagi manusia. Al-Qur'an secara eksplisit telah menjelaskan larangan untuk membuat kerusakan dimuka bumi, sehingga dalam hal ini penting setiap kebijakan yang diputuskan oleh manusia memperhatikan pilar ini. Dalam pelaksanaannya pilar ini hanya memiliki dua arah rambu yaitu halal dan haram, dimana masing-masing memiliki konsekuensi pahala ataupun dosa. Apabila dampak kebijakan memberikan kebaikan dalam kualitas hidup manusia maka hal tersebut halal dilakukan dan mereka berhak pula mendapatkan pahala dari Allah SWT begitupula

sebaliknya. Pada akhirnya pembangunan kualitas manusia akan pula dititikberatkan pada pembangunan keilmuan dan keimanan yang dapat menghasilkan generasi baru yang cerdas dan berilmu untuk memajukan islam serta memiliki semangat keimanan dan tauhid kepada Allah SWT. Sehingga Islam pun akan selalu hadir dalam setiap pola pikir masyarakat akan segala hal dalam kehidupannya (As,ad Bukhari, 2018).

Islam juga mengajarkan bahwa pekerjaan harus dilaksanakan oleh orang yang mengetahuinya dengan ilmu atau dengan ilmu atau dengan kata lain pekerjaan harus dikerjakan oleh orang yang ahli dibidangnya. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran dalam Firmannya QS: A;-Israa:36:

Yang artinya: "...dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawabnya".

Ayat ini menuntun manusia untuk senantiasa bekerja dengan mencegah keburukan dengan tidak berucap apa yang tidak diketahui, mengaku memiliki pengetahuan atau kompetensi lainnya padahal tidak memilikinya. Namun manusia bisa senantiasa meningkat kualitas pembangunan hidupnya dengan menggunakan pendengaran, penglihatan dan juga hati sebagai alat-alat untuk meraih pengetahuan.

Konsep pembangunan secara Islam tidak hanya berpaku pada aspek pembangunan keduniaan namun ruhiyah dan akhirat. Islam tidak pernah mengajar untuk memisahkan kedua hal tersbut namun mengajak kepada keadilan dan keseimbangan setiap individu tanpa melupakan kepentingan bersama. Konsep yang sudah diajarkan

sejak zaman Rasulullah yakni tidak hanya mengkayakan sebagian golongan dan memiskinkan golongan lainnya dan harus pula disertai rasa tanggungjawab, sehingga akan melahirkan keberkahan yang dapat diterima oleh Allah SWT.

Maka berdasarkan landasan teori diatas, penulis memunculkan beberapa hipotesis dan kerangka teori antara lain sebagai berikut:

H1 : Variabel PDB berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia

H2 : Variabel Pengangguran berpengaruh negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia

H3 : Variabel Kemiskinan berpengaruh negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia

H4 : Variabel Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode penelitian diskriptif kuantitatif. Metode deskriptif pada penelitian ini digunakan untuk menggambarkan bagaimana pengaruh dari PDB, tingkat pengangguran, kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia. Metode kuantitatif pada penelitian ini untuk menguji hipotesis-hipotesis yang telah ditetapkan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik yang menerbitkan laporan terkait data kependudukan. Populasi dalam penelitian ini adalah Provinsi Indonesia Timur dengan jumlah 11 provinsi berdasarkan data Web

Indonesia Timur (www.indonesiatimur.com) dengan periode penelitian 2016-2020, maka jumlah data yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 55 data. Berikut merupakan masing-masing rumus perhitungan setiap variabel yang digunakan:

Tabel 1 Rumus Perhitungan setiap Variabel

No	Variabel	Rumus
1	Indeks Pembangunan Manusia	$IPM = \sqrt[3]{I_{\text{kesehatan}} \times I_{\text{pendidikan}} \times I_{\text{pengeluaran}}} \times 100$
2	Produk Domestik Bruto (pendekatan pengeluaran)	$PDB = C + I + G + (E - I)$
3	Tingkat Pengangguran	$TPT = \frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Angkatan Kerja}} \times 100\%$
4	Tingkat Kemiskinan	Penduduk Miskin
5	Pertumbuhan Ekonomi	$R = \frac{PDB_t - PDB_{t-1}}{PDB_{t-1}} \times 100\%$

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi dengan menggunakan data panel, sedangkan untuk pengujian hipotesis secara parsial dilakukan melalui uji t dan pengujian simultan melalui uji F. pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan program Microsoft excel 2010 dan Eviews versi 9. Estimasi regresi data panel dapat dilakukan melalui beberapa model pendekatan:

1. *Common Effect*

Regresi data panel dengan model *Common Effect* adalah asumsi yang menganggap bahwa intersep dan slope

selalu tetap baik antar waktu maupun antar individu. Setiap individu (n) yang diregresi untuk mengetahui hubungan antara variabel dependen dengan variabel independennya akan memberikan nilai intersep maupun slope yang sama besarnya. Persamaan untuk pendekatan model *Common Effect* adalah sebagai berikut:

$$Y_{ti} = \beta + \beta X_{ti} + \varepsilon_{ti}$$

2. *Fixed Effect*

Model *Fixed Effect* memiliki konstanta yang tetap besarnya untuk berbagai periode waktu. Demikian juga dengan koefisien regresinya, besarnya tetap dari waktu ke waktu. Untuk membedakan satu objek lainnya, digunakan variabel semu (dummy) (Winarno, 2015 dalam Ikhwan, 2018). Persamaan untuk pendekatan model *Fixed Effect* adalah sebagai berikut:

$$Y_{ti} = \beta_o + \beta X_{ti} + \varepsilon_{ti}$$

3. *Random Effect*

Tidak seperti pada model *Fixed Effect*, pada model *Random Effect* diasumsikan bahwa perbedaan sebagai akibat perbedaan antar unit dan antar periode waktu terjadi secara random. Persamaan untuk pendekatan model *Random Effect* adalah sebagai berikut:

$$Y_{ti} = \beta + \beta X_{ti} + u_i + \varepsilon_{ti}$$

Pemilihan teknik estimasi regresi data panel terbagi menjadi beberapa model untuk menentukan estimasi regresi terbaik yang dapat digunakan dalam penelitian, modelnya antara lain sebagai berikut:

1. *Uji chow signifikansi antara Common Effect vs Fixed Effect*

Uji ini dilakukan dengan menguji apakah ada perbedaan antar perusahaan. Perbedaan antar perusahaan ditunjukkan oleh variabel dummy. Sehingga dalam uji ini kita menguji secara bersama-sama variabel dummy dengan menggunakan uji chow.

2. *Uji LM signifikansi antara Random Effect vs Common Effect*

Uji Lagrange Multiplier (LM) dari Breusch-Pagan untuk mengetahui Apakah model *Random Effect* dengan GLS lebih baik dari *Common Effect* metode OLS.

3. *Uji Hausman signifikansi antara Fixed Effect atau Random Effect*

Uji Hausman digunakan untuk memilih apakah *Fixed Effect* (OLS) atau *Random Effect* (GLS) dengan mengikuti kriteria Wald, Uji Hausman ini akan mengikuti distribusi chi-squares

Setelah ditemukan model terbaik yang dapat digunakan dalam penelitian, maka langkah selanjutnya adalah mengevaluasi regresi yakni: Kebaikan garis korelasi (R^2), Kelayakan Model (F-statistic) dan Pengujian hipotesis (uji-t). Berdasarkan pemaparan diatas maka ditemukan persamaan model regresi data panel dalam penelitian ini adalah:

$$IPMit = \beta_0 i + \beta_1 PDBit + \beta_2 TPTit + \beta_3 PMit + \beta_4 Rit + \epsilon it$$

Dimana:

IPM : Indeks Pembangunan Manusia pada periode tertentu

β_0 : Konstanta

i : Kabupaten/kota

t : Waktu (2014-2019)
 $\beta_1 - \beta_4$: Koefisien
PDB : Produk Dosmetik Bruto
TPT : Tingkat Pengangguran
PM : Penduduk Miskin
R : Pertumbuhan Ekonomi
 ε_{it} : error

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Model Regresi Panel

a. Uji F/Uji Chow

Uji ini digunakan untuk menentukan model terbaik antara model *Fixed Effect* dengan *Common Effect* dalam mengestimasi data panel. Hipotesis dalam uji chow adalah sebagai berikut:

H_0 : Model *Common Effect*

H_a : Model *Fixed Effect*

Jika nilai F-hitung > F-kritis atau nilai prob < α maka menolak H_0 atau menggunakan model *Common Effect* dan sebaliknya jika nilai F-hitung < F-kritis maka gagal menolak H_0 atau menggunakan model *Common Effect*. Hasil uji F sebagai berikut:

Tabel 1 Uji F/Chow

Redundant *Fixed Effects* Tests

Equation: FIXED

Test cross-section *Fixed Effects*

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	51.976251	(10,40)	0.0000
Cross-section Chi-square	145.124824	10	0.0000

Sumber: Olah Data, Eviews 9

Berdasarkan hasil uji nilai F-hitung adalah 51,97 dan F-kritis dengan df 10-40 adalah 2,08. Maka F-hitung > F-kritis serta nilai probabilitas $0,00 < 0,05$ artinya menolak H_0 atau menggunakan model *Fixed Effect*. Sehingga perlu dilanjutkan pada uji Hausman.

b. Uji LM Breusch-Pagan

Uji Lagrange Multiplier (LM) dari Breusch-Pagan digunakan untuk menentukan model terbaik antara *Random Effect* dengan *Common Effect*. Hipotesis dalam uji LM adalah sebagai berikut:

H_0 : Model Common Effect

H_a : Model *Random Effect*

Jika nilai $\text{prob} < \alpha$ maka menolak H_0 atau menggunakan model *Random Effect* dan sebaliknya jika nilai $\text{prob} > \alpha$ maka gagal menolak H_0 atau menggunakan model *Common Effect*. Hasil uji LM adalah sebagai berikut:

Tabel 2 Uji LM

Lagrange Multiplier Tests for *Random Effects*

Null hypotheses: No effects

Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided (all others) alternatives

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	73.71128 (0.0000)	0.017445 (0.8949)	73.72872 (0.0000)

Sumber: Olah Data, Eviews 9

Berdasarkan hasil uji LM dari Breusch-Pagan didapatkan nilai chi squares 73,71 dengan nilai probabilitas $0,00 < 0,05$. Maka menolak H_0 artinya model *Random*

Effect lebih baik. Karena pada hasil uji F model *Fixed Effect* lebih baik dan pada uji LM Breusch Pagan model *Random Effect* lebih baik, maka perlu diuji kembali antara model *Fixed* dan *Random Effect*.

c. Uji Hausman

Uji ini digunakan untuk menentukan model terbaik antara model *Fixed Effect* dengan *Random Effect*. Hipotesis dalam uji Hausman adalah sebagai berikut:

Ho : Model *Random Effect*

Ha : Model *Fixed Effect*

Jika nilai $\text{prob} < \alpha$ maka menolak Ho atau menggunakan model *Fixed Effect* dan sebaliknya jika nilai $\text{prob} > \alpha$ maka gagal menolak Ho atau menggunakan model *Random Effect*. Hasil uji hasuman adalah sebagai berikut:

Tabel 3 Uji Hausman

Correlated *Random Effects* - Hausman Test

Equation: RANDOM

Test cross-section *Random Effects*

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	9.237874	4	0.0554

Sumber: Olah Data, Eviews 9

Berdasarkan hasl uji hausman dengan chi squares 9,23 nilai probabilitasnya adalah $0,054 > 0,05$. Maka gagal menolak Ho artinya model *Random Effect* lebih baik daripada model *Fixed Effect* yang akan digunakan untuk mengestimasi data panel.

2. Model Regresi Panel

Berdasarkan hasil uji pemilihan, model regresi terbaik adalah model *Random Effect* dengan model persamaan regresi sebagai berikut:

$$IPMit = \beta_{0i} + \beta_1 PDBit + \beta_2 TPTit + \beta_3 TKit + \beta_4 Rit + \varepsilon it$$

$$IPMit = 76,69344 - 0,0765 PDBit + 0,0912 TPTit - 0,6321 GKit + 0,00789 Rit + \varepsilon it$$

3. Uji Kelayakan Model

a. Uji Koefisien Determinasi (R²)

Berdasarkan hasil estimasi regresi panel dengan model *Random Effect* diperoleh nilai Adjusted R-squared sebesar 0,5485 atau 54,85% Hasil ini menunjukkan bahwa kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen cukup banyak dan sisanya ditentukan oleh variabel lain yang tidak dianalisis pada penelitian ini.

b. Uji F (Simultan)

Besarnya F hitung adalah 17,40 dan nilai f-kritis 2,08. Berdasarkan garis titik temu maka nilai F-hitung berada didaerah gagal menolak Ho dan nilai proba $0,00 < 0,05$ yang berarti bahwa variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Hal ini juga menunjukkan bahwa model ini layak digunakan dalam penelitian.

4. Interpretasi Hasil dan Pembahasan

Tabel 4

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	76.69344	1.709984	44.85037	0.0000
PDB	-0.076513	0.076822	-0.995980	0.3241
PENGANGGURAN	0.091182	0.148760	0.612943	0.5427
KEMISKINAN	-0.632149	0.087500	-7.224528	0.0000
PERTUMBUHAN_ EKONOMI	7.89E-05	0.004788	0.016477	0.9869

Sumber: Olah Data, Eviews 9

- a. Pengujian H_1 , Variabel PDB berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan H_0 : $\beta_1 = 0$ sedangkan H_a : $\beta_1 > 0$

Berdasarkan tabel statistic diatas, didapatkan nilai koefisien pada variabel PDB sebesar -0.07651. Hal ini berarti jika nilai PDB naik sebesar 1 persen sedangkan variabel lainnya tetap maka akan menurunkan nilai IPM Sebesar 0.07651 begitupula sebaliknya. Uji secara parsial dapat dilihat, nilai t-hitung PDB adalah -0,996 dan nilai t-kritis dengan tingkat error 10% $df(n-k, 55-5=50)$ adalah 1,2987, maka garis t-hitung berada pada daerah gagal menolak H_0 atau dapat dilihat dari nilai nilai probabilitas sebesar $0,3241 > 0,10$. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis awal ditolak, sehingga variabel PDB dinyatakan tidak berpengaruh terhadap variabel IPM.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wulandari et al., (2019) yang menyatakan bahwa variabel PDB memiliki korelasi negative secara jangka panjang terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Hasil penelitian ini juga didukung oleh Teori Lestari dalam Wulandari et al., (2019) yang menyatakan bahwa

pembangunan tidak secara permanen memiliki korelasi positif dengan indeks pembangunan manusia. Hal ini wajar karena pembangunan yang biasa difokuskan pada unit fisik yang biasanya terjadi di negara berkembang. Berbeda halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Khristina Kiha et al., (2021) yang menyatakan bahwa PDB memiliki pengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia, dilihat dari nilai alpha (α) sebesar 0,05 dan $dk = n - k$ ($20 - 4 = 16$), maka dapat diperoleh t tabel sebesar 1,745 dan t hitung sebesar -1,466. Dengan demikian maka nilai t hitung lebih kecil dari t tabel dimana $-1,466 < 1,745$ dan tingkat signifikansi $0,162 > 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel PDB terhadap Indeks Pembangunan Manusia, karena PDB merupakan seluruh nilai tambah yang timbul dari berbagai kegiatan ekonomi disuatu wilayah dan juga sebagai jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan disuatu daerah dalam satu tahun, dan hal ini juga sejalan dengan teori konsumsi keynes yang menyatakan bahwa besar kecilnya tingkat konsumsi ditentukan oleh besarnya pendapatan.

Bagi pemerintah, terlihat bahwa PDB ini akan sangat mempengaruhi kemampuan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhannya. Dimana secara logika bila PDB naik, maka dengan sendirinya tingkat pendapatan perkapita masyarakat akan naik, dengan naiknya income perkapita akan sudah tentu tingkat konsumsi juga ikut meningkat, dan pada akhirnya tingkat kesejahteraan pun akan meningkat. Disamping itu PDB dapat mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat yaitu pertumbuhan ekonomi.

- b. Pengujian H₂, Variabel Pengangguran berpengaruh negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan
Ho: $\beta_2 = 0$ sedangkan Ha: $\beta_2 < 0$

Berdasarkan tabel statistic diatas, didapatkan nilai koefisien pada variabel Pengangguran sebesar 0.0912. Hal ini berarti jika nilai Pengangguran naik sebesar 1 jiwa sedangkan variabel lainnya tetap maka akan menaikkan nilai IPM Sebesar 0.0912 begitupula sebaliknya. Pengujian variabel secara parsial dapat dilihat dari nilai t-hitung Pengangguran adalah 0,61 dan nilai t-kritis dengan tingkat error 10% $df(n-k, 55-5=50)$ adalah 1,2987, maka garis t-hitung berada pada daerah menolak Ho atau dapat dilihat dari nilai probabilitas sebesar $0,5427 > 0,10$. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis awal diterima sehingga variabel Pengangguran dinyatakan berpengaruh negatif dengan tingkat error 10%, namun tidak signifikan terhadap variabel IPM.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Khristina Kiha et al., (2021) yang mengemukakan bahwa pengangguran tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia, dilihat dari koefisiennya diketahui bahwa jika pengangguran bertambah satu-satuan maka IPM bertambah menjadi 1,519. Hubungan ini tidak signifikan karena nilai signifikannya $0,418 > 0,005$ sehingga hipotesisnya ditolak artinya tidak terdapat hubungan signifikan antara pengangguran terhadap IPM. Hasil penelitian ini juga didukung oleh teori yang dilakukan oleh Wahyuni dalam Khristina et al (2021) mengatakan bahwa tingkat pengangguran merupakan keadaan seseorang yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan guna memperoleh pendapatan. Ketika tingkat pengangguran meningkat maka indeks hidup layak suatu

masyarakat meningkat maka perusahaan-perusahaan akan memperkerjakan tenaga kerja lebih sehingga tingkat indeks hidup layak para pekerja akan meningkat sehingga akan mengurangi indeks pembangunan manusia.

- c. Pengujian H_3 , Variabel Kemiskinan berpengaruh negative terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan $H_0: \beta_3 = 0$ sedangkan $H_a: \beta_3 < 0$

Berdasarkan tabel statistic diatas, didapatkan nilai koefisien pada variabel Kemiskinan sebesar -0.6321. Hal ini berarti jika nilai Kemiskinan naik sebesar 1 jiwa sedangkan variabel lainnya tetap maka akan menurunkan nilai IPM Sebesar 63,21% begitupula sebaliknya. Artinya setiap peningkatan kemiskinan akan menurunkan presentase indeks pembangunan manusia di Indonesia Timur. Untuk pengujian variabel secara parsial dapat dilihat dari nilai t-hitung Pengangguran sebesar -7,225 dan nilai t-kritis dengan tingkat error 10% $df(n-k, 55-5=50)$ adalah 1,2987, maka garis t-hitung berada pada daerah menolak H_0 atau dapat dilihat dari nilai probabilitas sebesar $0,00 < 0,10$. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis awal diterima sehingga variabel Kemiskinan dinyatakan berpengaruh negative signifikan terhadap variabel IPM.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori kemiskinan, dimana jika garis kemiskinan semakin meningkat dan manusia tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya maka akan berpengaruh pada penurunan tingkat produktivitas, berkurangnya investasi dan permintaan di pasar juga akan menurun. Seperti yang disampaikan oleh Supriatna (1997) bahwa kemiskinan ini akan ditandai dengan penurunannya tingkat pendidikan, produktivitas kerja, pendapatan, kesehatan dan juga gizi serta kesejahteraannya yang dapat menimbulkan rasa ketidak berdayaan. Penelitian ini sejalan

dengan penelitian Regina et al. (2020) dan Dewi (2017) yang menyatakan bahwa tingkat kemiskinan berpengaruh negative terhadap tperubahan indeks pembangunan manusia. Namun hasil ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rimawan et al. (2020) dimana indeks pembangunan manusia tidak berpengaruh terhadap kemiskinan. Negara dengan tingkat kemiskinan yang relative besar cenderung akan menunjukkan nilai indeks pembangunan manusia yang rendah, sehingga nilai yang rendah ini juga akan mengurangi nilai dalam pembangunan (Fosu, 2007 dalam Regina et al., 2020).

Berpengaruhnya tingkat kemiskinan terhadap perubahan indeks pembangunan manusia di Indonesia Timur, menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam mengurangi kemiskinan sangat perlu ditekankan agar dapat meningkatkan produktivitas manusia. Pengelolaan sumber daya manusia yang baik tentunya akan meningkatkan kualitas hidup dan memberikan kehidupan yang layak pada masyarakatnya. Setiap individu akan berkesempatan untuk mendapati akses ketenagakerjaan dan juga keterampilan sehingga dapat memberikan kepercayaan diri dalam produktivitas kerja.

- d. Pengujian H₄, Variabel Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan H₀: $\beta_4 = 0$ sedangkan H_a: $\beta_4 > 0$

Berdasarkan tabel statistic diatas, didapatkan nilai koefisien pada variabel Pertumbuhan Ekonomi sebesar 0.00789. Hal ini berarti jika nilai Pertumbuhan Ekonomi naik sebesar 1 persen sedangkan variabel lainnya tetap maka akan menaikkan nilai IPM Sebesar 0.007% begitupula sebaliknya. Untuk pengujian variabel secara parsial diatas nilai t-hitung Pengangguran adalah -7,225 dan nilai t-kritis

dengan tingkat error 10% $df(n-k, 55-5=50)$ adalah 1,2987, maka garis t-hitung berada pada daerah menolak H_0 atau dapat dilihat dari nilai probabilitas sebesar $0,9869 > 0,10$. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis awal diterima sehingga variabel Pertumbuhan ekonomi dinyatakan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap variabel IPM.

Dapat kita lihat dari hasil nilai koefisien peningkatan pertumbuhan ekonomi sangat memiliki pengaruh yang cukup kecil terhadap kenaikan indeks pembangunan manusia, berdasarkan hasil uji-t pertumbuhan ekonomi dinyatakan berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia. Hasil penelitian ini hampir sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Syofya (2018) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia. Hal ini dikarenakan paradigma pembangunan saat ini adalah pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan pembangunan manusia yang dapat dilihat dari kualitas hidup masing-masing negara. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana kegiatan ekonomi akan memberikan pendapatan lebih bagi masyarakat dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Regina et al (2020) dan Dewi (2017) menemukan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.

Wujud keberhasilan pertumbuhan ekonomi terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia perlu dibarengi dengan pemerataan pembangunan. Dengan terwujudnya hal ini, tentunya masyarakat juga akan merasakan hasil dari pemerataan pembangunan ini. Kurangnya optimalisasi pelaksanaan konsep IPM yang telah diterbitkan oleh UNDP

seperti program kesehatan, pendidikan dan kehidupan layak menyebabkan kondisi pembangunan manusia yang diprogramkan oleh pemerintah masih perlu di tingkatkan (Regina et al., 2020).

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh PDB, pengangguran, kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel PDB masing-masing secara parsial tidak berpengaruh terhadap perubahan variabel Indeks Pembangunan Manusia. Variabel pengangguran berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia, variabel kemiskinan berpengaruh negative dan signifikan terhadap perubahan Indeks Pembangunan Manusia dan variabel Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif tidak signifikan. Terdapat banyak faktor-faktor penentu lainnya yang dapat digunakan oleh penelitian selanjutnya, guna memperluas jangkauan penelitian. Seperti pengukuran pendidikan, kesehatan dan kelayakan hidup yang merupakan indikator dari Indeks Pembangunan Manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Anita, R. R., & Dailami. (2019). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Ecogen*, 2(3), 433. <https://doi.org/10.24036/jmpe.v2i3.7414>
- Badan Pusat Statistik. (2017). *Badan Pusat Statistik* (hal. 335–358). <https://doi.org/10.1055/s-2008-1040325>

- Baeti, N. (2013). Pengaruh Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2011. *Economics Development Analysis Journal*.
- Dewi, N. (2017). Pengaruh kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia di provinsi riau. *JOM Fekom*, 4, 870–882.
- Khan, N. H., Ju, Y., & Hassan, S. T. (2018). Modeling the impact of economic growth and terrorism on the human development index: collecting evidence from Pakistan. *Environmental Science and Pollution Research*, 25(34), 34661–34673. <https://doi.org/10.1007/s11356-018-3275-5>
- Khristina Kiha, E., Seran, S., & Trifonia Lau, H. (2021). Pengaruh Jumlah Penduduk, Pengangguran, Dan Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan ManusiaP (IPM) Di Kabupaten Belu. *urnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 2(07), 60–84.
- Kuncoro, M. (2010). *Dasar-dasar Ekonomi Pembangunan*. UPP STIM YKPN.
- Marsela Candrawati, K. A. (2020). Dampak Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *Studi Bisnis dan Administrasi*, 3(2), 46–61.
- Ningrum, J. W., Khairunnisa, A. H., & Huda, N. (2020). Pengaruh Kemiskinan , Tingkat Pengangguran , Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia Tahun 2014-2018 dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(02), 212–222.

- Nurisqi Amalia, Anisa Nurpita, R. O. (2018). Human Development Index, Unemployment and Poverty in Papua Province 2010-2015. *Ekonomi Pembangunan*, 16.
- Prasetyoningrum, A. K., Prasetyoningrum, A. K., & Sukmawati, U. S. (2018). *Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Indonesia*. 6, 217–240.
- Regina, Sinring, B., & Arifin. (2020). Analysis the Effects of Poverty , General Allocation Fund and Economic Growth To Human Development Index (Hdi) in Indonesia. *Economic Resources*, 3(1), 1–12.
- Rimawan, M., Alwi, A., Ismunandar, I., & Aryani, F. (2020). *Village Fund Allocation on Economic Growth, Human Development Index and Poverty*. 465(Access 2019), 338–342. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200827.085>
- Sri, M., Suliswanto, W., Magister, M., Ekonomi, I., & Brawijaya, U. (2010). *DAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)*.
- Sukirno. (2013). *Pengantar Teori Ekonomi Makro*. PT Raja Grafindo Persada.
- Supriatna. (1997). *Birokrasi Kemiskinan* (1 ed.). Press, Humaniora Utama.
- Susanti, S. (2013). *Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Pengangguran dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Kemiskinan di Jawa Barat dengan Menggunakan Analisis Data Panel*. 9(1), 1–18.

- Syofya, H. (2018). Pengaruh Tingkat Kemiskinan Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 15(2), 177–185. <https://doi.org/10.31849/jieb.v15i2.1153>
- Wulandari, D., Narmaditya, B. S., Prayitno, P. H., Ishak, S., & Asnan, L. (2019). Human Development Index, Poverty and Gross Regional Domestic Product: Evidence from Malang, Indonesia. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis (JPEB)*, 7(2), 146–152. <https://doi.org/10.21009/jpeb.007.2.6>

Buku ini akan memberikan gambaran secara gamblang mengenai masalah faktor penentu pembangunan ekonomi di Indonesia bagian timur. Sehingga dengan itu diharapkan buku ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi mahasiswa dalam memahami determinan pertumbuhan ekonomi di Indonesia bagian timur. Bagi peneliti, buku ini diharapkan sebagai pedoman dalam melakukan penelitian-penelitian yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi di Indonesia bagian timur, dan bagi masyarakat umum, buku ini diharapkan sebagai dasar pandangan dalam melihat keadaan perekonomian di Indonesia bagian timur.

Penerbit:
Magister Ekonomi Syariah (MES)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)
Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta
Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta 55281

